LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED TAHUN 2025

TINGKAT WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 7 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40
VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 7 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.244.057.326 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.244.057.326 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.464.602.067.793 atau mencapai 98,15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.548.555.211.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.213.952.393.082 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp195.684.354; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.212.995.719.839 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp760.988.889.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.158.832.174 dan Rp1.207.027.220.964

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp439.809.808 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.480.565.460.417 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp4.481.005.270.225, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp560.210.133 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp4.480.193.730.486.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp1.194.328.821.431, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4.480.193.730.486 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 24.701.587.388 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4.468.190.542.631 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.207.027.220.964

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajaka	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	1.244.057.326	-	1.022.663.149
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**1.244.057.326**	**-**	**1.022.663.149**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.515.144.934.000	4.431.610.792.234	98,15	4.071.801.250.242
Belanja Barang	B.2.2	31.065.015.000	30.652.340.340	98,67	42.113.014.259
Belanja Modal	B.2.3	2.345.262.000	2.338.935.219	99,73	11.569.001.302
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BE		**4.548.555.211.000**	**4.464.602.067.793**	**98,15**	**4.125.483.265.803**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	20.369.365
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	(101.847)
Persediaan	C.4	195.503.254	328.099.581
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**195.684.354**	**348.367.099**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	1.036.235.798.000	1.009.203.840.000
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	54.675.211.849	53.661.531.399
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	264.704.585.054	264.722.454.652
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	650.224.588	650.224.588
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	177.808.044	251.923.155
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(143.447.907.696)	(131.109.474.650)
Jumlah Aset Tetap		**1.212.995.719.839**	**1.197.380.499.144**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	109.020.000	109.020.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	3.730.431.578	3.207.322.592
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(3.078.462.689)	(2.871.133.565)
Jumlah Aset Lainnya		**760.988.889**	**445.209.027**
JUMLAH ASET		**1.213.952.393.082**	**1.198.174.075.270**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	7.954.387.512	4.839.049.131
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	204.444.662	281.765.227
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**8.158.832.174**	**5.120.814.358**
JUMLAH KEWAJIBAN		**8.158.832.174**	**5.120.814.358**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	1.207.027.220.964	1.194.328.821.431
JUMLAH EKUTAS		**1.207.027.220.964**	**1.194.328.821.431**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.215.186.053.138**	**1.199.449.635.789**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	439.809.808	370.663.795
Jumlah Pendapatan		**439.809.808**	**370.663.795**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	4.434.778.249.582	4.070.319.809.617
Beban Persediaan	D.4	673.948.186	984.279.824
Beban Barang dan Jasa	D.5	19.449.426.516	23.712.721.107
Beban Pemeliharaan	D.6	6.864.756.517	7.797.865.567
Beban Perjalanan Dinas	D.7	3.742.583.221	9.596.595.363
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	15.056.496.395	15.023.305.780
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	101.847
Jumlah Beban		**4.480.565.460.417**	**4.127.434.679.105**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**4.481.005.270.225**	**(4.127.064.015.310)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	995.360.585	955.994.911
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	246.065.128	187.648.049
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	(681.215.580)	(447.844.239)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**560.210.133**	**695.798.721**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**4.480.193.730.486**	**(4.127.370.129.533)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**4.480.193.730.486**	**(4.127.370.129.533)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**1.194.328.821.431**	**1.197.010.651.828**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(4.480.193.730.486)**	**(4.127.370.129.533)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**24.701.587.388**	**188.985.356**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	24.771.295.716	184.740.502
Koreksi Lain-Lain	E.46	(69.708.328)	4.244.854
Jumlah		**24.701.587.388**	**188.985.356**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.468.190.542.631	4.124.499.313.780
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		12.698.399.533	(2.681.830.397)
EKUITAS AKHIR	E.6	**1.207.027.220.964**	**1.194.328.821.431**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan. Pengintregasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan literatur, penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Kementerian dalam Ditjen-ditjen dan seterusnya sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian Kementerian Agama termasuk organisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Kementerian Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012. Penyempurnaan itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".” Visi ini mencerminkan tujuan Kemenag dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1 Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Beragama;
2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4 Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
b. Ekoteologi;
c. Layanan keagamaan berdampak;
d. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
e. Pesantren berdaya;
f. pemberdayaan ekonomi umat;
g. Sukses penyelenggaraan haji; dan;
h. Digitalisasi tata kelola.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penggabungan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi Satker Sebelumnya. Modul dalam aplikasi SAKTI;

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator;

Laporan Keuangan 2025 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2025 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) adalah 39 satuan kerja

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	297719	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK		1		1
2	297367	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN		1		1
3	417890	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN		1		1
4	297901	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI		1		1

5	297172	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI		1		1
6	417884	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO		1		1
7	297261	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN		1		1
8	297591	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI		1		1
9	297388	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI		1		1
10	297566	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG		1		1
11	417853	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN		1		1
12	298114	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN		1		1
13	297222	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG		1		1
14	297350	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG		1		1
15	298121	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN		1		1
16	298266	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG		1		1
17	417904	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG		1		1
18	417800	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		1		1
19	297130	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO		1		1
20	298181	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN		1		1
21	298004	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN		1		1
22	418001	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER		1		1
23	417816	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA		1		1
24	298291	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN		1		1
25	650079	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU		1		1
26	298210	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP		1		1
27	417822	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK		1		1
28	417862	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO		1		1
29	417981	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO		1		1
30	417831	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO		1		1
31	297808	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN		1		1
32	298156	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO		1		1
33	297751	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG		1		1
34	297634	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK		1		1

35	297620	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR		1		1
36	308209	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO		1		1
37	297371	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO		1		1
38	297304	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO		1		1
39	297503	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		1		1
Jumlah				**39**		**39**

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	3.823.127.199.000	4.515.144.934.000
Belanja Barang	44.641.908.000	31.065.015.000
Belanja Modal	3.870.501.000	2.345.262.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**3.871.639.608.000**	**4.548.555.211.000**

Pendapatan Rp1.244.057.326

B.1 Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.244.057.326 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.242.251.301. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pendapatan pengembalian belanja pegawai, barang tahun yang lalu dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1.242.251.301	-
Jumlah	**-**	**1.242.251.301**	**-**

Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 21,47 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.242.251.301	1.022.663.149	21,47
Jumlah	**1.242.251.301**	**1.022.663.149**	**21,47**

Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp1.244.057.326

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1.244.057.326 dan Rp1.022.663.149. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 21,47 dari TA 2024 Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pengembalian belanja pegawai, barang tahun yang lalu. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.242.251.301	1.022.663.149	21,47
Jumlah	**1.242.251.301**	**1.022.663.149**	**21,47**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	33.675.000	29.406.999	14,51
Jumlah	**#REF!**	**#REF!**	**-**

Belanja Rp4.464.602.067.793

B.2 Belanja

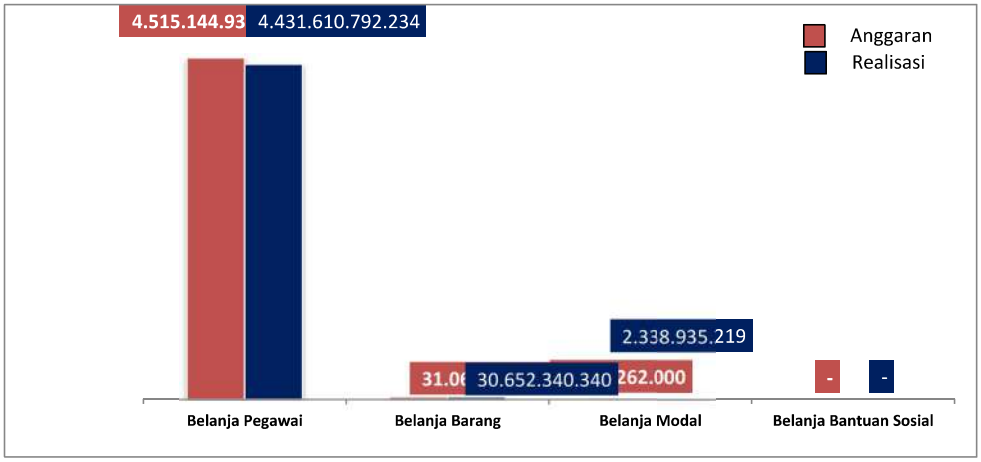
Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp4.464.602.067.793 atau 98,15 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.548.555.211.000 Rincian anggaran dan belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4.515.144.934.000	4.431.610.792.234	98,15
Belanja Barang	31.065.015.000	30.652.340.340	98,67
Belanja Modal	2.345.262.000	2.338.935.219	99,73
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**4.548.555.211.000**	**4.464.602.067.793**	**98,15**

Komposisi anggaran dan belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,22% Kenaikan realisasi belanja tahun berjalan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhitung mulai tahun anggaran 2024 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS uang makan PNS uang lembur PNS dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023 tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. dan terbayarnya tenaga PPPK . Berikut rincian belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	4.431.610.792.234	4.071.801.250.242	8,84
Belanja Barang	30.652.340.340	42.113.014.259	(27,21)
Belanja Modal	2.338.935.219	11.569.001.302	(79,78)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**4.464.602.067.793**	**4.125.483.265.803**	**8,22**

Belanja Pegawai Rp4.431.610.792.234

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.431.610.792.234 dan Rp4.071.801.250.242. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,17 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan realisasi belanja pegawai karena belanja gaji pokok anggaran terpusat DIPA Sekretariat Jenderal dan terbayarnya CPNS, PPPK tahun 2024

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.302.740.442.530	1.307.274.739.025	(0,35)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.449.847	16.850.493	(8,31)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99.051.274.055	100.686.754.178	(1,62)
Belanja Tunj. Anak PNS	29.515.578.495	30.546.797.264	(3,38)
Belanja Tunj. Struktural PNS	4.163.435.400	4.212.530.000	(1,17)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	97.775.126.700	100.773.793.966	(2,98)
Belanja Tunj. PPh PNS	12.613.883.877	12.317.128.386	2,41
Belanja Tunj. Beras PNS	64.688.504.980	66.300.067.010	(2,43)
Belanja Uang Makan PNS	195.339.499.672	199.695.150.750	(2,18)
Belanja Tunjangan Umum PNS	10.594.705.800	6.555.282.500	61,62
Belanja Tunjangan Profesi Guru	1.281.256.053.542	1.301.659.321.667	(1,57)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	260.550.000	300.300.000	(13,24)
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	235.446.369.927	187.843.591.333	25,34
Belanja Gaji Pokok PPPK	394.451.775.715	222.806.132.800	77,04
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.071.747	4.216.241	44,01
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29.473.966.340	16.342.958.120	80,35
Belanja Tunjangan Anak PPPK	8.911.411.602	4.895.183.638	82,04
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31.349.061.323	22.431.748.080	39,75
Belanja Tunjangan Beras PPPK	26.203.052.660	14.221.246.440	84,25
Belanja Uang Makan PPPK	80.477.932.350	47.065.238.488	70,99
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.508.080.000	-	-
Belanja Uang Honor Tetap	89.430.000	132.600.000	(32,56)
Belanja Uang Lembur	3.062.313.000	3.649.859.000	(16,10)
Jumlah Belanja kotor	**3.911.993.969.562**	**3.649.731.489.379**	**7,19**
Pengembalian Belanja Pegawai	2.338.172.723	1.666.767.525	40,28
Jumlah Belanja	**3.909.655.796.839**	**3.648.064.721.854**	**7,17**

Belanja Barang Rp30.652.340.340

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.652.340.340 dan Rp42.113.014.259. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 27,21% dari TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	12.477.173.310	15.476.984.601	(19,38)
Belanja Barang Non Operasional	2.127.476.645	2.868.317.813	(25,83)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	556.649.948	1.115.051.234	(50,08)
Belanja Jasa	4.909.278.140	5.379.740.658	(8,75)
Belanja Pemeliharaan	6.849.458.428	7.679.712.318	(10,81)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.742.583.221	9.598.575.363	(61,01)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**30.662.619.692**	**42.118.381.987**	**(27,20)**
Pengembalian Belanja	10,279,352	5.367.728	91,50
Jumlah Belanja	**30.652.340.340**	**42.113.014.259**	**(27,21)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Belanja Modal Rp2.338.935.219

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.338.935.219 dan Rp11.569.001.302. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 79,78% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**2.338.935.219**	**11.569.001.302**	**(79,78)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**2.338.935.219**	**11.569.001.302**	**(79,78)**

Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.046.518.219

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.046.518.219 dan Rp1.984.347.620, mengalami kenaikan sebesar 3,13 % bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.046.518.219	1.984.347.620	3,13
Jumlah Belanja Kotor	**2.046.518.219**	**1.984.347.620**	**3,13**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**2.046.518.219**	**1.984.347.620**	**3,13**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp292.417.000

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp292.417.000 dan Rp9.582.203.682 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 96,93% dibandingkan TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	84.900.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**292.417.000**	**9.517.048.982**	**(96,93)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**292.417.000**	**9.517.048.982**	**(96,93)**

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.450.000, mengalami penurunan sebesar 100,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	2.450.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**2.450.000**	**(100,00)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**2.450.000**	**(100,00)**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Nama Satker	Jumlah
1	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO	-
2	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	-
3	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	-
4	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	-
5	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO	-
6	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG	-
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN	-
8	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO	-
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI	-
10	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR	-
11	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG	-
12	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	-
13	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR	-
14	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK	-
15	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK	-
16	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG	-
17	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	-
18	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI	-
19	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	-
20	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN	-
21	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN	-
22	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	-
23	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN	-
24	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP	-
25	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG	-
26	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN	-
27	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO	-
28	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	-
29	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	-
30	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK	-
31	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO	-
32	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN	-
33	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	-
34	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	-
35	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	-
36	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG	-
37	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO	-
38	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER	-
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	-
Jumlah		**780**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp181.100

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp181.100 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp 181.100	Rp -
Jumlah	**Rp 181.100**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	(101.847)
Jumlah	**-**	**(101.847)**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp20.369.365. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	20.369.365
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**20.369.365**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp101.847. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp195.503.254

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp195.503.254 dan Rp328.099.581. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
Barang Konsumsi	191.157.627	317.286.659
Jumlah	**195.503.254**	**328.099.581**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		**-**	**-**

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp1.036.235.798.000

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.036.235.798.000 dan Rp1.009.203.840.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**1.009.203.840.000**
Mutasi tambah :	
	-
	-
Mutasi kurang :	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**1.009.203.840.000**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	0	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp54.675.211.849

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp54.675.211.849 dan Rp53.661.531.399. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**53.661.531.399**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(773.725.298)
Saldo per 31 Desember 2025	**57.376.539.132**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(48.656.982.005)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**8.719.557.127**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Penjelasan mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap terdapat pada satker;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp264.704.585.054

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp264.704.585.054 dan Rp264.722.454.652. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**264.722.454.652**
Mutasi tambah:	
Pembelian	317.196.000
Transfer Masuk	2.472.000.000
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	520.000.000
Saldo per 31 Desember 2025	**264.055.243.152**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(94.484.747.900)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**169.570.495.252**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp650.224.588

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.650.224.588 dan Rp.650.224.588. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**650.224.588**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**650.224.588**
Akumulasi Penyusutan s.d.	(240.831.882)
Nilai Buku per	**409.392.706**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp177.808.044

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.177.808.044 dan Rp.251.923.155. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**251.923.155**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**251.923.155**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(65.345.909)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**186.577.246**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Satker Sekjen Tingkat Wilayah ada sebagai berikut; Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp143.447.907.696

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp143.447.907.696 dan Rp131.109.474.650. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	54.675.211.849	(48.656.982.005)	6.018.229.844
2	Gedung dan Bangunan	264.704.585.054	(94.484.747.900)	170.219.837.154
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	650.224.588	(240.831.882)	409.392.706
4	Aset Tetap Lainnya	177.808.044	(65.345.909)	112.462.135
Akumulasi Penyusutan		**320.207.829.535**	**(143.447.907.696)**	**176.759.921.839**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp109.020.000

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp109.020.000 dan Rp109.020.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal) berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**109.020.000**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-

Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**109.020.000**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(109.020.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp3.730.431.578

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp3.730.431.578 dan Rp3.207.322.592. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**3.207.322.592**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.903.194.769
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**7.110.517.361**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(2.969.442.689)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**4.141.074.672**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-

Mutasi Kurang

-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp3.078.462.689 dan Rp2.871.133.565. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	109.020.000	(109.020.000)	-
Aset Lain-lain	3.730.431.578	(2.969.442.689)	760.988.889
Total	**3.839.451.578**	**(3.078.462.689)**	**760.988.889**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp7.954.387.512

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.954.387.512 dan Rp4.839.049.131. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	(7.946.952.806)	(4.777.573.298)
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	(7.253.606)	(61.475.833)
Total	**(7.954.387.512)**	**(4.839.049.131)**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp204.444.662

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp204.444.662 dan Rp281.765.227. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	204.444.662	281.765.227
Total	**204.444.662**	**281.765.227**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Muka Kerja Tahun 2025 dari KPPN sudah nihil	*0*
Jumlah	*0*

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp1.207.027.220.964

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.207.027.220.964. dan Rp1.194.328.821.431. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp1.194.328.821.431,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.194.328.821.431,00 dan Rp.1.197.010.651.828,00

Defisit LO Rp.-4.480.193.730.486,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-4.480.193.730.486,00 dan Rp.-4.127.370.129.533,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.24.701.587.388 dan Rp.188.985.356 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp24.771.295.716

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.24.771.295.716 dan Rp.184.740.502.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24.771.295.716
Jumlah	**24.771.295.716,0**

Koreksi Lain-Lain Rp-69.708.328

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-69.708.328 dan Rp.4.244.854. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(69.708.328)
-	-
Jumlah	**(69.708.328,0)**

Transaksi Antar Entitas Rp4.468.190.542.631

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4.468.190.542.631 dan Rp.4.124.499.313.780. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.464.600.000.000
Diterima dari Entitas Lain	(1.242.251.301)
Transfer Keluar	(292.956.457)
Transfer Masuk	2.418.682.596
Pengesahan Hibah Langsung	1.750.000.000
Jumlah	**4.468.190.542.631**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 4.464.600.000.000, sedangkan DDEL sebesar Rp 1.242.251.301

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-292.956.457 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.418.682.596 yang terdiri

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp1.207.027.220.964

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.207.027.220.964,00 dan Rp.1.194.328.821.431,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025010500KD

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**1,242,251,301**	**1,242,251,301**	**0**	**0**	**1,022,663,149**	**1,022,663,149**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,242,251,301	1,242,251,301	0	0	1,022,663,149	1,022,663,149	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**1,242,251,301**	**1,242,251,301**	**0**	**0**	**1,022,663,149**	**1,022,663,149**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,548,555,211,000	4,464,602,067,793	(83,953,143,207)	98.15	3,881,739,496,000	4,125,483,265,803	243,743,769,803	106.28
1. Belanja Pegawai	4,515,144,934,000	4,431,610,792,234	(83,534,141,766)	98.15	3,827,162,847,000	4,071,801,250,242	244,638,403,242	106.39
2. Belanja Barang	31,065,015,000	30,652,340,340	(412,674,660)	98.67	43,003,462,000	42,113,014,259	(890,447,741)	97.93
3. Belanja Modal	2,345,262,000	2,338,935,219	(6,326,781)	99.73	11,573,187,000	11,569,001,302	(4,185,698)	99.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025010500KD

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**4,548,555,211,000**	**4,464,602,067,793**	**(83,953,143,207)**	**98.15**	**3,881,739,496,000**	**4,125,483,265,803**	**243,743,769,803**	**106.28**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

UAPPAW : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	181,100	0	181,100	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	20,369,365	(20,369,365)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(101,847)	101,847	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	20,267,518	(20,267,518)	(100.00)
Persediaan	195,503,254	328,099,581	(132,596,327)	(40.41)
JUMLAH ASET LANCAR	**195,684,354**	**348,367,099**	**(152,682,745)**	**(43.83)**
ASET TETAP				
Tanah	1,036,235,798,000	1,009,203,840,000	27,031,958,000	2.68
Peralatan dan Mesin	54,675,211,849	53,661,531,399	1,013,680,450	1.89
Gedung dan Bangunan	264,704,585,054	264,722,454,652	(17,869,598)	(0.01)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	650,224,588	650,224,588	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	177,808,044	251,923,155	(74,115,111)	(29.42)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(143,447,907,696)	(131,109,474,650)	(12,338,433,046)	9.41
JUMLAH ASET TETAP	**1,212,995,719,839**	**1,197,380,499,144**	**15,615,220,695**	**1.30**
Properti Investasi				
Properti Investasi	1,589,813,998	1,589,813,998	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(356,153,942)	(314,253,479)	(41,900,463)	13.33
JUMLAH Properti Investasi	**1,233,660,056**	**1,275,560,519**	**(41,900,463)**	**(3.28)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	109,020,000	109,020,000	0	0.00
Aset Lain-lain	3,730,431,578	3,207,322,592	523,108,986	16.31
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,078,462,689)	(2,871,133,565)	(207,329,124)	7.22
JUMLAH ASET LAINNYA	**760,988,889**	**445,209,027**	**315,779,862**	**70.93**
JUMLAH ASET	**1,215,186,053,138**	**1,199,449,635,789**	**15,736,417,349**	**1.31**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	7,954,387,512	4,839,049,131	3,115,338,381	64.38
Pendapatan Diterima Dimuka	204,444,662	281,765,227	(77,320,565)	(27.44)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**8,158,832,174**	**5,120,814,358**	**3,038,017,816**	**59.33**
JUMLAH KEWAJIBAN	**8,158,832,174**	**5,120,814,358**	**3,038,017,816**	**59.33**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,207,027,220,964	1,194,328,821,431	12,698,399,533	1.06
JUMLAH EKUITAS	**1,207,027,220,964**	**1,194,328,821,431**	**12,698,399,533**	**1.06**
JUMLAH EKUITAS	**1,207,027,220,964**	**1,194,328,821,431**	**12,698,399,533**	**1.06**

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

UAPPAW : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,215,186,053,138**	**1,199,449,635,789**	**15,736,417,349**	**1.31**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI : **(025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	439,809,808	370,663,795	69,146,013	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	439,809,808	370,663,795	69,146,013	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	439,809,808	370,663,795	69,146,013	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	4,434,778,249,582	4,070,319,809,617	364,458,439,965	-
Beban Persediaan	673,948,186	984,279,824	(310,331,638)	-
Beban Barang dan Jasa	19,449,426,516	23,712,721,107	(4,263,294,591)	-
Beban Pemeliharaan	6,864,756,517	7,797,865,567	(933,109,050)	-
Beban Perjalanan Dinas	3,742,583,221	9,596,595,363	(5,854,012,142)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I **: (01) SEKRETARIAT JENDERAL**

WILAYAH/PROVINSI **: (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,056,496,395	15,023,305,780	33,190,615	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	101,847	(101,847)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	4,480,565,460,417	4,127,434,679,105	353,130,781,312	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,480,125,650,609)	(4,127,064,015,310)	(353,061,635,299)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(749,295,457)	(768,346,862)	19,051,405	-
Pendapatan Pelepasan Aset	246,065,128	187,648,049	58,417,079	-
Beban Pelepasan Aset	995,360,585	955,994,911	39,365,674	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	681,215,580	462,232,639	218,982,941	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	681,215,580	462,232,639	218,982,941	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(68,079,877)	(306,114,223)	238,034,346	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,480,193,730,486)	(4,127,370,129,533)	(352,823,600,953)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,480,193,730,486)	(4,127,370,129,533)	(352,823,600,953)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:48 AM

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,194,328,821,431	1,197,010,651,828	(2,681,830,397)	(0.22)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,480,193,730,486)	(4,127,370,129,533)	(352,823,600,953)	8.55
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	24,701,587,388	188,985,356	24,512,602,032	12,970.64
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	24,771,295,716	184,740,502	24,586,555,214	13,308.7
LAIN-LAIN	(69,708,328)	4,244,854	(73,953,182)	(1,742.18)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,468,190,542,631	4,124,499,313,780	343,691,228,851	8.33
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	12,698,399,533	(2,681,830,397)	15,380,229,930	(573.5)
EKUITAS AKHIR	1,207,027,220,964	1,194,328,821,431	12,698,399,533	1.06

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 025010500KD **Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 06/05/26 8:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	33,675,000	0	33,675,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,875,128	0	26,875,128	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	185,515,000	0	185,515,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	239,706,917	0	239,706,917	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	36,569,900	0	36,569,900	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	36,771,616	0	36,771,616	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	559,113,561	0	559,113,561	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	681,106,689	0	681,106,689	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,914,916	1,806,025	108,891	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,922,160	0	1,922,160	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	684,943,765	1,806,025	683,137,740	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,244,057,326	1,806,025	1,242,251,301	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,244,057,326	1,806,025	1,242,251,301	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:49 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	181,100	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	191,157,627	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,345,627	0
0.0	131111	Tanah	1,036,235,798,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	54,675,211,849	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	264,704,585,054	0
0.0	134112	Irigasi	314,297,000	0
0.0	134113	Jaringan	335,927,588	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	177,808,044	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	48,656,982,005
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	94,484,747,900
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	127,647,027
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	113,184,855
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	65,345,909
0.0	138311	Properti Investasi	1,589,813,998	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	356,153,942
0.0	162151	Software	109,020,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	3,730,431,578	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	2,969,442,689
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	109,020,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	7,946,952,806
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	7,253,606
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	181,100
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	204,444,662
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,464,602,067,793
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,242,251,301	0
0.0	313211	Transfer Keluar	292,956,457	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,418,682,596
0.0	391111	Ekuitas	0	1,194,328,821,431
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	24,771,295,716
0.0	391119	Koreksi Lainnya	69,708,328	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,750,000,000
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	955,000,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	33,675,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,875,128
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	185,515,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	375,011,010
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	28,027,182

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:49 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	36,771,616
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	681,106,689
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	108,891
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,302,484,354,388	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,370,310	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,850,112,693	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	29,495,962,414	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	4,162,355,400	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	97,703,390,891	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	12,600,131,819	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	64,654,785,237	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	195,349,159,316	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,581,493,458	0
3.0	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	1,276,148,871,718	0
3.0	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	257,850,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	242,174,072,568	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	394,364,087,346	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,058,141	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,445,368,367	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	8,907,077,396	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	31,343,683,084	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	26,192,333,783	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	80,325,620,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,508,080,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	89,430,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	3,062,313,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	143,253,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	294,405,114,166	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	227,507,921,087	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,306,843,119	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,276,242	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,106,625,600	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	53,990,349	0
3.0	521211	Beban Bahan	635,886,967	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	17,170,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	180,944,848	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	28,500,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,005,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	235,395,830	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,579,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,414,018,742	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	106,872,959	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	205,549,192	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	547,012,130	0
3.0	522141	Beban Sewa	172,872,998	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	180,347,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	226,541,040	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,574,808,311	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,238,892,641	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,029,652,476	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,105,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,306,271,759	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1,400,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,534,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44,470,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	250,907,462	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,990,722,534	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11,852,175,191	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	8,170,403	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,197,115	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	41,900,463	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	155,330,689	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	673,948,186	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	15,298,089	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	995,360,585	0
JUMLAH			**5,845,234,314,553**	**5,845,234,314,553**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,464,602,067,793
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,242,251,301	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	33,675,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,875,128
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	185,515,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	239,706,917
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	36,569,900
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	36,771,616
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	681,106,689
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	1,914,916
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1,922,160
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,302,740,442,530	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,449,847	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99,051,274,055	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,515,578,495	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,163,435,400	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	97,775,126,700	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,613,883,877	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	64,688,504,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	195,339,499,672	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,594,705,800	0
3.0	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	1,281,256,053,542	0
3.0	511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	260,550,000	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	235,446,369,927	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	394,451,775,715	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,071,747	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,473,966,340	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,911,411,602	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	31,349,061,323	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26,203,052,660	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	80,477,932,350	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,508,080,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	89,430,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	3,062,313,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	143,253,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	294,291,674,312	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	227,520,068,083	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,314,805,119	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:49 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,276,242	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,107,101,600	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53,990,349	0
3.0	521211	Belanja Bahan	635,886,967	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,170,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	180,944,848	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	28,500,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,005,000,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	235,395,830	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24,579,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	556,649,948	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,465,699,587	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	106,916,593	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	209,888,292	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	547,012,130	0
3.0	522141	Belanja Sewa	172,872,998	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	180,347,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	226,541,040	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,570,534,311	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,243,166,641	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,029,652,476	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,105,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,306,271,759	0
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,400,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,534,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44,470,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	250,907,462	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,046,518,219	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	292,417,000	0
3.1	425912	Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun	1,806,025	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	251,461,142
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	78,699
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	200,933,282
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	19,508,121
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,080,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	71,735,809
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	13,608,460
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	33,719,743

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (025010500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 8:49 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	14,811,356
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	13,177,342
3.1	511152	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	1,073,733,644
3.1	511511	Pengembalian Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	2,700,000
3.1	511521	Pengembalian Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	346,981,859
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	87,688,369
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	13,606
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	26,675,813
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	4,334,206
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	5,378,239
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	10,718,877
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	15,442,050
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	78,636,944
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	65,755,162
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	7,956,500
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	476,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	1,846,852
JUMLAH			**4,468,194,577,194**	**4,468,194,577,194**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025010500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 8:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	674,544,417,000	1,311,511,481,000	1,302,740,442,530	251,461,142	1,302,488,981,388	99.31	9,022,499,612
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	109,813,000	16,299,000	15,449,847	78,699	15,371,148	94.31	927,852
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	87,371,262,000	99,195,957,000	99,051,274,055	200,933,282	98,850,340,773	99.65	345,616,227
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	28,912,070,000	29,845,790,000	29,515,578,495	19,508,121	29,496,070,374	98.83	349,719,626
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,544,329,000	4,210,574,000	4,163,435,400	1,080,000	4,162,355,400	98.85	48,218,600
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	86,668,908,000	98,057,108,000	97,775,126,700	71,735,809	97,703,390,891	99.64	353,717,109
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,149,135,000	12,764,625,000	12,613,883,877	13,608,460	12,600,275,417	98.71	164,349,583
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	60,203,166,000	65,839,767,000	64,688,504,980	33,719,743	64,654,785,237	98.2	1,184,981,763
511129	Belanja Uang Makan PNS	253,194,745,000	196,044,129,000	195,339,499,672	14,811,356	195,324,688,316	99.63	719,440,684
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,894,778,000	10,692,529,000	10,594,705,800	13,177,342	10,581,528,458	98.96	111,000,542
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	1,410,712,566,000	1,287,223,127,000	1,281,256,053,542	1,073,733,644	1,280,182,319,898	99.45	7,040,807,102
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,636,305,189,000	3,115,401,386,000	3,097,753,954,898	1,693,847,598	3,096,060,107,300	98.69	19,341,278,700
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	365,800,000	260,551,000	260,550,000	2,700,000	257,850,000	98.96	2,701,000
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	239,855,163,000	235,703,556,000	235,446,369,927	346,981,859	235,099,388,068	99.74	604,167,932
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	240,220,963,000	235,964,107,000	235,706,919,927	349,681,859	235,357,238,068	99.35	606,868,932
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	155,668,623,000	444,883,591,000	394,451,775,715	87,688,369	394,364,087,346	88.64	50,519,503,654
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	78,248,000	22,926,000	6,071,747	13,606	6,058,141	26.42	16,867,859
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,014,020,000	30,338,504,000	29,473,966,340	26,675,813	29,447,290,527	97.06	891,213,473
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	5,483,036,000	9,408,272,000	8,911,411,602	4,334,206	8,907,077,396	94.67	501,194,604
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,169,824,000	32,131,250,000	31,349,061,323	5,378,239	31,343,683,084	97.55	787,566,916
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,861,955,000	26,354,992,000	26,203,052,660	10,718,877	26,192,333,783	99.38	162,658,217
511628	Belanja Uang Makan PPPK	59,911,840,000	81,310,977,000	80,477,932,350	15,442,050	80,462,490,300	98.96	848,486,700
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,890,000	4,583,847,000	4,508,080,000	0	4,508,080,000	98.35	75,767,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	266,192,436,000	629,034,359,000	575,381,351,737	150,251,160	575,231,100,577	87.63	53,803,258,423
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	163,900,000	92,430,000	89,430,000	0	89,430,000	96.75	3,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	163,900,000	92,430,000	89,430,000	0	89,430,000	96.75	3,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025010500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 8:49 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	4,058,045,000	3,152,435,000	3,062,313,000	0	3,062,313,000	97.14	90,122,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	148,600,000	151,942,000	143,253,000	0	143,253,000	94.28	8,689,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	4,206,645,000	3,304,377,000	3,205,566,000	0	3,205,566,000	95.71	98,811,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	518,148,413,000	303,555,619,000	294,291,674,312	78,636,944	294,213,037,368	96.92	9,342,581,632
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	157,889,653,000	227,792,656,000	227,520,068,083	65,755,162	227,454,312,921	99.85	338,343,079
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	676,038,066,000	531,348,275,000	521,811,742,395	144,392,106	521,667,350,289	98.38	9,680,924,711
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,823,127,199,000	4,515,144,934,000	4,433,948,964,957	2,338,172,723	4,431,610,792,234	95.01	83534141766
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,825,344,000	9,430,327,000	9,314,805,119	7,956,500	9,306,848,619	98.69	123,478,381
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,120,000	1,615,000	1,276,242	0	1,276,242	79.02	338,758
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,430,105,000	3,159,645,000	3,107,101,600	476,000	3,106,625,600	98.32	53,019,400
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	114,025,000	54,000,000	53,990,349	0	53,990,349	99.98	9,651
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	15,374,594,000	12,645,587,000	12,477,173,310	8,432,500	12,468,740,810	94	176,846,190
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	717,048,000	672,966,000	635,886,967	0	635,886,967	94.49	37,079,033
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	32,600,000	17,170,000	17,170,000	0	17,170,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	199,858,000	181,000,000	180,944,848	0	180,944,848	99.97	55,152
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	2,020,000,000	1,005,000,000	1,005,000,000	0	1,005,000,000	100	0
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	1,493,000	1,000	0	0	0	0	1,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	267,154,000	237,263,000	235,395,830	0	235,395,830	99.21	1,867,170
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	68,150,000	24,600,000	24,579,000	0	24,579,000	99.91	21,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,306,303,000	2,166,500,000	2,127,476,645	0	2,127,476,645	86.7	39,023,355
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,112,180,000	567,988,000	556,649,948	0	556,649,948	98	11,338,052
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,112,180,000	567,988,000	556,649,948	0	556,649,948	98	11,338,052
5221	Belanja Jasa							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025010500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 8:49 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522111	Belanja Langganan Listrik	3,933,132,000	3,520,800,000	3,465,699,587	1,846,852	3,463,852,735	98.38	56,947,265
522112	Belanja Langganan Telepon	170,060,000	120,004,000	106,916,593	0	106,916,593	89.09	13,087,407
522113	Belanja Langganan Air	268,628,000	215,836,000	209,888,292	0	209,888,292	97.24	5,947,708
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	855,100,000	549,916,000	547,012,130	0	547,012,130	99.47	2,903,870
522141	Belanja Sewa	622,070,000	173,108,000	172,872,998	0	172,872,998	99.86	235,002
522151	Belanja Jasa Profesi	400,110,000	192,973,000	180,347,500	0	180,347,500	93.46	12,625,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	438,510,000	226,590,000	226,541,040	0	226,541,040	99.98	48,960
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,687,610,000	4,999,227,000	4,909,278,140	1,846,852	4,907,431,288	96.78	91,795,712
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,905,157,000	2,573,621,000	2,570,534,311	0	2,570,534,311	99.88	3,086,689
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	180,000	0	0	0	0	0	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,739,558,000	1,262,175,000	1,243,166,641	0	1,243,166,641	98.49	19,008,359
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,535,568,000	3,059,654,000	3,029,652,476	0	3,029,652,476	99.02	30,001,524
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	38,080,000	0	0	0	0	0	0
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,000,000	6,190,000	6,105,000	0	6,105,000	98.63	85,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	15,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	8,249,543,000	6,901,640,000	6,849,458,428	0	6,849,458,428	56.57	52,181,572
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,233,799,000	3,339,110,000	3,306,271,759	0	3,306,271,759	99.02	32,838,241
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2,809,000	1,405,000	1,400,000	0	1,400,000	99.64	5,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	486,150,000	141,733,000	139,534,000	0	139,534,000	98.45	2,199,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	132,449,000	45,670,000	44,470,000	0	44,470,000	97.37	1,200,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,046,471,000	256,155,000	250,907,462	0	250,907,462	97.95	5,247,538
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	9,901,678,000	3,784,073,000	3,742,583,221	0	3,742,583,221	98.49	41,489,779
5251	Belanja Barang BLU							
525115	Belanja Perjalanan	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	44,641,908,000	31,065,015,000	30,662,619,692	10,279,352	30,652,340,340	82.83	412674660
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 01**	**SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025010500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 8:49 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,815,329,000	2,052,262,000	2,046,518,219	0	2,046,518,219	99.72	5,743,781
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,815,329,000	2,052,262,000	2,046,518,219	0	2,046,518,219	99.72	5,743,781
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200,000,000	0	0	0	0	0	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	850,000,000	293,000,000	292,417,000	0	292,417,000	99.8	583,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,050,000,000	293,000,000	292,417,000	0	292,417,000	49.9	583,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	5,172,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	5,172,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,870,501,000	2,345,262,000	2,338,935,219	0	2,338,935,219	49.88	6326781
	JUMLAH BELANJA	3,871,639,608,000	4,548,555,211,000	4,466,950,519,868	2,348,452,075	4,464,602,067,793	98.21	83,953,143,207

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl. Cetak 06/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	20,369,365	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	101,847
0.0	117111	Barang Konsumsi	317,286,659	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,812,922	0
0.0	131111	Tanah	1,009,203,840,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	53,661,531,399	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	264,722,454,652	0
0.0	134112	Irigasi	314,297,000	0
0.0	134113	Jaringan	335,927,588	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	74,115,111	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	177,808,044	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	46,650,330,943
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	84,169,333,434
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	119,476,624
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	104,987,740
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	65,345,909
0.0	138311	Properti Investasi	1,589,813,998	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	314,253,479
0.0	162151	Software	109,020,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,207,322,592	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,762,113,565
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	109,020,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	4,777,573,298
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	61,475,833
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	281,765,227
0.0	391111	Ekuitas	0	1,194,328,821,431
JUMLAH			**1,333,744,599,330**	**1,333,744,599,330**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl.Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:51 AM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	191,157,627
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,345,627
131111	Tanah	1,036,235,798,000
132111	Peralatan dan Mesin	54,675,211,849
133111	Gedung dan Bangunan	264,704,585,054
134112	Irigasi	314,297,000
134113	Jaringan	335,927,588
135121	Aset Tetap Lainnya	177,808,044
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(48,656,982,005)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(94,484,747,900)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(127,647,027)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(113,184,855)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(65,345,909)
138311	Properti Investasi	1,589,813,998
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(356,153,942)
162151	Software	109,020,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,730,431,578
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,969,442,689)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(109,020,000)
J U M L A H		**1,215,185,872,038**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**Peralatan dan Mesin**	**10,627**	**1,338,920,236**	**525**	**236,834,776**	**157**	**26,516,100**	**10,995**	**1,549,238,912**
30103	ALAT BANTU	42	1,614,000	0	0	0	0	42	1,614,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	5,500,001	0	0	0	0	2	5,500,001
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	25,000	0	0	0	0	1	25,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	2,243,000	0	0	0	0	6	2,243,000
30501	ALAT KANTOR	1,283	112,340,690	34	22,778,900	12	1,780,000	1,305	133,339,590
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,735	1,076,477,742	448	181,152,876	139	23,908,600	8,044	1,233,722,018
30601	ALAT STUDIO	34	8,545,750	12	9,468,000	0	0	46	18,013,750
30602	ALAT KOMUNIKASI	128	20,286,500	9	8,197,000	4	537,500	133	27,946,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	70	17,559,400	0	0	0	0	70	17,559,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	470,000	0	0	0	0	3	470,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	180,000	1	349,000	0	0	3	529,000
31001	KOMPUTER UNIT	37	32,495,002	0	0	0	0	37	32,495,002
31002	PERALATAN KOMPUTER	100	30,040,701	20	13,891,000	2	290,000	118	43,641,701
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0	1	998,000	0	0	1	998,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1,150	22,727,450	0	0	0	0	1,150	22,727,450
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	34	8,415,000	0	0	0	0	34	8,415,000
133111	**Gedung dan Bangunan**	**25**	**134,814,350**	**1**	**24,579,000**	**0**	**0**	**26**	**159,393,350**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	25	134,814,350	1	24,579,000	0	0	26	159,393,350
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**41**	**315,002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**315,002**
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	35,000	0	0	0	0	2	35,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	39	280,002	0	0	0	0	39	280,002
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**899**	**54,573,458**	**78**	**12,831,000**	**536**	**37,825,255**	**441**	**29,579,203**
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	152	7,361,000	11	1,630,000	47	2,206,000	116	6,785,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	567	35,356,200	61	10,373,500	320	26,815,000	308	18,914,700
30601	ALAT STUDIO	1	250,000	0	0	1	250,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	11	2,687,544	4	537,500	8	1,450,544	7	1,774,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	50,000	0	0	0	0	1	50,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1	250,000	0	0	1	250,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	26	6,518,603	2	290,000	19	4,753,600	9	2,055,003

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	8	1,100,000	0	0	8	1,100,000	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	132	1,000,111	0	0	132	1,000,111	0	0
TOTAL			**1,528,623,046**		**274,244,776**		**64,341,355**		**1,738,526,467**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**246,267**	**1,009,203,840,000**	**19,197**	**27,179,000,000**	**3,570**	**147,042,000**	**261,894**	**1,036,235,798,000**
20101	TANAH PERSIL	231,267	820,443,840,000	19,197	27,179,000,000	3,570	147,042,000	246,894	847,475,798,000
20102	TANAH NON PERSIL	15,000	188,760,000,000	0	0	0	0	15,000	188,760,000,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**50,684**	**55,000,451,635**	**787**	**2,471,032,995**	**1,436**	**1,247,033,869**	**50,035**	**56,224,450,761**
30103	ALAT BANTU	58	8,977,000	0	0	0	0	58	8,977,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	493	20,232,053,382	3	212,880,000	31	606,191,810	465	19,838,741,572
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	3,835,000	0	0	0	0	2	3,835,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	15,571,312	0	0	0	0	3	15,571,312
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	8	429,000	0	0	1	17,000	7	412,000
30303	ALAT UKUR	24	160,507,629	1	5,853,000	0	0	25	166,360,629
30401	ALAT PENGOLAHAN	54	146,431,999	0	0	0	0	54	146,431,999
30501	ALAT KANTOR	10,139	4,340,438,500	48	102,817,860	190	89,607,081	9,997	4,353,649,279
30502	ALAT RUMAH TANGGA	34,336	9,471,741,333	552	706,253,926	1,086	159,012,677	33,802	10,018,982,582
30601	ALAT STUDIO	255	1,655,268,339	38	393,904,495	3	15,099,000	290	2,034,073,834
30602	ALAT KOMUNIKASI	555	603,331,317	12	17,404,000	21	4,769,501	546	615,965,816
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	204,745,980	4	16,500,000	0	0	16	221,245,980
30701	ALAT KEDOKTERAN	212	144,900,000	0	0	1	1,700,000	211	143,200,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	75	183,487,450	6	26,400,000	1	7,700,000	80	202,187,450
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	388,702,625	0	0	0	0	1	388,702,625
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	33	106,800,470	0	0	0	0	33	106,800,470
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	21	128,738,055	0	0	0	0	21	128,738,055
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	3,400,000	0	0	0	0	1	3,400,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	3	3,930,000	0	0	0	0	3	3,930,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	58,198,200	0	0	0	0	2	58,198,200
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	47	246,159,777	1	349,000	0	0	48	246,508,777
31001	KOMPUTER UNIT	1,658	12,870,299,465	60	734,121,474	42	283,555,945	1,676	13,320,864,994
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,386	3,386,768,926	61	253,551,240	60	79,380,855	1,387	3,560,939,311
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	0	0	1	998,000	0	0	1	998,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	28,761,428	0	0	0	0	4	28,761,428
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	4	1,960,000	0	0	0	0	4	1,960,000
31503	ALAT SAR	4	36,150,000	0	0	0	0	4	36,150,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1,219	405,401,237	0	0	0	0	1,219	405,401,237
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	53	21,332,000	0	0	0	0	53	21,332,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	65,000	0	0	0	0	4	65,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	30,243,000	0	0	0	0	2	30,243,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	16	111,823,211	0	0	0	0	16	111,823,211
133111	**Gedung dan Bangunan**	**433**	**264,857,269,002**	**13**	**4,664,503,277**	**15**	**4,657,793,875**	**431**	**264,863,978,404**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	351	244,826,744,531	11	4,444,188,277	11	4,223,196,875	351	245,047,735,933
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	74	18,552,130,268	2	220,315,000	4	434,597,000	72	18,337,848,268
40401	TUGU/TANDA BATAS	8	1,478,394,203	0	0	0	0	8	1,478,394,203
134112	**Irigasi**	**6**	**314,297,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**314,297,000**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1	138,117,000	0	0	0	0	1	138,117,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	61,039,000	0	0	0	0	1	61,039,000
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	1	3,686,000	0	0	0	0	1	3,686,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3	111,455,000	0	0	0	0	3	111,455,000
134113	**Jaringan**	**8**	**335,927,588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**335,927,588**
50310	INSTALASI LAIN	1	19,000,000	0	0	0	0	1	19,000,000
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	31,330,500	0	0	0	0	1	31,330,500
50402	JARINGAN LISTRIK	6	285,597,088	0	0	0	0	6	285,597,088
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**1**	**74,115,111**	**0**	**0**	**1**	**74,115,111**	**0**	**0**
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	74,115,111	0	0	1	74,115,111	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,816**	**178,123,046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,816**	**178,123,046**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,523	101,690,626	0	0	0	0	1,523	101,690,626
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	73	902,501	0	0	0	0	73	902,501
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	68,665,909	0	0	0	0	10	68,665,909
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	24	1,035,006	0	0	0	0	24	1,035,006
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	186	5,829,004	0	0	0	0	186	5,829,004
138311	**Properti Investasi**	**4**	**1,589,813,998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1,589,813,998**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	1,589,813,998	0	0	0	0	4	1,589,813,998
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**3,832**	**3,261,896,050**	**1,130**	**3,909,542,644**	**2,178**	**3,411,427,913**	**2,784**	**3,760,010,781**
20101	TANAH PERSIL	0	0	158	147,042,000	158	147,042,000	0	0
30103	ALAT BANTU	2	355,500	0	0	1	355,000	1	500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	18	142,693,000	27	334,121,810	5	84,094,810	40	392,720,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	1	17,000	0	0	1	17,000
30303	ALAT UKUR	4	1,331,000	0	0	1	500,000	3	831,000
30501	ALAT KANTOR	740	211,312,476	101	49,743,081	352	161,029,945	489	100,025,612
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,436	342,492,020	714	58,213,577	1,255	150,841,757	1,895	249,863,840
30601	ALAT STUDIO	10	4,450,000	3	15,099,000	10	19,222,000	3	327,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	42	10,871,045	21	4,769,501	36	9,186,544	27	6,454,002
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	2,500,000	1	1,700,000	3	4,200,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	12	970,000	1	7,700,000	1	7,700,000	12	970,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	750,000	0	0	1	750,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31001	KOMPUTER UNIT	183	829,357,062	39	238,855,945	85	325,272,048	137	742,940,959
31002	PERALATAN KOMPUTER	196	197,977,622	57	65,380,855	90	116,423,095	163	146,935,382
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	1,971,000	0	0	10	1,971,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	162,811	0	0	1	14,000	1	148,811
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5	1,507,950,386	6	2,945,006,875	6	2,337,746,586	5	2,115,210,675
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	1	41,893,000	1	41,893,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	7	1,960,000	0	0	7	1,960,000	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	2	15,001	0	0	1	1	1	15,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	3	2,501,000	0	0	0	0	3	2,501,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	18	800,016	0	0	16	16	2	800,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	138	1,226,111	0	0	138	1,226,111	0	0
TOTAL			**1,334,815,733,430**		**38,224,078,916**		**9,537,412,768**		**1,363,502,399,578**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**246,267**	**1,009,203,840,000**	**19,197**	**27,179,000,000**	**3,570**	**147,042,000**	**261,894**	**1,036,235,798,000**
20101	TANAH PERSIL	231,267	820,443,840,000	19,197	27,179,000,000	3,570	147,042,000	246,894	847,475,798,000
20102	TANAH NON PERSIL	15,000	188,760,000,000	0	0	0	0	15,000	188,760,000,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**40,057**	**53,661,531,399**	**262**	**2,234,198,219**	**1,279**	**1,220,517,769**	**39,040**	**54,675,211,849**
30103	ALAT BANTU	16	7,363,000	0	0	0	0	16	7,363,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	491	20,226,553,381	3	212,880,000	31	606,191,810	463	19,833,241,571
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	3,835,000	0	0	0	0	2	3,835,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	15,571,312	0	0	0	0	3	15,571,312
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	7	404,000	0	0	1	17,000	6	387,000
30303	ALAT UKUR	24	160,507,629	1	5,853,000	0	0	25	166,360,629
30401	ALAT PENGOLAHAN	48	144,188,999	0	0	0	0	48	144,188,999
30501	ALAT KANTOR	8,856	4,228,097,810	14	80,038,960	178	87,827,081	8,692	4,220,309,689
30502	ALAT RUMAH TANGGA	26,601	8,395,263,591	104	525,101,050	947	135,104,077	25,758	8,785,260,564
30601	ALAT STUDIO	221	1,646,722,589	26	384,436,495	3	15,099,000	244	2,016,060,084
30602	ALAT KOMUNIKASI	427	583,044,817	3	9,207,000	17	4,232,001	413	588,019,816
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	204,745,980	4	16,500,000	0	0	16	221,245,980
30701	ALAT KEDOKTERAN	142	127,340,600	0	0	1	1,700,000	141	125,640,600
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	72	183,017,450	6	26,400,000	1	7,700,000	77	201,717,450
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	388,702,625	0	0	0	0	1	388,702,625
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	33	106,800,470	0	0	0	0	33	106,800,470
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	21	128,738,055	0	0	0	0	21	128,738,055
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	3,400,000	0	0	0	0	1	3,400,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	3	3,930,000	0	0	0	0	3	3,930,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	58,198,200	0	0	0	0	2	58,198,200
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	45	245,979,777	0	0	0	0	45	245,979,777
31001	KOMPUTER UNIT	1,621	12,837,804,463	60	734,121,474	42	283,555,945	1,639	13,288,369,992
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,286	3,356,728,225	41	239,660,240	58	79,090,855	1,269	3,517,297,610
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	28,761,428	0	0	0	0	4	28,761,428
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	4	1,960,000	0	0	0	0	4	1,960,000
31503	ALAT SAR	4	36,150,000	0	0	0	0	4	36,150,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	69	382,673,787	0	0	0	0	69	382,673,787
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	19	12,917,000	0	0	0	0	19	12,917,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	65,000	0	0	0	0	4	65,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	30,243,000	0	0	0	0	2	30,243,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	16	111,823,211	0	0	0	0	16	111,823,211
133111	**Gedung dan Bangunan**	**408**	**264,722,454,652**	**12**	**4,639,924,277**	**15**	**4,657,793,875**	**405**	**264,704,585,054**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	326	244,691,930,181	10	4,419,609,277	11	4,223,196,875	325	244,888,342,583

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	74	18,552,130,268	2	220,315,000	4	434,597,000	72	18,337,848,268
40401	TUGU/TANDA BATAS	8	1,478,394,203	0	0	0	0	8	1,478,394,203
134112	**Irigasi**	**6**	**314,297,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**314,297,000**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1	138,117,000	0	0	0	0	1	138,117,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	61,039,000	0	0	0	0	1	61,039,000
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	1	3,686,000	0	0	0	0	1	3,686,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3	111,455,000	0	0	0	0	3	111,455,000
134113	**Jaringan**	**8**	**335,927,588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**335,927,588**
50310	INSTALASI LAIN	1	19,000,000	0	0	0	0	1	19,000,000
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	31,330,500	0	0	0	0	1	31,330,500
50402	JARINGAN LISTRIK	6	285,597,088	0	0	0	0	6	285,597,088
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**1**	**74,115,111**	**0**	**0**	**1**	**74,115,111**	**0**	**0**
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	74,115,111	0	0	1	74,115,111	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,775**	**177,808,044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,775**	**177,808,044**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,523	101,690,626	0	0	0	0	1,523	101,690,626
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	73	902,501	0	0	0	0	73	902,501
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	68,665,909	0	0	0	0	10	68,665,909
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	22	1,000,006	0	0	0	0	22	1,000,006
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	147	5,549,002	0	0	0	0	147	5,549,002
138311	**Properti Investasi**	**4**	**1,589,813,998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1,589,813,998**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	1,589,813,998	0	0	0	0	4	1,589,813,998
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**2,933**	**3,207,322,592**	**1,052**	**3,896,711,644**	**1,642**	**3,373,602,658**	**2,343**	**3,730,431,578**
20101	TANAH PERSIL	0	0	158	147,042,000	158	147,042,000	0	0
30103	ALAT BANTU	2	355,500	0	0	1	355,000	1	500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	18	142,693,000	27	334,121,810	5	84,094,810	40	392,720,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	1	17,000	0	0	1	17,000
30303	ALAT UKUR	4	1,331,000	0	0	1	500,000	3	831,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	588	203,951,476	90	48,113,081	305	158,823,945	373	93,240,612
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,869	307,135,820	653	47,840,077	935	124,026,757	1,587	230,949,140
30601	ALAT STUDIO	9	4,200,000	3	15,099,000	9	18,972,000	3	327,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	31	8,183,501	17	4,232,001	28	7,736,000	20	4,679,502
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	2,500,000	1	1,700,000	3	4,200,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	11	920,000	1	7,700,000	1	7,700,000	11	920,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	750,000	0	0	1	750,000	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
31001	KOMPUTER UNIT	182	829,107,062	39	238,855,945	84	325,022,048	137	742,940,959
31002	PERALATAN KOMPUTER	170	191,459,019	55	65,090,855	71	111,669,495	154	144,880,379
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	871,000	0	0	2	871,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	162,811	0	0	1	14,000	1	148,811
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5	1,507,950,386	6	2,945,006,875	6	2,337,746,586	5	2,115,210,675
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	1	41,893,000	1	41,893,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	7	1,960,000	0	0	7	1,960,000	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	2	15,001	0	0	1	1	1	15,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	3	2,501,000	0	0	0	0	3	2,501,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	18	800,016	0	0	16	16	2	800,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	6	226,000	0	0	6	226,000	0	0
TOTAL			**1,333,287,110,384**		**37,949,834,140**		**9,473,071,413**		**1,361,763,873,111**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 06/05/26 8:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	14,679,999
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1,725,250
1010301003	Penjepit Kertas	5,390,018
1010301004	Penghapus/Korektor	559,315
1010301005	Buku Tulis	3,126,512
1010301006	Ordner Dan Map	18,285,230
1010301007	Penggaris	512,115
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,618,661
1010301010	Alat Perekat	6,005,651
1010301011	Stadler HD	329,440
1010301012	Staples	1,642,706
1010301013	Isi Staples	1,141,966
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	14,669,965
1010302001	Kertas HVS	32,710,846
1010302002	Berbagai Kertas	2,296,715
1010302003	Kertas Cover	523,967
1010302004	Amplop	6,283,159
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,455,905
1010303002	Tinta Cetak	1,714,990
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	365,300
1010304002	Computer File/Tempat Disket	225,000
1010304003	Pita Printer	215,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	28,659,960
1010304005	Disket	81,000
1010304006	USB/Flash Disk	2,237,760
1010304007	kartu Memori	18,500
1010304010	Mouse	1,493,375
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	3,597,870
1010306002	Lampu Listrik	6,340,320
1010306004	Saklar	366,300
1010306007	Starter	156,640
1010306010	Batu Baterai	4,611,345
1010306999	Alat Listrik Lainnya	10,545
1010309001	Meterai	499,610
1010309003	Stempel	27,374
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,616,382
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,127,730
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,233,324
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20,601,882
Jumlah Barang Konsumsi		**191,157,627**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305001	Sapu Dan Sikat	40,000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	147,600
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	1,126,650

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Kode	Uraian	Jumlah
1010305006	Alat Pengikat	33,300
1010305012	Pengharum Ruangan	626,500
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	2,371,577
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**4,345,627**
TOTAL		**195,503,254**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 06/05/26 8:53 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_mutasi_uappaw_poc

Kode	Uraian	SALDO AWAL	MUTASI		NILAI
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
117111	Barang Konsumsi	317,286,659	552,751,654	678,880,686	191,157,627
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10,812,922	15,712,004	22,179,299	4,345,627
117114	Suku Cadang	0	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		**328,099,581**	**568,463,658**	**701,059,985**	**195,503,254**

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 06/05/26 8:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_uappa

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	191,157,627
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,345,627
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
JUMLAH		**195,503,254**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:51 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**10,995**	**1,549,238,912**	**(1,100,632,233)**	**(63,595,268)**	**(1,164,227,501)**	**385,011,411**
30103	ALAT BANTU	42	1,614,000	(535,746)	(179,709)	(715,455)	898,545
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	5,500,001	(5,500,001)	0	(5,500,001)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	25,000	(25,000)	0	(25,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	2,243,000	(748,250)	(498,250)	(1,246,500)	996,500
30501	ALAT KANTOR	1,305	133,339,590	(106,786,850)	(2,007,530)	(108,794,380)	24,545,210
30502	ALAT RUMAH TANGGA	8,044	1,233,722,018	(873,267,958)	(48,676,728)	(921,944,686)	311,777,332
30601	ALAT STUDIO	46	18,013,750	(3,264,750)	(2,449,300)	(5,714,050)	12,299,700
30602	ALAT KOMUNIKASI	133	27,946,000	(20,286,500)	(282,200)	(20,568,700)	7,377,300
30701	ALAT KEDOKTERAN	70	17,559,400	(4,903,400)	(3,164,000)	(8,067,400)	9,492,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	470,000	(470,000)	0	(470,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	3	529,000	(180,000)	(87,250)	(267,250)	261,750
31001	KOMPUTER UNIT	37	32,495,002	(32,495,002)	0	(32,495,002)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	118	43,641,701	(21,026,326)	(6,150,501)	(27,176,827)	16,464,874
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	998,000	0	(99,800)	(99,800)	898,200
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1,150	22,727,450	(22,727,450)	0	(22,727,450)	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	34	8,415,000	(8,415,000)	0	(8,415,000)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**26**	**159,393,350**	**(14,630,169)**	**(2,942,078)**	**(17,572,247)**	**141,821,103**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26	159,393,350	(14,630,169)	(2,942,078)	(17,572,247)	141,821,103
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**41**	**315,002**	**0**	**0**	**0**	**315,002**
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	35,000	0	0	0	35,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	39	280,002	0	0	0	280,002
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**441**	**29,579,203**	**(53,573,347)**	**23,994,144**	**(29,579,203)**	**0**
30501	ALAT KANTOR	116	6,785,000	(7,361,000)	576,000	(6,785,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	308	18,914,700	(35,356,200)	16,441,500	(18,914,700)	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	(250,000)	250,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	7	1,774,500	(2,687,544)	913,044	(1,774,500)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	50,000	(50,000)	0	(50,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	(250,000)	250,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	9	2,055,003	(6,518,603)	4,463,600	(2,055,003)	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	(1,100,000)	1,100,000	0	0
JUMLAH		**11,503**	**1,738,526,467**	**(1,168,835,749)**	**(42,543,202)**	**(1,211,378,951)**	**527,147,516**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tanggal : 06/05/26 8:51 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	**Tanah**	**261,894**	**1,036,235,798,000**	**0**	**0**	**0**	**1,036,235,798,000**
20101	TANAH PERSIL	246,894	847,475,798,000	0	0	0	847,475,798,000
20102	TANAH NON PERSIL	15,000	188,760,000,000	0	0	0	188,760,000,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**39,040**	**54,675,211,849**	**(46,650,330,943)**	**(2,006,651,062)**	**(48,656,982,005)**	**6,018,229,844**
30103	ALAT BANTU	16	7,363,000	(7,363,000)	0	(7,363,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	463	19,833,241,571	(17,620,043,601)	(201,572,826)	(17,821,616,427)	2,213,197,970
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	3,835,000	(3,835,000)	0	(3,835,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	15,571,312	(15,571,312)	0	(15,571,312)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6	387,000	(404,000)	17,000	(387,000)	(17,000)
30303	ALAT UKUR	25	166,360,629	(144,297,329)	(12,522,900)	(156,820,229)	22,063,300
30401	ALAT PENGOLAHAN	48	144,188,999	(144,188,999)	0	(144,188,999)	0
30501	ALAT KANTOR	8,692	4,220,309,689	(3,814,082,378)	(115,936,869)	(3,930,019,247)	406,227,311
30502	ALAT RUMAH TANGGA	25,758	8,785,260,564	(7,158,789,382)	(389,219,972)	(7,548,009,354)	1,626,471,182
30601	ALAT STUDIO	244	2,016,060,084	(1,191,718,126)	(234,948,346)	(1,426,666,472)	824,341,958
30602	ALAT KOMUNIKASI	413	588,019,816	(552,028,975)	(12,701,280)	(564,730,255)	35,990,841
30603	PERALATAN PEMANCAR	16	221,245,980	(98,814,030)	(15,990,100)	(114,804,130)	122,431,950
30701	ALAT KEDOKTERAN	141	125,640,600	(107,316,200)	(7,279,400)	(114,595,600)	18,324,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	77	201,717,450	(145,955,444)	(6,931,511)	(152,886,955)	55,762,006
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	388,702,625	(323,918,853)	(25,913,509)	(349,832,362)	64,783,772
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	33	106,800,470	(47,979,416)	(6,692,134)	(54,671,550)	58,821,054
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	21	128,738,055	(93,263,511)	(14,189,820)	(107,453,331)	35,474,544
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	3,400,000	(2,153,332)	(226,667)	(2,379,999)	1,246,668
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	3	3,930,000	(3,930,000)	0	(3,930,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	58,198,200	(58,198,200)	0	(58,198,200)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	45	245,979,777	(218,947,202)	(23,775,800)	(242,723,002)	27,032,575
31001	KOMPUTER UNIT	1,639	13,288,369,992	(11,384,583,073)	(703,273,013)	(12,087,856,086)	1,903,786,919
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,269	3,517,297,610	(2,995,399,288)	(216,891,463)	(3,212,290,751)	521,898,322
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	28,761,428	(28,761,428)	0	(28,761,428)	0
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	4	1,960,000	(1,960,000)	0	(1,960,000)	0
31503	ALAT SAR	4	36,150,000	(36,150,000)	0	(36,150,000)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	69	382,673,787	(295,630,653)	(18,602,452)	(314,233,105)	87,043,134
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	19	12,917,000	(12,917,000)	0	(12,917,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4	65,000	(65,000)	0	(65,000)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	30,243,000	(30,243,000)	0	(30,243,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	16	111,823,211	(111,823,211)	0	(111,823,211)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**405**	**264,704,585,054**	**(84,169,333,434)**	**(10,315,414,466)**	**(94,484,747,900)**	**170,219,837,154**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	325	244,888,342,583	(78,570,768,431)	(9,621,916,754)	(88,192,685,185)	166,317,574,152

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	72	18,337,848,268	(5,252,255,214)	(643,410,058)	(5,895,665,272)	13,085,593,054
40401	TUGU/TANDA BATAS	8	1,478,394,203	(346,309,789)	(50,087,654)	(396,397,443)	1,132,084,414
134112	**Irigasi**	**6**	**314,297,000**	**(119,476,624)**	**(8,170,403)**	**(127,647,027)**	**186,649,973**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1	138,117,000	(21,973,154)	(3,139,022)	(25,112,176)	116,143,846
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	61,039,000	(61,039,000)	0	(61,039,000)	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	3,686,000	(2,866,890)	(409,555)	(3,276,445)	819,110
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	3	111,455,000	(33,597,580)	(4,621,826)	(38,219,406)	77,857,420
134113	**Jaringan**	**8**	**335,927,588**	**(104,987,740)**	**(8,197,115)**	**(113,184,855)**	**222,742,733**
50310	INSTALASI LAIN	1	19,000,000	(19,000,000)	0	(19,000,000)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	31,330,500	(17,231,391)	(1,044,378)	(18,275,769)	14,099,109
50402	JARINGAN LISTRIK	6	285,597,088	(68,756,349)	(7,152,737)	(75,909,086)	216,840,739
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,775**	**177,808,044**	**(65,345,909)**	**0**	**(65,345,909)**	**112,462,135**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,523	101,690,626	0	0	0	101,690,626
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	73	902,501	0	0	0	902,501
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	10	68,665,909	(65,345,909)	0	(65,345,909)	3,320,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	22	1,000,006	0	0	0	1,000,006
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	147	5,549,002	0	0	0	5,549,002
138311	**Properti Investasi**	**4**	**1,589,813,998**	**(314,253,479)**	**(41,900,463)**	**(356,153,942)**	**1,233,660,056**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	1,589,813,998	(314,253,479)	(41,900,463)	(356,153,942)	1,275,560,519
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**2,343**	**3,730,431,578**	**(2,762,113,565)**	**(207,329,124)**	**(2,969,442,689)**	**760,988,889**
30103	ALAT BANTU	1	500	(355,500)	355,000	(500)	(355,000)
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	40	392,720,000	(142,693,000)	(250,027,000)	(392,720,000)	250,027,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	17,000	0	(17,000)	(17,000)	17,000
30303	ALAT UKUR	3	831,000	(1,331,000)	500,000	(831,000)	(500,000)
30501	ALAT KANTOR	373	93,240,612	(203,951,476)	110,710,864	(93,240,612)	(110,710,864)
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,587	230,949,140	(307,135,820)	76,186,680	(230,949,140)	(76,186,680)
30601	ALAT STUDIO	3	327,000	(4,200,000)	3,873,000	(327,000)	(3,873,000)
30602	ALAT KOMUNIKASI	20	4,679,502	(8,183,501)	3,503,999	(4,679,502)	(3,503,999)
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	(2,500,000)	2,500,000	0	(2,500,000)
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	11	920,000	(920,000)	0	(920,000)	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	(750,000)	750,000	0	(750,000)
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	250,000	(250,000)	0	(250,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	137	742,940,959	(829,107,062)	86,166,103	(742,940,959)	(86,166,103)
31002	PERALATAN KOMPUTER	154	144,880,379	(191,459,019)	46,578,640	(144,880,379)	(46,578,640)
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	(871,000)	871,000	0	(871,000)
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	148,811	(162,811)	14,000	(148,811)	(14,000)
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5	2,115,210,675	(1,066,743,376)	(289,294,410)	(1,356,037,786)	1,048,467,299

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025010500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	15,000	0	0	0	15,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	3	2,501,000	(1,500,000)	0	(1,500,000)	1,001,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	800,000	0	0	0	800,000
JUMLAH		**305,475**	**1,361,763,873,111**	**(134,185,841,694)**	**(12,587,662,633)**	**(146,773,504,327)**	**1,227,578,031,417**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

REKONSILIASI SAKTI - SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Status Rekonsiliasi	Tanggal SHR	Jumlah Data TDK			Proses SHR / Download SHR
							TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail	
1	02501	297130	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 14:00:30	0	0		Download
2	02501	297172	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 21:00:22	0	0		Download
3	02501	297222	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 15:00:23	0	0		Download
4	02501	297261	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 16:00:26	0	0		Download
5	02501	297304	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download
6	02501	297350	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 20:00:21	0	0		Download
7	02501	297367	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
8	02501	297371	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 11:56:07	0	0		Download
9	02501	297388	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 10:00:22	0	0		Download
10	02501	297503	KANTOR	2025-12	Rekon selesai Hasil	2026-01-22 09:00:30	0	0		

			KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		Rekonsiliasi Terbentuk					Download
11	02501	297566	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-17 20:00:25	0	0		Download
12	02501	297591	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 12:00:24	0	0		Download
13	02501	297620	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-19 13:00:25	0	0		Download
14	02501	297634	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 16:00:24	0	0		Download
15	02501	297719	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
16	02501	297751	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 11:00:28	0	0		Download
17	02501	297808	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download
18	02501	297901	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
19	02501	298004	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
20	02501	298114	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download

21	02501	298121	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
22	02501	298156	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
23	02501	298181	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 12:00:31	0	0		Download
24	02501	298210	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
25	02501	298266	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 15:00:29	0	0		Download
26	02501	298291	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-02-03 17:00:24	0	0		Download
27	02501	308209	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 10:00:22	0	0		Download
28	02501	417800	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 13:00:36	0	0		Download
29	02501	417816	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 15:00:29	0	0		Download
30	02501	417822	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 14:00:36	0	0		Download
31	02501	417831	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 13:00:36	0	0		Download

			MOJOKERTO							
32	02501	417853	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 11:00:33	0	0		Download
33	02501	417862	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 08:00:24	0	0		Download
34	02501	417884	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 16:00:35	0	0		Download
35	02501	417890	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 11:56:07	0	0		Download
36	02501	417904	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 11:00:31	0	0		Download
37	02501	417981	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 13:00:35	0	0		Download
38	02501	418001	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 17:00:37	0	0		Download
39	02501	650079	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 08:00:24	0	0		Download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297130 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	96,970,285,000	96,970,285,000	0
2	Belanja	88,749,157,466	88,749,157,466	0
3	Pengembalian Belanja	-39,849,881	-39,849,881	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BANYUWANGI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297172 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	171,526,769,000	171,526,769,000	0
2	Belanja	166,121,915,312	166,121,915,312	0
3	Pengembalian Belanja	-65,110,409	-65,110,409	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	54,486,332	54,486,332	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297222 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	173,841,615,000	173,841,615,000	0
2	Belanja	173,093,143,190	173,093,143,190	0
3	Pengembalian Belanja	-54,522,647	-54,522,647	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	19,543,496	19,543,496	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297261 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	143,458,602,000	143,458,602,000	0
2	Belanja	129,665,429,367	129,665,429,367	0
3	Pengembalian Belanja	-31,864,497	-31,864,497	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,983,350	5,983,350	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297304 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	124,421,609,000	124,421,609,000	0
2	Belanja	118,840,762,884	118,840,762,884	0
3	Pengembalian Belanja	-77,931,674	-77,931,674	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	19,560,500	19,560,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297350 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	87,479,443,000	87,479,443,000	0
2	Belanja	84,483,483,798	84,483,483,798	0
3	Pengembalian Belanja	-1,653,807	-1,653,807	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	28,260,025	28,260,025	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-1,806,025	-1,806,025	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297367 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	34,880,551,000	34,880,551,000	0
2	Belanja	33,672,412,492	33,672,412,492	0
3	Pengembalian Belanja	-2,685,511	-2,685,511	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,126,442	2,126,442	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297371 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	37,187,187,000	37,187,187,000	0
2	Belanja	36,791,848,844	36,791,848,844	0
3	Pengembalian Belanja	-642	-642	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	15,000	15,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297388 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	199,385,435,000	199,385,435,000	0
2	Belanja	191,592,538,647	191,592,538,647	0
3	Pengembalian Belanja	-42,853,183	-42,853,183	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,838,566	4,838,566	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297503 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	184,806,412,000	184,806,412,000	0
2	Belanja	176,464,863,770	176,464,863,770	0
3	Pengembalian Belanja	-46,515,679	-46,515,679	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	84,060,298	84,060,298	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297566 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	80,371,554,000	80,371,554,000	0
2	Belanja	78,768,243,843	78,768,243,843	0
3	Pengembalian Belanja	-3,360,149	-3,360,149	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,705,000	2,705,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297591 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	83,414,574,000	83,414,574,000	0
2	Belanja	80,045,116,101	80,045,116,101	0
3	Pengembalian Belanja	-41,400,288	-41,400,288	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	23,890,552	23,890,552	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297620 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	40,653,376,000	40,653,376,000	0
2	Belanja	37,498,834,490	37,498,834,490	0
3	Pengembalian Belanja	-8,451,489	-8,451,489	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	6,926,910	6,926,910	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297634 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	166,818,168,000	166,818,168,000	0
2	Belanja	164,791,703,565	164,791,703,565	0
3	Pengembalian Belanja	-740,598	-740,598	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	23,713,227	23,713,227	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297719 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	107,452,604,000	107,452,604,000	0
2	Belanja	103,223,065,922	103,223,065,922	0
3	Pengembalian Belanja	-3,104,690	-3,104,690	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16,770,066	16,770,066	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297751 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	164,241,498,000	164,241,498,000	0
2	Belanja	163,482,129,040	163,482,129,040	0
3	Pengembalian Belanja	-37,368,015	-37,368,015	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	221,482,396	221,482,396	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297808 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	128,855,694,000	128,855,694,000	0
2	Belanja	118,193,223,466	118,193,223,466	0
3	Pengembalian Belanja	-317,303,016	-317,303,016	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	39,000,000	39,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 297901 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	203,915,973,000	203,915,973,000	0
2	Belanja	191,671,233,706	191,671,233,706	0
3	Pengembalian Belanja	-244,828,924	-244,828,924	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	14,842,000	14,842,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	2,705,000,000	2,705,000,000	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298004 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	152,799,907,000	152,799,907,000	0
2	Belanja	152,175,822,203	152,175,822,203	0
3	Pengembalian Belanja	-12,707,289	-12,707,289	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	25,143,247	25,143,247	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298114 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	62,840,642,000	62,840,642,000	0
2	Belanja	62,835,091,674	62,835,091,674	0
3	Pengembalian Belanja	-8,774,022	-8,774,022	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	638,036	638,036	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PACITAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298121 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	83,131,462,000	83,131,462,000	0
2	Belanja	83,129,688,650	83,129,688,650	0
3	Pengembalian Belanja	-10,999,870	-10,999,870	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	479,832	479,832	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298156 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	130,278,122,000	130,278,122,000	0
2	Belanja	130,266,637,568	130,266,637,568	0
3	Pengembalian Belanja	-1,505,590	-1,505,590	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,934,118	18,934,118	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298181 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	84,317,802,000	84,317,802,000	0
2	Belanja	84,301,092,618	84,301,092,618	0
3	Pengembalian Belanja	-12,244,602	-12,244,602	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	44	44	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298210 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	133,196,930,000	133,196,930,000	0
2	Belanja	133,180,270,348	133,180,270,348	0
3	Pengembalian Belanja	-4,681,090	-4,681,090	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	77,621,031	77,621,031	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298266 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	95,928,181,000	95,928,181,000	0
2	Belanja	95,410,017,860	95,410,017,860	0
3	Pengembalian Belanja	-12,828,538	-12,828,538	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	17,333,069	17,333,069	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 298291 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	135,107,977,000	135,107,977,000	0
2	Belanja	135,036,825,904	135,036,825,904	0
3	Pengembalian Belanja	-9,062,664	-9,062,664	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,424,114	2,424,114	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03 Februari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 308209 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,177,742,000	21,177,742,000	0
2	Belanja	21,165,187,115	21,165,187,115	0
3	Pengembalian Belanja	-1,005,194	-1,005,194	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	383,711	383,711	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417800 - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	52,836,492,000	52,836,492,000	0
2	Belanja	52,427,755,191	52,427,755,191	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	82,565,633	82,565,633	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417816 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	119,157,298,000	119,157,298,000	0
2	Belanja	115,641,573,360	115,641,573,360	0
3	Pengembalian Belanja	-29,384,500	-29,384,500	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	194,204,593	194,204,593	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417822 - KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	102,939,940,000	102,939,940,000	0
2	Belanja	102,925,588,873	102,925,588,873	0
3	Pengembalian Belanja	-7,678,387	-7,678,387	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	13,513,659	13,513,659	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417831 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	112,595,430,000	112,595,430,000	0
2	Belanja	112,595,410,516	112,595,410,516	0
3	Pengembalian Belanja	-25,639,879	-25,639,879	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,533,913	9,533,913	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN TUBAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417853 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	100,520,064,000	100,520,064,000	0
2	Belanja	100,519,167,492	100,519,167,492	0
3	Pengembalian Belanja	-61,671,539	-61,671,539	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	42,349,558	42,349,558	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BOJONEGORO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417862 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	154,346,624,000	154,346,624,000	0
2	Belanja	154,343,193,707	154,343,193,707	0
3	Pengembalian Belanja	-44,205,492	-44,205,492	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	32,776,105	32,776,105	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417884 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	115,812,757,000	115,812,757,000	0
2	Belanja	115,800,752,605	115,800,752,605	0
3	Pengembalian Belanja	-13,329,032	-13,329,032	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	14,088,738	14,088,738	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BOJONEGORO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417890 - KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	154,528,578,000	154,528,578,000	0
2	Belanja	154,499,832,134	154,499,832,134	0
3	Pengembalian Belanja	-32,375,551	-32,375,551	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	69,118,446	69,118,446	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417904 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	244,806,001,000	244,806,001,000	0
2	Belanja	244,787,649,243	244,787,649,243	0
3	Pengembalian Belanja	-994,580,147	-994,580,147	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	23,724,268	23,724,268	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417981 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	83,719,440,000	83,719,440,000	0
2	Belanja	83,717,437,534	83,717,437,534	0
3	Pengembalian Belanja	-31,281,747	-31,281,747	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	38,901,028	38,901,028	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 418001 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	166,533,689,000	166,533,689,000	0
2	Belanja	166,481,819,213	166,481,819,213	0
3	Pengembalian Belanja	-6,179,859	-6,179,859	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,550,623	7,550,623	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 650079 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 8:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	28,563,093,000	28,563,093,000	0
2	Belanja	28,560,600,157	28,560,600,157	0
3	Pengembalian Belanja	-8,771,984	-8,771,984	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,569,400	4,569,400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

TANGGAL REVISI DIPA BERBEDA ANTARA SAKTI DENGAN SPAN

Catatan KPPN:

menunggu olap

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

		Objek Penelaahan		**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A						
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran						
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN						
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab		√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE		√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan		√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal		√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual		√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas		√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun		√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI						
		Kesesuaian Saldo		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI		√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.						
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI						
		Persamaan Dasar Akuntansi		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas		√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI						
		To Do List		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			√	Tidak
2		Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√		Ya
3		Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
4		Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			√	Tidak
5		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
6		Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
7		Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			√	Tidak
8		Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			√	Tidak
9		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
10		Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			√	Tidak
11		Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

12		Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah						
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?			√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			√	Tidak
		a. Pagu/DIPA			√	Tidak
		b. Estimasi PNBP			√	Tidak
		c. Belanja			√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		e. Pendapatan			√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		g. Kas BLU			√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran			√	Tidak
		i. Kas Hibah			√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung			√	Tidak
		Rekon Internal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal			√	Tidak
		Daftar MONSAKTI		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?			√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			√	Tidak
6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL						
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal			√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)			√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			√	Tidak
		Terkait Satker BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			√	Tidak
		Hibah Langsung		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			√	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			√	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			√	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**Rp.**		
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**Rp.**		
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			√	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			√	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			√	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA						
		Pengecekan Pos-pos Neraca		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√		Ya

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Saldo pada neraca bernilai wajar		√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√		Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
		Pengecekan Pos-pos LO		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			√	Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			√	Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
		Pengecekan Pos-pos LPE		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Ya
2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			√	Ya
		Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp..... dengan dokumen sumber BAST				
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)						
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB			√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN						
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "AD		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			√	Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			√	Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			√	Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)			√	Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			√	Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			√	Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			√	Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417800) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Sekretariat Jenderal)
Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU						
		LPSAL BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			√	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			√	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			√	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			√	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			√	Ya
		LAK BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			√	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			√	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			√	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			√	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN						
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang						

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

SANGIDUN, S.Kom, M.AP
NIP. 198207062011011005

Sidoarjo, 7 Mei 2026
Penyusun Laporan Keuangan

Rochmad, S.Ag
NIP. 197404072007011032

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED TAHUN 2025

TINGKAT WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 6 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40
VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 6 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.454.839.274 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.454.839.274 atau mencapai -184,42 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp-3.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.900.659.274 atau mencapai 99,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp61.488.348.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.350.587.844.212 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp818.512.893; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.348.370.530.622 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.398.800.697.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.407.141.400 dan Rp2.349.180.702.812

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.975.721.575 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp56.782.042.815 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp62.757.764.390, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp225.880.174 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp50.315.877.066.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp2.378.168.099.693, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-50.315.877.066 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 2.110.862.339 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 19.217.617.846 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.349.180.702.812

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajaka	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	(3.500.000.000)	6.454.839.274	(184,42)	5.089.612.059
JUMLAH PENDAPATAN		**(3.500.000.000)**	**6.454.839.274**	**(184,42)**	**5.089.612.059**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.717.777.000	2.674.497.560	98,41	2.541.894.967
Belanja Barang	B.2.2	41.677.990.000	41.349.847.221	99,21	44.326.507.940
Belanja Modal	B.2.3	17.092.581.000	16.876.314.493	98,73	16.058.077.966
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BE		**61.488.348.000**	**60.900.659.274**	**99,04**	**62.926.480.873**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	785.568.593	658.848.346
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**818.512.893**	**658.848.346**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	2.126.179.700.000	2.126.179.700.000
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	35.756.238.369	44.479.610.831
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	266.855.176.727	283.700.274.589
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	2.590.862.000	2.590.862.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	17.580.364.800	17.580.364.800
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(100.591.811.274)	(97.004.346.099)
Jumlah Aset Tetap		**2.348.370.530.622**	**2.377.526.466.121**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	322.626.800	322.626.800
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	1.375.831.100	1.001.311.000
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	35.259.813	10.000.000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(334.917.016)	(329.582.425)
Jumlah Aset Lainnya		**1.398.800.697**	**1.004.355.375**
JUMLAH ASET		**2.350.587.844.212**	**2.379.189.669.842**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	1.407.141.400	1.010.243.674
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	11.326.475
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.407.141.400**	**1.021.570.149**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.407.141.400**	**1.021.570.149**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	2.349.180.702.812	2.378.168.099.693
JUMLAH EKUTAS		**2.349.180.702.812**	**2.378.168.099.693**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.350.585.838.212**	**2.379.189.669.842**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	5.975.721.575	5.060.658.237
Jumlah Pendapatan		**5.975.721.575**	**5.060.658.237**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	2.674.497.560	2.541.894.967
Beban Persediaan	D.4	1.260.762.496	1.366.959.901
Beban Barang dan Jasa	D.5	10.585.239.088	12.123.382.958
Beban Pemeliharaan	D.6	4.491.801.276	4.677.375.338
Beban Perjalanan Dinas	D.7	24.873.307.440	26.211.017.647
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	12.896.434.955	13.797.011.496
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**56.782.042.815**	**60.717.642.307**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**62.757.764.390**	**(55.656.984.070)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	10.630.000
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	358.162.174	36.334.559
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	(132.282.000)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**225.880.174**	**46.964.559**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**50.315.877.066**	**(55.620.649.511)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**50.315.877.066**	**(55.620.649.511)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**2.378.168.099.693**	**2.377.805.914.172**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(50.315.877.066)**	**(55.620.649.511)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**2.110.862.339**	**(2.133.783.782)**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	(1.450.000)	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	2.112.312.339	(2.133.783.782)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		**2.110.862.339**	**(2.133.783.782)**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	19.217.617.846	58.116.618.814
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(28.987.396.881)	362.185.521
EKUITAS AKHIR	E.6	**2.349.180.702.812**	**2.378.168.099.693**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan. Pengintregasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan literatur, penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Kementerian dalam Ditjen-ditjen dan seterusnya sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian Kementerian Agama termasuk organisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Kementerian Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012. Penyempurnaan itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".” Visi ini mencerminkan tujuan Kemenag dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1 Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Beragama;
2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4 Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
b. Ekoteologi;
c. Layanan keagamaan berdampak;
d. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
e. Pesantren berdaya;
f. pemberdayaan ekonomi umat;
g. Sukses penyelenggaraan haji; dan;
h. Digitalisasi tata kelola.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penggabungan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi Satker Sebelumnya. Modul dalam aplikasi SAKTI;

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator;

Laporan Keuangan 2025 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2025 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) adalah 40 satuan kerja

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	299079	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO		1		1
2	299166	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN		1		1
3	299156	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN		1		1
4	299143	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI		1		1
5	299111	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI		1		1
6	417807	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		1		1
7	299117	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR		1		1
8	299088	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN		1		1

9	299103	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		1		1
10	417856	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN		1		1
11	299149	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN		1		1
12	299106	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG		1		1
19	299056	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO		1		1
20	299075	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN		1		1
21	417908	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG		1		1
22	417984	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO		1		1
23	299169	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP		1		1
24	418008	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER		1		1
25	417894	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN		1		1
26	299063	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI		1		1
27	650085	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU		1		1
28	299085	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG		1		1
29	417866	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO		1		1
30	299092	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO		1		1
31	299096	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI		1		1
32	299134	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG		1		1
33	299139	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN		1		1
34	299172	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG		1		1
35	299162	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO		1		1
36	299070	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG		1		1
37	299175	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN		1		1
38	299159	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN		1		1
39	417830	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK		1		1
40	299122	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK		1		1
Jumlah				**40**		**40**

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sev
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.500.000.000	3.500.000.000
Jumlah Pendapatan	**3.500.000.000**	**3.500.000.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	1.571.783.000	2.717.777.000
Belanja Barang	39.905.513.000	41.677.990.000
Belanja Modal	15.722.930.000	17.092.581.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**57.200.226.000**	**61.488.348.000**

Pendapatan Rp6.454.839.274

B.1 Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.454.839.274 atau mencapai -184,42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp-3.500.000.000. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.454.839.274. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pendapatan pengembalian belanja barang tahun yang lalu dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.500.000.000	6.454.839.274	184,42
Jumlah	**3.500.000.000**	**6.454.839.274**	**184,42**

Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 26,82 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.454.839.274	5.089.612.059	26,82
Jumlah	**6.454.839.274**	**5.089.612.059**	**26,82**

Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp6.454.839.274

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp6.454.839.274 dan Rp5.089.612.059. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 26,82 dari TA 2024 Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pengembalian belanja barang tahun yang lalu, pendapatan jasa pelayanan keagamaan lainnya jamaah haji belum menundah keberangkatan ibadah haji. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.454.839.274	5.089.612.059	26,82
Jumlah	**6.454.839.274**	**5.089.612.059**	**26,82**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	5.708.872.100	4.864.944.500	17,35
Jumlah	**6.454.839.274**	**5.089.612.059**	**26,82**

Belanja
Rp60.900.659.274

B.2 Belanja

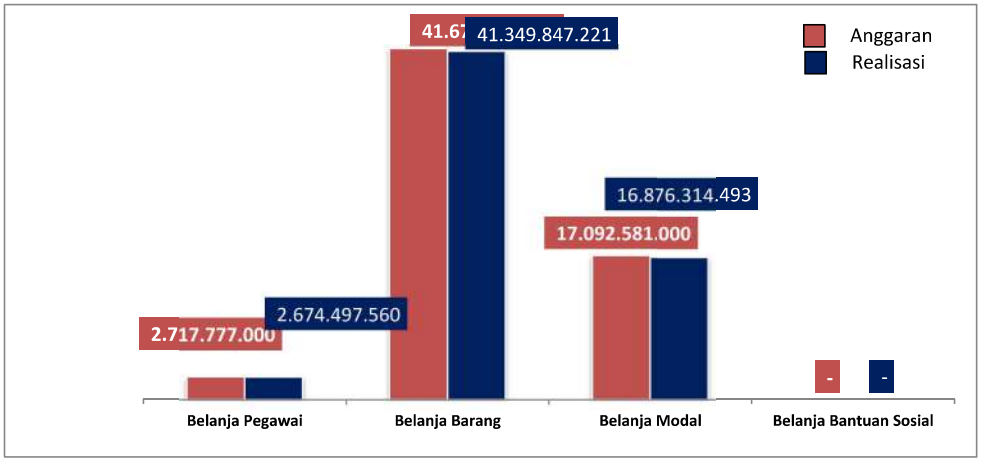
Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp60.900.659.274 atau 99,04 % dari anggaran belanja sebesar Rp.61.488.348.000 Rincian anggaran dan belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.717.777.000	2.674.497.560	98,41
Belanja Barang	41.677.990.000	41.349.847.221	99,21
Belanja Modal	17.092.581.000	16.876.314.493	98,73
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**61.488.348.000**	**60.900.659.274**	**99,04**

Komposisi anggaran dan belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 3,22% Kenaikan realisasi belanja tahun berjalan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhitung mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS uang makan PNS uang lembur PNS dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023 tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. dan terbayarnya tenaga PPPK . Berikut rincian belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	2.674.497.560	2.541.894.967	5,22
Belanja Barang	41.349.847.221	44.326.507.940	(6,72)
Belanja Modal	16.876.314.493	16.058.077.966	5,10
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**60.900.659.274**	**62.926.480.873**	**(3,22)**

Belanja Pegawai Rp2.674.497.560

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.674.497.560 dan Rp2.541.894.967. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,22 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaiakan realisasi belanja pegawai karena belanja gaji pokok anggaran terpusat DIPA Sekretariat Jenderal

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	685.215.900	751.383.400	(8,81)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.552	11.723	(18,52)
Jumlah Belanja kotor	**2.674.497.796**	**2.542.265.379**	**5,20**
Pengembalian Belanja Pegawai	236	370.412	(99,94)
Jumlah Belanja	**2.674.497.560**	**2.541.894.967**	**5,22**

Belanja Barang
Rp41.349.847.221

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.349.847.221 dan Rp44.326.507.940. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 6,72% dari TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan belanja barang tahun berjalan dikarena pelaksanaan kegiatan penambahan kuota haji

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	6.156.665.837	6.562.368.528	(6,18)
Belanja Barang Non Operasional	1.290.340.964	2.415.656.488	(46,58)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.393.716.053	1.351.372.391	3,13
Belanja Jasa	3.147.330.711	3.110.783.048	1,17
Belanja Pemeliharaan	4.488.651.966	4.675.309.838	(3,99)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9.885.695.432	9.485.122.163	4,22
Belanja Perjalanan Luar Negeri	14.988.694.900	16.758.520.220	(10,56)
Jumlah Belanja Kotor	**41.351.095.863**	**44.359.132.676**	**(6,78)**
Pengembalian Belanja	1.248.642	32.624.736	(96,17)
Jumlah Belanja	**41.349.847.221**	**44.326.507.940**	**(6,72)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Belanja Modal
Rp16.876.314.493

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.876.314.493 dan Rp16.058.077.966. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,10% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**16.994.104.985**	**16.058.077.966**	**5,83**
Pengembalian Belanja	117.790.492	-	-
Jumlah Belanja	**16.876.314.493**	**16.058.077.966**	**5,10**

Belanja Modal Tanah
Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.279.677.155

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.279.677.155 dan Rp3.112.541.640, mengalami penurunan sebesar 33,17 % bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.080.043.655	3.112.541.640	(33,17)
Jumlah Belanja Kotor	**2.080.043.655**	**3.112.541.640**	**(33,17)**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**2.080.043.655**	**3.112.541.640**	**(33,17)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp14.714.427.830

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.714.427.830 dan Rp12.945.536.326 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,75% dibandingkan TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Kenaikan belanja modal gedung dan bangunan SBSN.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.945.584.548	12.945.536.326	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**14.714.427.830**	**12.945.536.326**	**13,66**
Pengembalian Belanja	117.790.492	-	-
Jumlah Belanja	**14.596.637.338**	**12.945.536.326**	**12,75**

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Nama Satker	Jumlah
1	Uang Muka Kerja Tahun 2025	-
Jumlah		**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp30.938.300

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.938.300 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp 30.938.300	Rp -
Jumlah	**#REF!**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp787.574.593

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp787.574.593 dan Rp658.848.346. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
Barang Konsumsi	787.574.593	656.771.536
Jumlah	**787.574.593**	**658.848.346**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp2.126.179.700.000

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.126.179.700.000 dan Rp2.126.179.700.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**2.126.179.700.000**
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**2.126.179.700.000**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	0	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp35.756.238.369

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp35.756.238.369 dan Rp44.479.610.831. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**44.479.610.831**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**44.484.605.831**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(30.851.514.591)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**13.633.091.240**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Penjelasan mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap terdapat pada satker;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp266.855.176.727

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp266.855.176.727 dan Rp283.700.274.589. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**283.700.274.589**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**283.700.274.589**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(69.030.648.988)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**214.669.625.601**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp2.590.862.000

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.2.590.862.000 dan Rp.2.590.862.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**2.590.862.000**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**2.590.862.000**
Akumulasi Penyusutan s.d.	(709.647.695)
Nilai Buku per	**1.881.214.305**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp17.580.364.800

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17.580.364.800 dan Rp.17.580.364.800. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Satker Sekjen Tingkat Wilayah ada sebagai berikut; Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**17.580.364.800**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	316.542.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**21.398.621.684**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp100.591.811.274

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp100.591.811.274 dan Rp97.004.346.099. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	35.756.238.369	(30.851.514.591)	4.904.723.778
2	Gedung dan Bangunan	266.855.176.727	(69.030.648.988)	197.824.527.739
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.590.862.000	(709.647.695)	1.881.214.305
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**305.202.277.096**	**(100.591.811.274)**	**204.610.465.822**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp322.626.800

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp322.626.800 dan Rp322.626.800. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah) berupa Software.
Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**322.626.800**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-

Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**322.626.800**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(322.626.800)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp1.375.831.100

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.375.831.100 dan Rp1.001.311.000. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp35.259.813

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp35.259.813 dan Rp10.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**10.000.000**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**10.000.000**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(12.290.216)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**(2.290.216)**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-

Mutasi Kurang

-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp334.917.016 dan Rp329.582.425. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	322.626.800	(322.626.800)	-
Aset Lain-lain	35.259.813	(12.290.216)	22.969.597
Total	**357.886.613**	**(334.917.016)**	**22.969.597**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp1.407.141.400

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.407.141.400 dan Rp1.010.243.674. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	(8.932.674)
Total	**(1.407.141.400)**	**(1.010.243.674)**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp11.326.475. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	11.326.475
Total	**-**	**11.326.475**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Muka Kerja Tahun 2025 dari KPPN sudah nihil	*0*
Jumlah	*0*

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp2.349.180.702.812

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.349.180.702.812. dan Rp2.378.168.099.693. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp5.975.721.575

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

#REF!

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(244.589.000)	(181.163.000,00)	35,01
Jumlah	**#REF!**	**#REF!**	**-**

Beban Pegawai Rp2.674.497.560

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.674.497.560 dan Rp2.541.894.967.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 25,89 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	685.215.900	751.383.400	(8,81)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.316	11.311	(17,64)
Jumlah	**2.758.489.850**	**3.722.239.250**	**(25,89)**

Beban Persediaan Rp1.260.762.496

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.260.762.496 dan Rp1.366.959.901

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7,77 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	1.260.762.496	1.366.959.901	(7,77)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**1.260.762.496,00**	**1.366.959.901**	**(7,77)**

Beban Barang dan Jasa Rp10.585.239.088

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.585.239.088 dan Rp12.123.382.958.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12,69 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja barang dan jasa pada belanja sewa sdh tidak ada pada DIPA Masing2 Satker. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	5.206.034.737	5.668.190.378	(8,15)
Beban Bahan	619.675.393	2.008.770.488	(69,15)
Beban Honor Output Kegiatan	101.902.000	343.974.000	(70,38)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	521.723.571	25.312.000	1.961,17
Beban Langganan Telepon	149.237.731	161.099.808	(7,36)
	-	-	-
Jumlah	**10.585.239.088**	**12.123.382.958,00**	**(12,69)**

Beban Pemeliharaan Rp4.491.801.276

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.491.801.276 dan Rp4.677.375.338.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,97 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan perbaikan aset bmn masih bisa digunakan atau layak pakai Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.226.505.993	822.612.316	49,10
Jumlah	**4.491.801.276**	**4.677.375.338**	**(3,97)**

Beban Perjalanan Dinas Rp24.873.307.440

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.873.307.440 dan Rp26.211.017.647

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5,10 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas karena kegiatan atau program berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	7.660.393.938	7.810.892.663	(1,93)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233.672.400	305.032.500	(23,39)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.978.467.594	1.102.492.000	79,45
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	14.988.093.508	16.725.895.484	(10,39)
Jumlah	**24.873.307.440,00**	**26.211.017.647**	**(5,10)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehKenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat rumah ibadah. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	-	-	-
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Kenaikan beban bantuan sosial bertambahnya penerima bantuan sosial untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang. Rincian Tahun

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp12.896.434.955

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.896.434.955 dan Rp13.797.011.496.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Jumah Penyusutan	***12.896.434.955***	***13.797.011.496***	***(6,53)***
Jumlah	**12.896.434.955**	**13.797.011.496**	**(6,53)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.630.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	10.630.000,00	(100)
Jumlah	**-**	**10.630.000**	**(100)**

Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp358.162.174

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp358.162.174 dan Rp36.334.559

Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(788.400)	-	-
Jumlah	**(358.162.174,00)**	**(36.334.559)**	**886**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp-132.282.000

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-132.282.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	132.282.000	-	-
Jumlah	**132.282.000,00**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian Beban Penanganan Covid-19 TA 2025 dan 2024

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp2.378.168.099.693,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.378.168.099.693,00 dan Rp.2.377.805.914.172,00

Defisit LO Rp.-50.315.877.066,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-50.315.877.066,00 dan Rp.-55.620.649.511,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.110.862.339 dan Rp.-2.133.783.782 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp-1.450.000,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-1.450.000 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(1.450.000)
Jumlah	**(1.450.000,0)**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp2.112.312.339

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.112.312.339 dan Rp.-2.133.783.782.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.112.312.339
Jumlah	**2.112.312.339,0**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp19.217.617.846

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.19.217.617.846 dan Rp.58.116.618.814. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	60.900.659.274
Diterima dari Entitas Lain	(6.454.839.274)
Transfer Keluar	(49.508.260.029)
Transfer Masuk	14.280.057.875
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**19.217.617.846**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 60.900.659.274, sedangkan DDEL sebesar Rp 6.454.839.274

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-49.508.260.029 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp14.280.057.875 yang terdiri

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp2.349.180.702.812

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.349.180.702.812,00 dan Rp.2.378.168.099.693,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025090500KD

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**3,500,000,000**	**6,454,839,274**	**2,954,839,274**	**184.42**	**5,250,000,000**	**5,089,612,059**	**(160,387,941)**	**96.94**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,500,000,000	6,454,839,274	2,954,839,274	184.42	5,250,000,000	5,089,612,059	(160,387,941)	96.94
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**3,500,000,000**	**6,454,839,274**	**2,954,839,274**	**184.42**	**5,250,000,000**	**5,089,612,059**	**(160,387,941)**	**96.94**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	61,488,348,000	60,900,659,274	(587,688,726)	99.04	64,538,019,000	62,926,480,873	(1,611,538,127)	97.5
1. Belanja Pegawai	2,717,777,000	2,674,497,560	(43,279,440)	98.41	2,544,829,000	2,541,894,967	(2,934,033)	99.88
2. Belanja Barang	41,677,990,000	41,349,847,221	(328,142,779)	99.21	45,232,739,000	44,326,507,940	(906,231,060)	98
3. Belanja Modal	17,092,581,000	16,876,314,493	(216,266,507)	98.73	16,760,451,000	16,058,077,966	(702,373,034)	95.81
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025090500KD

Tgl Data : 06/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**61,488,348,000**	**60,900,659,274**	**(587,688,726)**	**99.04**	**64,538,019,000**	**62,926,480,873**	**(1,611,538,127)**	**97.5**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

UAPPAW : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	30,938,300	0	30,938,300	0.00
Persediaan	785,568,593	658,848,346	126,720,247	19.23
JUMLAH ASET LANCAR	**816,506,893**	**658,848,346**	**157,658,547**	**23.93**
ASET TETAP				
Tanah	2,126,179,700,000	2,126,179,700,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	35,756,238,369	44,479,610,831	(8,723,372,462)	(19.61)
Gedung dan Bangunan	266,855,176,727	283,700,274,589	(16,845,097,862)	(5.94)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,590,862,000	2,590,862,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17,580,364,800	17,580,364,800	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(100,591,811,274)	(97,004,346,099)	(3,587,465,175)	3.70
JUMLAH ASET TETAP	**2,348,370,530,622**	**2,377,526,466,121**	**(29,155,935,499)**	**(1.23)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	322,626,800	322,626,800	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,375,831,100	1,001,311,000	374,520,100	37.40
Aset Lain-lain	35,259,813	10,000,000	25,259,813	252.60
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(334,917,016)	(329,582,425)	(5,334,591)	1.62
JUMLAH ASET LAINNYA	**1,398,800,697**	**1,004,355,375**	**394,445,322**	**39.27**
JUMLAH ASET	**2,350,585,838,212**	**2,379,189,669,842**	**(28,603,831,630)**	**(1.20)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,407,141,400	1,010,243,674	396,897,726	39.29
Pendapatan Diterima Dimuka	0	11,326,475	(11,326,475)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1,407,141,400**	**1,021,570,149**	**385,571,251**	**37.74**
JUMLAH KEWAJIBAN	**1,407,141,400**	**1,021,570,149**	**385,571,251**	**37.74**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,349,178,696,812	2,378,168,099,693	(28,989,402,881)	(1.22)
JUMLAH EKUITAS	**2,349,178,696,812**	**2,378,168,099,693**	**(28,989,402,881)**	**(1.22)**
JUMLAH EKUITAS	**2,349,178,696,812**	**2,378,168,099,693**	**(28,989,402,881)**	**(1.22)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2,350,585,838,212**	**2,379,189,669,842**	**(28,603,831,630)**	**(1.20)**

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

UAPPAW : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

WILAYAH/PROVINSI : **(025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,975,721,575	5,060,658,237	915,063,338	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,975,721,575	5,060,658,237	915,063,338	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	5,975,721,575	5,060,658,237	915,063,338	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	2,674,497,560	2,541,894,967	132,602,593	-
Beban Persediaan	1,262,768,496	1,366,959,901	(104,191,405)	-
Beban Barang dan Jasa	10,585,239,088	12,123,382,958	(1,538,143,870)	-
Beban Pemeliharaan	4,491,801,276	4,677,375,338	(185,574,062)	-
Beban Perjalanan Dinas	24,873,307,440	26,211,017,647	(1,337,710,207)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I **: (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

WILAYAH/PROVINSI **: (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	12,896,434,955	13,797,011,496	(900,576,541)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	56,784,048,815	60,717,642,307	(3,933,593,492)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(50,808,327,240)	(55,656,984,070)	4,848,656,830	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	10,630,000	(10,630,000)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	10,630,000	(10,630,000)	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	490,444,174	25,704,559	464,739,615	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	490,444,174	25,704,559	464,739,615	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	490,444,174	36,334,559	454,109,615	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(50,317,883,066)	(55,620,649,511)	5,302,766,445	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(50,317,883,066)	(55,620,649,511)	5,302,766,445	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,378,168,099,693	2,377,805,914,172	362,185,521	0.02
SURPLUS/DEFISIT-LO	(50,317,883,066)	(55,620,649,511)	5,302,766,445	(9.53)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,110,862,339	(2,133,783,782)	4,244,646,121	(198.93)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(1,450,000)	0	(1,450,000)	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	2,112,312,339	(2,133,783,782)	4,246,096,121	(198.99)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	19,217,617,846	58,116,618,814	(38,899,000,968)	(66.93)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(28,989,402,881)	362,185,521	(29,351,588,402)	(8,104.02)
EKUITAS AKHIR	2,349,178,696,812	2,378,168,099,693	(28,989,402,881)	(1.22)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 025090500KD **Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 06/05/26 7:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	244,589,000	0	244,589,000	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	10,934,000	0	10,934,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	255,523,000	0	255,523,000	
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	3,500,000,000	5,708,872,100	0	5,708,872,100	163.11
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	3,500,000,000	5,708,872,100	0	5,708,872,100	163.11
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	132,282,000	0	132,282,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	357,373,774	0	357,373,774	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	788,400	0	788,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	490,444,174	0	490,444,174	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,500,000,000	6,454,839,274	0	6,454,839,274	184.42
	JUMLAH PENDAPATAN	3,500,000,000	6,454,839,274	0	6,454,839,274	184.42

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	30,938,300	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	785,568,593	0
0.0	131111	Tanah	2,126,179,700,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	35,756,238,369	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	266,855,176,727	0
0.0	134112	Irigasi	135,946,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,454,916,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	17,580,364,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	30,851,514,591
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	69,030,648,988
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	107,880,507
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	601,767,188
0.0	162151	Software	322,626,800	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,375,831,100	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	35,259,813	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	12,290,216
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	322,626,800
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,407,141,400
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	60,900,659,274
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,454,839,274	0
0.0	313211	Transfer Keluar	49,508,260,029	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	14,280,057,875
0.0	391111	Ekuitas	0	2,378,168,099,693
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,112,312,339
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya	1,450,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	244,589,000
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	22,260,475
3.0	425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	5,708,872,100
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	132,282,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	357,373,774
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	788,400
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	685,215,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,316	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	39,656,210	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,522,048	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,580,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	36,024,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,217,520	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	35,051,280	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	100,670,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,585,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	432,843,796	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,976	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,339,518	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,347,930	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	42,966,332	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	25,503,910	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	94,413,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	11,240,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	636,622,616	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	435,683,208	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,206,034,737	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	947,360,250	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,650,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	619,675,393	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	101,902,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	521,723,571	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	47,040,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,939,892,876	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	149,237,731	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	316,573,740	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	99,373,218	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	153,850,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	479,925,572	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,135,901,562	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27,050,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,226,505,993	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,194,411	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7,660,393,938	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	233,672,400	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,680,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,978,467,594	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	14,988,093,508	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,546,255,862	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,231,793,928	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	18,710,329	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	96,120,025	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,044,375	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	510,436	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,262,768,496	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,149,310	0
JUMLAH			**2,564,261,164,620**	**2,564,261,164,620**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	60,900,659,274
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,454,839,274	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	244,589,000
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	10,934,000
3.0	425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	5,708,872,100
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	132,282,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	357,373,774
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	788,400
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	685,215,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,552	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39,656,210	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,522,048	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,580,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	36,024,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,217,520	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	35,051,280	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	100,670,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,585,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	432,843,796	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,976	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	27,339,518	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,347,930	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	42,966,332	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25,503,910	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	94,413,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,240,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	636,622,616	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	435,683,208	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,206,489,837	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	947,526,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,650,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	619,675,393	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	101,902,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	521,723,571	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	47,040,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	327,430,139	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	1,066,285,914	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,944,706,950	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

WILAYAH/PROVINSI : (025090500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 7:50 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	149,237,731	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	320,237,240	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	99,373,218	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	153,850,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	479,925,572	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,135,901,562	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27,050,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,226,505,993	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,194,411	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,660,393,938	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	233,672,400	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,680,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,978,949,094	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	14,988,694,900	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,080,043,655	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	199,633,500	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,945,584,548	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,768,843,282	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	236
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	165,750
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	481,500
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	601,392
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	117,790,492
JUMLAH			**67,474,537,918**	**67,474,537,918**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl. Cetak 06/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	656,771,536	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,076,810	0
0.0	131111	Tanah	2,126,179,700,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	44,479,610,831	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	283,700,274,589	0
0.0	134112	Irigasi	135,946,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,454,916,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	17,580,364,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	34,443,154,221
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	61,966,374,537
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	89,170,178
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	505,647,163
0.0	162151	Software	322,626,800	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,001,311,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	10,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	10,000,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	319,582,425
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	8,932,674
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,001,311,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	11,326,475
0.0	391111	Ekuitas	0	2,378,168,099,693
JUMLAH			**2,476,523,598,366**	**2,476,523,598,366**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 09**	**DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025090500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 7:50 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	569,173,000	690,772,000	685,215,900	0	685,215,900	99.2	5,556,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	20,000	9,552	236	9,316	46.58	10,684
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30,217,000	39,657,000	39,656,210	0	39,656,210	100	790
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	13,574,000	16,040,000	15,522,048	0	15,522,048	96.77	517,952
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,170,000	20,580,000	20,580,000	0	20,580,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	30,536,000	36,024,000	36,024,000	0	36,024,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	385,000	8,241,000	8,217,520	0	8,217,520	99.72	23,480
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,699,000	35,775,000	35,051,280	0	35,051,280	97.98	723,720
511129	Belanja Uang Makan PNS	93,600,000	103,490,000	100,670,000	0	100,670,000	97.28	2,820,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18,150,000	20,588,000	20,585,000	0	20,585,000	99.99	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	800,526,000	971,187,000	961,531,510	236	961,531,274	93.75	9,655,726
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	35,244,000	433,052,000	432,843,796	0	432,843,796	99.95	208,204
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11,000	11,000	5,976	0	5,976	54.33	5,024
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,520,000	28,879,000	27,339,518	0	27,339,518	94.67	1,539,482
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	715,000	7,067,000	6,347,930	0	6,347,930	89.82	719,070
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,698,000	43,484,000	42,966,332	0	42,966,332	98.81	517,668
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,199,000	28,317,000	25,503,910	0	25,503,910	90.07	2,813,090
511628	Belanja Uang Makan PPPK	39,960,000	102,720,000	94,413,000	0	94,413,000	91.91	8,307,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	11,960,000	11,240,000	0	11,240,000	93.98	720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	86,347,000	655,490,000	640,660,462	0	640,660,462	89.19	14,829,538
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	16,560,000	0	0	0	0	0	0
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	7,200,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	23,760,000	0	0	0	0	0	0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	462,010,000	637,556,000	636,622,616	0	636,622,616	99.85	933,384
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	199,140,000	453,544,000	435,683,208	0	435,683,208	96.06	17,860,792
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	661,150,000	1,091,100,000	1,072,305,824	0	1,072,305,824	97.96	18,794,176

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 09**	**DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025090500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 7:50 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,571,783,000	2,717,777,000	2,674,497,796	236	2,674,497,560	83.95	43279440
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,850,074,000	5,247,283,000	5,206,489,837	0	5,206,489,837	99.22	40,793,163
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	992,520,000	954,454,000	947,526,000	165,750	947,360,250	99.26	7,093,750
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,210,000	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,852,804,000	6,204,387,000	6,156,665,837	165,750	6,156,500,087	99.49	47,886,913
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,603,386,000	629,984,000	619,675,393	0	619,675,393	98.36	10,308,607
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	73,575,000	105,502,000	101,902,000	0	101,902,000	96.59	3,600,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	356,865,000	527,930,000	521,723,571	0	521,723,571	98.82	6,206,429
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,604,000	50,218,000	47,040,000	0	47,040,000	93.67	3,178,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,035,430,000	1,313,634,000	1,290,340,964	0	1,290,340,964	96.86	23,293,036
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	347,015,000	328,784,000	327,430,139	0	327,430,139	99.59	1,353,861
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	663,030,000	1,066,289,000	1,066,285,914	0	1,066,285,914	100	3,086
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,010,045,000	1,395,073,000	1,393,716,053	0	1,393,716,053	99.8	1,356,947
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,887,847,000	1,961,238,000	1,944,706,950	0	1,944,706,950	99.16	16,531,050
522112	Belanja Langganan Telepon	191,040,000	152,516,000	149,237,731	0	149,237,731	97.85	3,278,269
522113	Belanja Langganan Air	679,420,000	320,916,000	320,237,240	0	320,237,240	99.79	678,760
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	127,902,000	103,354,000	99,373,218	0	99,373,218	96.15	3,980,782
522141	Belanja Sewa	50,675,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	42,200,000	153,850,000	153,850,000	0	153,850,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	90,960,000	480,823,000	479,925,572	0	479,925,572	99.81	897,428
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,070,044,000	3,172,697,000	3,147,330,711	0	3,147,330,711	84.68	25,366,289
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,122,101,000	3,137,390,000	3,135,901,562	0	3,135,901,562	99.95	1,488,438
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	27,050,000	27,050,000	0	27,050,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,036,118,000	1,236,213,000	1,226,505,993	0	1,226,505,993	99.21	9,707,007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 09**	**DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025090500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 7:50 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,970,000	107,200,000	99,194,411	0	99,194,411	92.53	8,005,589
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,234,189,000	4,507,853,000	4,488,651,966	0	4,488,651,966	97.92	19,201,034
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,206,271,000	7,791,617,000	7,660,393,938	0	7,660,393,938	98.32	131,223,062
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	241,154,000	246,056,000	233,672,400	0	233,672,400	94.97	12,383,600
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203,935,000	14,150,000	12,680,000	0	12,680,000	89.61	1,470,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	645,657,000	2,027,087,000	1,978,949,094	481,500	1,978,467,594	97.6	48,619,406
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	6,297,017,000	10,078,910,000	9,885,695,432	481,500	9,885,213,932	95.12	193,696,068
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	15,405,984,000	15,005,436,000	14,988,694,900	601,392	14,988,093,508	99.88	17,342,492
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	15,405,984,000	15,005,436,000	14,988,694,900	601,392	14,988,093,508	99.88	17,342,492
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	39,905,513,000	41,677,990,000	41,351,095,863	1,248,642	41,349,847,221	94.01	328142779
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,966,970,000	2,081,792,000	2,080,043,655	0	2,080,043,655	99.92	1,748,345
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	200,000,000	199,633,500	0	199,633,500	99.82	366,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	2,966,970,000	2,281,792,000	2,279,677,155	0	2,279,677,155	99.87	2,114,845
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,755,960,000	12,948,619,000	12,945,584,548	117,790,492	12,827,794,056	99.07	120,824,944
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	1,862,170,000	1,768,843,282	0	1,768,843,282	94.99	93,326,718
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	12,755,960,000	14,810,789,000	14,714,427,830	117,790,492	14,596,637,338	97.03	214,151,662
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	15,722,930,000	17,092,581,000	16,994,104,985	117,790,492	16,876,314,493	98.45	216266507
	JUMLAH BELANJA	57,200,226,000	61,488,348,000	61,019,698,644	119,039,370	60,900,659,274	99.24	587,688,726

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl.Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:51 AM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	785,568,593
131111	Tanah	2,126,179,700,000
132111	Peralatan dan Mesin	35,756,238,369
133111	Gedung dan Bangunan	266,855,176,727
134112	Irigasi	135,946,000
134113	Jaringan	2,454,916,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	17,580,364,800
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30,851,514,591)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(69,030,648,988)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(107,880,507)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(601,767,188)
162151	Software	322,626,800
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	35,259,813
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(12,290,216)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(322,626,800)
J U M L A H		**2,349,179,068,812**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**Peralatan dan Mesin**	**3,561**	**1,891,879,492**	**196**	**87,213,907**	**438**	**206,582,307**	**3,319**	**1,772,511,092**
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	950,000	0	0	1	950,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	10	7,985,656	12	3,635,656	2	910,656	20	10,710,656
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,284	1,782,358,693	169	70,134,108	416	188,694,508	3,037	1,663,798,293
30601	ALAT STUDIO	1	600,000	1	500,000	1	600,000	1	500,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	56	50,739,143	7	6,149,143	7	6,149,143	56	50,739,143
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	200	42,878,000	0	0	0	0	200	42,878,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	8	5,635,000	7	6,795,000	10	8,545,000	5	3,885,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	733,000	0	0	1	733,000	0	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**3**	**15,060,000**	**0**	**0**	**1**	**3,060,000**	**2**	**12,000,000**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	15,060,000	0	0	1	3,060,000	2	12,000,000
TOTAL			**1,906,939,492**		**87,213,907**		**209,642,307**		**1,784,511,092**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**67,675**	**2,126,179,700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,675**	**2,126,179,700,000**
20101	TANAH PERSIL	54,506	1,717,282,250,000	0	0	0	0	54,506	1,717,282,250,000
20102	TANAH NON PERSIL	13,169	408,897,450,000	0	0	0	0	13,169	408,897,450,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**15,427**	**46,371,490,323**	**889**	**4,611,898,155**	**3,274**	**13,454,639,017**	**13,042**	**37,528,749,461**
30103	ALAT BANTU	5	23,360,633	0	0	1	2,036,250	4	21,324,383
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	42	4,969,853,491	0	0	5	696,790,000	37	4,273,063,491
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	20	40,451,750	0	0	17	27,491,750	3	12,960,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	29	185,565,000	1	30,500,000	9	174,405,000	21	41,660,000
30501	ALAT KANTOR	442	3,724,206,680	48	661,110,362	176	1,817,731,863	314	2,567,585,179
30502	ALAT RUMAH TANGGA	13,517	27,539,605,801	769	2,698,131,931	2,461	5,968,025,728	11,825	24,269,712,004
30601	ALAT STUDIO	173	1,154,619,799	11	647,715,422	121	1,122,503,867	63	679,831,354
30602	ALAT KOMUNIKASI	74	281,743,650	0	0	17	36,615,000	57	245,128,650
30603	PERALATAN PEMANCAR	14	1,504,829,300	0	0	9	598,529,300	5	906,300,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	177	339,589,846	24	45,665,876	50	113,555,606	151	271,700,116
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	1,575,000	0	0	0	0	1	1,575,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	225	243,091,400	9	12,760,000	24	115,435,400	210	140,416,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10	34,955,500	0	0	5	18,130,500	5	16,825,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1	198,842,000	0	0	0	0	1	198,842,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	18	192,636,738	0	0	10	140,697,738	8	51,939,000
31001	KOMPUTER UNIT	306	3,757,594,043	14	228,696,432	160	1,664,679,237	160	2,321,611,238
31002	PERALATAN KOMPUTER	312	1,638,992,638	13	287,318,132	168	640,422,694	157	1,285,888,076
31502	ALAT PELINDUNG	1	2,250,000	0	0	1	2,250,000	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	51	361,406,054	0	0	36	297,606,084	15	63,799,970
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	3	17,000,000	0	0	3	17,000,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	109,738,000	0	0	0	0	3	109,738,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	48,233,000	0	0	1	733,000	1	47,500,000
133111	**Gedung dan Bangunan**	**103**	**283,715,334,589**	**13**	**33,491,743,064**	**25**	**50,339,900,926**	**91**	**266,867,176,727**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	85	135,121,475,269	13	32,780,928,782	25	50,339,900,926	73	117,562,503,125
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	17	147,766,176,320	0	710,814,282	0	0	17	148,476,990,602
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	827,683,000	0	0	0	0	1	827,683,000
134112	**Irigasi**	**1**	**135,946,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**135,946,000**
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	135,946,000	0	0	0	0	1	135,946,000
134113	**Jaringan**	**2**	**2,454,916,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2,454,916,000**
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	2,256,361,000	0	0	0	0	1	2,256,361,000
50310	INSTALASI LAIN	1	198,555,000	0	0	0	0	1	198,555,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**3**	**10,000,000**	**369**	**55,234,813**	**4**	**29,975,000**	**368**	**35,259,813**
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	368	23,587,813	1	19,975,000	367	3,612,813
31001	KOMPUTER UNIT	1	6,000,000	0	0	1	6,000,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	2	4,000,000	0	0	2	4,000,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	1	31,647,000	0	0	1	31,647,000
TOTAL			**2,458,867,386,912**		**38,158,876,032**		**63,824,514,943**		**2,433,201,748,001**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**67,675**	**2,126,179,700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,675**	**2,126,179,700,000**
20101	TANAH PERSIL	54,506	1,717,282,250,000	0	0	0	0	54,506	1,717,282,250,000
20102	TANAH NON PERSIL	13,169	408,897,450,000	0	0	0	0	13,169	408,897,450,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**11,866**	**44,479,610,831**	**693**	**4,524,684,248**	**2,836**	**13,248,056,710**	**9,723**	**35,756,238,369**
30103	ALAT BANTU	5	23,360,633	0	0	1	2,036,250	4	21,324,383
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	42	4,969,853,491	0	0	5	696,790,000	37	4,273,063,491
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19	39,501,750	0	0	16	26,541,750	3	12,960,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	29	185,565,000	1	30,500,000	9	174,405,000	21	41,660,000
30501	ALAT KANTOR	432	3,716,221,024	36	657,474,706	174	1,816,821,207	294	2,556,874,523
30502	ALAT RUMAH TANGGA	10,233	25,757,247,108	600	2,627,997,823	2,045	5,779,331,220	8,788	22,605,913,711
30601	ALAT STUDIO	172	1,154,019,799	10	647,215,422	120	1,121,903,867	62	679,331,354
30602	ALAT KOMUNIKASI	74	281,743,650	0	0	17	36,615,000	57	245,128,650
30603	PERALATAN PEMANCAR	14	1,504,829,300	0	0	9	598,529,300	5	906,300,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	121	288,850,703	17	39,516,733	43	107,406,463	95	220,960,973
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	1,575,000	0	0	0	0	1	1,575,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	25	200,213,400	9	12,760,000	24	115,435,400	10	97,538,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10	34,955,500	0	0	5	18,130,500	5	16,825,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1	198,842,000	0	0	0	0	1	198,842,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	18	192,636,738	0	0	10	140,697,738	8	51,939,000
31001	KOMPUTER UNIT	306	3,757,594,043	14	228,696,432	160	1,664,679,237	160	2,321,611,238
31002	PERALATAN KOMPUTER	304	1,633,357,638	6	280,523,132	158	631,877,694	152	1,282,003,076
31502	ALAT PELINDUNG	1	2,250,000	0	0	1	2,250,000	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	51	361,406,054	0	0	36	297,606,084	15	63,799,970
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	3	17,000,000	0	0	3	17,000,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	109,738,000	0	0	0	0	3	109,738,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	47,500,000	0	0	0	0	1	47,500,000
133111	**Gedung dan Bangunan**	**100**	**283,700,274,589**	**13**	**33,491,743,064**	**24**	**50,336,840,926**	**89**	**266,855,176,727**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	82	135,106,415,269	13	32,780,928,782	24	50,336,840,926	71	117,550,503,125
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	17	147,766,176,320	0	710,814,282	0	0	17	148,476,990,602
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	827,683,000	0	0	0	0	1	827,683,000
134112	**Irigasi**	**1**	**135,946,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**135,946,000**
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	135,946,000	0	0	0	0	1	135,946,000
134113	**Jaringan**	**2**	**2,454,916,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2,454,916,000**
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	2,256,361,000	0	0	0	0	1	2,256,361,000
50310	INSTALASI LAIN	1	198,555,000	0	0	0	0	1	198,555,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**3**	**10,000,000**	**369**	**55,234,813**	**4**	**29,975,000**	**368**	**35,259,813**
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	368	23,587,813	1	19,975,000	367	3,612,813
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1	6,000,000	0	0	1	6,000,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	2	4,000,000	0	0	2	4,000,000	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	1	31,647,000	0	0	1	31,647,000
TOTAL			**2,456,960,447,420**		**38,071,662,125**		**63,614,872,636**		**2,431,417,236,909**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	705,000
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	22,211,656
1010301003	Penjepit Kertas	880,602
1010301005	Buku Tulis	118,250
1010301006	Ordner Dan Map	5,925,490
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	76,670
1010301010	Alat Perekat	422,688
1010301012	Staples	828,504
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	108,661,594
1010302001	Kertas HVS	8,245,407
1010302002	Berbagai Kertas	2,747,110
1010304004	Tinta/Toner Printer	14,589,417
1010306003	Stop Kontak	1,365,375
1010306004	Saklar	792,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	138,822,371
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	7,998,660
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	471,177,799
Jumlah Barang Konsumsi		**785,568,593**
TOTAL		**785,568,593**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 06/05/26 7:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_uappa

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	785,568,593
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
JUMLAH		**785,568,593**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:51 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**3,319**	**1,772,511,092**	**(1,697,842,540)**	**51,498,472**	**(1,646,344,068)**	**126,167,024**
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	(950,000)	950,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	20	10,710,656	(5,888,566)	(1,257,132)	(7,145,698)	3,564,958
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,037	1,663,798,293	(1,649,474,925)	66,254,900	(1,583,220,025)	80,578,268
30601	ALAT STUDIO	1	500,000	(60,000)	10,000	(50,000)	450,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	56	50,739,143	(13,991,915)	(10,147,830)	(24,139,745)	26,599,398
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	200	42,878,000	(24,118,800)	(5,359,800)	(29,478,600)	13,399,400
31002	PERALATAN KOMPUTER	5	3,885,000	(2,747,500)	437,500	(2,310,000)	1,575,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	(610,834)	610,834	0	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**2**	**12,000,000**	**(3,643,600)**	**(56,400)**	**(3,700,000)**	**8,300,000**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	12,000,000	(3,643,600)	(56,400)	(3,700,000)	8,300,000
JUMLAH		**3,321**	**1,784,511,092**	**(1,701,486,140)**	**51,442,072**	**(1,650,044,068)**	**134,467,024**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 06/05/26 12:36 AM
Tanggal : 06/05/26 7:51 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	**Tanah**	**67,675**	**2,126,179,700,000**	**0**	**0**	**0**	**2,126,179,700,000**
20101	TANAH PERSIL	54,506	1,717,282,250,000	0	0	0	1,717,282,250,000
20102	TANAH NON PERSIL	13,169	408,897,450,000	0	0	0	408,897,450,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**9,723**	**35,756,238,369**	**(34,443,154,221)**	**3,591,639,630**	**(30,851,514,591)**	**4,904,723,778**
30103	ALAT BANTU	4	21,324,383	(3,628,801)	(2,319,109)	(5,947,910)	17,695,582
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	37	4,273,063,491	(4,195,701,712)	248,922,142	(3,946,779,570)	77,361,779
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	12,960,000	(39,501,750)	26,541,750	(12,960,000)	(26,541,750)
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	1,350,000	(135,000)	(270,000)	(405,000)	1,215,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	21	41,660,000	(96,963,126)	56,765,626	(40,197,500)	(55,303,126)
30501	ALAT KANTOR	294	2,556,874,523	(2,379,589,603)	484,816,760	(1,894,772,843)	177,284,920
30502	ALAT RUMAH TANGGA	8,788	22,605,913,711	(20,617,755,482)	652,245,301	(19,965,510,181)	1,988,158,229
30601	ALAT STUDIO	62	679,331,354	(510,462,909)	220,717,200	(289,745,709)	168,868,445
30602	ALAT KOMUNIKASI	57	245,128,650	(218,074,630)	(4,789,460)	(222,864,090)	27,054,020
30603	PERALATAN PEMANCAR	5	906,300,000	(1,004,232,995)	159,432,995	(844,800,000)	(97,932,995)
30701	ALAT KEDOKTERAN	95	220,960,973	(173,825,560)	15,752,757	(158,072,803)	47,135,413
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	1,575,000	(1,575,000)	0	(1,575,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	10	97,538,000	(60,157,938)	17,756,188	(42,401,750)	37,380,062
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	16,825,000	(8,947,619)	4,050,953	(4,896,666)	7,877,381
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1	198,842,000	(69,594,700)	(19,884,200)	(89,478,900)	129,247,300
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	8	51,939,000	(129,017,211)	77,078,211	(51,939,000)	(77,078,211)
31001	KOMPUTER UNIT	160	2,321,611,238	(3,264,238,516)	1,177,096,836	(2,087,141,680)	(942,627,278)
31002	PERALATAN KOMPUTER	152	1,282,003,076	(1,481,194,449)	430,019,505	(1,051,174,944)	(199,191,373)
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	(675,000)	675,000	0	(675,000)
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	15	63,799,970	(81,910,907)	52,660,925	(29,249,982)	(18,110,937)
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	(7,650,000)	7,650,000	0	(7,650,000)
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	109,738,000	(50,821,313)	(13,279,750)	(64,101,063)	58,916,687
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	47,500,000	(47,500,000)	0	(47,500,000)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**89**	**266,855,176,727**	**(61,966,374,537)**	**(7,064,274,451)**	**(69,030,648,988)**	**197,824,527,739**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	71	117,550,503,125	(30,598,334,982)	(2,702,750,599)	(33,301,085,581)	86,952,168,143
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	17	148,476,990,602	(31,119,734,655)	(4,328,416,532)	(35,448,151,187)	117,357,255,947
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	827,683,000	(248,304,900)	(33,107,320)	(281,412,220)	579,378,100
134112	**Irigasi**	**1**	**135,946,000**	**(89,170,178)**	**(18,710,329)**	**(107,880,507)**	**28,065,493**
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	135,946,000	(89,170,178)	(18,710,329)	(107,880,507)	46,775,822
134113	**Jaringan**	**2**	**2,454,916,000**	**(505,647,163)**	**(96,120,025)**	**(601,767,188)**	**1,853,148,812**
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	2,256,361,000	(366,658,663)	(56,409,025)	(423,067,688)	1,889,702,337
50310	INSTALASI LAIN	1	198,555,000	(138,988,500)	(39,711,000)	(178,699,500)	59,566,500
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**368**	**35,259,813**	**(10,000,000)**	**(2,290,216)**	**(12,290,216)**	**22,969,597**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025090500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
30502	ALAT RUMAH TANGGA	367	3,612,813	0	(3,612,813)	(3,612,813)	3,612,813
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	(6,000,000)	6,000,000	0	(6,000,000)
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	(4,000,000)	4,000,000	0	(4,000,000)
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	31,647,000	0	(8,677,403)	(8,677,403)	31,647,000
JUMLAH		**77,858**	**2,431,417,236,909**	**(97,014,346,099)**	**(3,589,755,391)**	**(100,604,101,490)**	**2,334,402,890,810**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

REKONSILIASI SAKTI - SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Status Rekonsiliasi	Tanggal SHR	Jumlah Data TDK			Proses SHR / Download SHR
							TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail	
1	02509	299056	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-02-03 16:00:28	0	0		Download
2	02509	299063	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
3	02509	299070	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 17:00:27	0	0		Download
4	02509	299075	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 21:00:29	0	0		Download
5	02509	299079	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 09:00:23	0	0		Download
6	02509	299085	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 22:00:23	0	0		Download
7	02509	299088	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
8	02509	299092	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 16:00:31	0	0		Download
9	02509	299096	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
10	02509	299103	KANTOR	2025-12	Rekon selesai Hasil	2026-01-22 10:00:29	0	0		

			KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		Rekonsiliasi Terbentuk					Download
11	02509	299106	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 19:00:24	0	0		Download
12	02509	299111	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 12:00:24	0	0		Download
13	02509	299117	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 11:00:31	0	0		Download
14	02509	299122	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 16:00:24	0	0		Download
15	02509	299127	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 10:00:24	0	0		Download
16	02509	299134	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 11:00:28	0	0		Download
17	02509	299139	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
18	02509	299143	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 08:00:24	0	0		Download
19	02509	299149	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 13:00:35	0	0		Download
20	02509	299156	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 16:00:29	0	0		Download

21	02509	299159	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
22	02509	299162	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 16:00:27	0	0		Download
23	02509	299166	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 12:00:31	0	0		Download
24	02509	299169	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
25	02509	299172	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 10:00:29	0	0		Download
26	02509	299175	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 00:00:22	0	0		Download
27	02509	309130	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 17:00:25	0	0		Download
28	02509	352544	Asrama Haji Surabaya	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 22:53:48	0	0		Download
29	02509	417807	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 21:00:23	0	0		Download
30	02509	417824	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 18:00:26	0	0		Download
31	02509	417830	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 14:00:36	0	0		Download

32	02509	417834	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 08:00:24	0	0		Download
33	02509	417856	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 12:00:31	0	0		Download
34	02509	417866	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 08:00:25	0	0		Download
35	02509	417891	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
36	02509	417894	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 11:56:07	0	0		Download
37	02509	417908	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 10:00:24	0	0		Download
38	02509	417984	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 12:00:33	0	0		Download
39	02509	418008	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
40	02509	650085	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 08:00:24	0	0		Download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299056 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	126,612,000	126,612,000	0
2	Belanja	121,232,780	121,232,780	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03 Februari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BANYUWANGI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299063 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	127,903,000	127,903,000	0
2	Belanja	127,894,070	127,894,070	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299070 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	216,964,000	216,964,000	0
2	Belanja	216,252,315	216,252,315	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299075 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	116,964,000	116,964,000	0
2	Belanja	116,964,000	116,964,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299079 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	167,535,000	167,535,000	0
2	Belanja	147,869,472	147,869,472	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	30,794,100	30,794,100	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299085 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	182,969,000	182,969,000	0
2	Belanja	182,522,262	182,522,262	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299088 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	67,211,000	67,211,000	0
2	Belanja	66,242,900	66,242,900	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299092 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	176,964,000	176,964,000	0
2	Belanja	169,991,715	169,991,715	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299096 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	112,942,000	112,942,000	0
2	Belanja	112,478,331	112,478,331	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299103 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	203,183,000	203,183,000	0
2	Belanja	190,485,350	190,485,350	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	19,632,000	19,632,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299106 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	167,185,000	167,185,000	0
2	Belanja	156,956,458	156,956,458	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299111 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	171,548,000	171,548,000	0
2	Belanja	171,153,179	171,153,179	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299117 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	85,739,000	85,739,000	0
2	Belanja	78,741,082	78,741,082	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299122 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	192,943,000	192,943,000	0
2	Belanja	192,789,589	192,789,589	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299127 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	166,801,000	166,801,000	0
2	Belanja	164,153,105	164,153,105	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299134 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	192,943,000	192,943,000	0
2	Belanja	192,075,084	192,075,084	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299139 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	167,943,000	167,943,000	0
2	Belanja	166,157,880	166,157,880	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299143 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	96,906,000	96,906,000	0
2	Belanja	96,508,000	96,508,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299149 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	122,564,000	122,564,000	0
2	Belanja	118,220,200	118,220,200	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299156 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	124,803,000	124,803,000	0
2	Belanja	124,333,778	124,333,778	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PACITAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299159 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	101,919,000	101,919,000	0
2	Belanja	101,919,000	101,919,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299162 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	113,474,000	113,474,000	0
2	Belanja	104,617,071	104,617,071	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299166 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	172,463,000	172,463,000	0
2	Belanja	172,338,842	172,338,842	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	14,245,000	14,245,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299169 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	177,612,000	177,612,000	0
2	Belanja	175,976,712	175,976,712	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299172 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	132,703,000	132,703,000	0
2	Belanja	130,220,039	130,220,039	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299175 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	161,753,000	161,753,000	0
2	Belanja	161,752,600	161,752,600	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 309130 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	111,504,000	111,504,000	0
2	Belanja	85,399,571	85,399,571	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 352544 - Asrama Haji Surabaya

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	16,231,720,000	16,231,720,000	0
2	Belanja	16,172,729,940	16,172,729,940	0
3	Pengembalian Belanja	-236	-236	0
4	Estimasi Pendapatan	3,500,000,000	3,500,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	6,389,379,774	6,389,379,774	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417807 - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	39,733,050,000	39,733,050,000	0
2	Belanja	39,474,028,058	39,474,028,058	0
3	Pengembalian Belanja	-118,873,384	-118,873,384	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	788,400	788,400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417824 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	84,557,000	84,557,000	0
2	Belanja	79,576,993	79,576,993	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417830 - KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	145,547,000	145,547,000	0
2	Belanja	145,436,369	145,436,369	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417834 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:49
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	75,025,000	75,025,000	0
2	Belanja	74,975,224	74,975,224	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN TUBAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417856 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	197,943,000	197,943,000	0
2	Belanja	193,547,700	193,547,700	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BOJONEGORO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417866 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	115,988,000	115,988,000	0
2	Belanja	114,179,822	114,179,822	0
3	Pengembalian Belanja	-165,750	-165,750	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417891 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	180,984,000	180,984,000	0
2	Belanja	178,093,233	178,093,233	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BOJONEGORO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417894 - KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:45
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	106,892,000	106,892,000	0
2	Belanja	106,626,117	106,626,117	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417908 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	160,066,000	160,066,000	0
2	Belanja	155,990,876	155,990,876	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417984 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	157,612,000	157,612,000	0
2	Belanja	157,511,201	157,511,201	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 418008 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	168,327,000	168,327,000	0
2	Belanja	152,799,650	152,799,650	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 650085 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 06/05/26 7:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	170,587,000	170,587,000	0
2	Belanja	168,958,076	168,958,076	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

		Objek Penelaahan		**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A						
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran						
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN						
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab		√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE		√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan		√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal		√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual		√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas		√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun		√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI						
		Kesesuaian Saldo		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI		√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.						
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI						
		Persamaan Dasar Akuntansi		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas		√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI						
		To Do List		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			√	Tidak
2		Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√		Ya
3		Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
4		Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			√	Tidak
5		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
6		Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
7		Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			√	Tidak
8		Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			√	Tidak
9		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
10		Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			√	Tidak
11		Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

12		Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah						
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?			√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			√	Tidak
		a. Pagu/DIPA			√	Tidak
		b. Estimasi PNBP			√	Tidak
		c. Belanja			√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		e. Pendapatan			√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		g. Kas BLU			√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran			√	Tidak
		i. Kas Hibah			√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung			√	Tidak
		Rekon Internal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal			√	Tidak
		Daftar MONSAKTI		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?			√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			√	Tidak
6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL						
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal			√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)			√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			√	Tidak
		Terkait Satker BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			√	Tidak
		Hibah Langsung		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			√	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			√	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			√	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**Rp.**		
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**Rp.**		
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			√	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			√	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			√	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA						
		Pengecekan Pos-pos Neraca		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√		Ya

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

2		Saldo pada neraca bernilai wajar		√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√		Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
		Pengecekan Pos-pos LO		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			√	Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			√	Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
		Pengecekan Pos-pos LPE		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Ya
2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			√	Ya
		Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp..... dengan dokumen sumber BAST				
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)						
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB			√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN						
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "AD		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			√	Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			√	Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			√	Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)			√	Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			√	Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			√	Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			√	Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417807) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Penyelenggara Haji dan Umrah)
Kode dan Nama Eselon I : (09) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah
Kode dan Nama K/L : (25) Kementerian Agama

3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU						
		LPSAL BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			√	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			√	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			√	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			√	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			√	Ya
		LAK BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			√	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			√	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			√	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			√	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN						
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang						

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

SANGIDUN, S.Kom, M.AP
NIP. 198207062011011005

Sidoarjo, 6 Mei 2026
Penyusun Laporan Keuangan

Rochmad, S.Ag
NIP. 197404072007011032

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2025

TINGKAT WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40
VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.100.145.539 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp121.100.145.539 atau mencapai -87,12 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp-139.000.800.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp144.045.478.578 atau mencapai 86,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp166.537.169.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp474.503.981.615 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.131.396.386; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp472.046.765.878 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp325.819.351.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp338.729.260 dan Rp474.165.252.355

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp120.992.270.641 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp129.678.753.310 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp250.671.023.951, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-717.691.837 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.631.336.560.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp-454.648.064.881, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-9.631.336.560 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 2.079.296.595 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 27.069.227.439 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp-435.130.877.407

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajaka	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	(139.000.800.000)	121.100.145.539	(87,12)	123.713.195.442
JUMLAH PENDAPATAN		**(139.000.800.000)**	**121.100.145.539**	**(87,12)**	**123.713.195.442**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	23.020.884.000	15.342.000.000	66,64	49.141.023.710
Belanja Barang	B.2.2	114.980.429.000	100.236.585.842	87,18	134.712.013.285
Belanja Modal	B.2.3	28.535.856.000	28.466.892.736	99,76	8.851.794.540
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BE		**166.537.169.000**	**144.045.478.578**	**86,49**	**192.704.831.535**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	2.131.396.386	2.288.874.597
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**2.131.396.386**	**2.596.874.597**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	237.527.541.816	231.977.132.816
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	66.468.453.098	60.097.834.048
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	279.335.769.580	279.891.203.400
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	431.518.202	409.918.202
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	21.448.545.272	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(133.165.062.090)	(119.124.984.245)
Jumlah Aset Tetap		**472.046.765.878**	**453.251.104.221**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	40.139.125	40.139.125
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	155.281.998	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	280.908.486	601.719.275
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(150.510.258)	(158.496.737)
Jumlah Aset Lainnya		**325.819.351**	**483.361.663**
JUMLAH ASET		**474.503.981.615**	**456.331.340.481**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	338.729.260	1.683.275.600
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**338.729.260**	**1.683.275.600**
JUMLAH KEWAJIBAN		**338.729.260**	**1.683.275.600**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	474.165.252.355	454.648.064.881
JUMLAH EKUTAS		**474.165.252.355**	**454.648.064.881**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**474.503.981.615**	**456.331.340.481**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	120.992.270.641	123.708.087.300
Jumlah Pendapatan		**120.992.270.641**	**123.708.087.300**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	15.342.000.000	49.141.023.710
Beban Persediaan	D.4	1.660.270.015	1.748.910.370
Beban Barang dan Jasa	D.5	67.466.798.773	76.815.306.492
Beban Pemeliharaan	D.6	11.592.972.342	6.070.921.222
Beban Perjalanan Dinas	D.7	19.006.947.958	34.494.811.294
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	4.625.600	16.294.104
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	14.605.138.622	14.822.340.233
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**129.678.753.310**	**183.109.607.425**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**250.671.023.951**	**(59.401.520.125)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Beban Pelepasan Aset	D.12	(901.668.312)	(369.213.914)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	70.395.448	3.177.091.142
Beban dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	113.581.027	130.386.192
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**(717.691.837)**	**2.938.263.420**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(9.631.336.560)**	**56.724.029.089**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**(9.631.336.560)**	**56.724.029.089**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**(454.648.064.881)**	**(439.359.816.619)**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(9.631.336.560)**	**(56.724.029.089)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**2.079.296.595**	**188.714.133**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	2.387.296.595	(290.318.867)
Koreksi Lain-Lain	E.46	(308.000.000)	479.033.000
Jumlah		**2.079.296.595**	**188.714.133**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	27.069.227.439	71.823.563.218
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		19.517.187.474	15.288.248.262
EKUITAS AKHIR	E.6	**(435.130.877.407)**	**(424.071.568.357)**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan. Pengintregasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan literatur, penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Kementerian dalam Ditjen-ditjen dan seterusnya sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian Kementerian Agama termasuk organisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Kementerian Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012. Penyempurnaan itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".” Visi ini mencerminkan tujuan Kemenag dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1 Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Beragama;
2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4 Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
b. Ekoteologi;
c. Layanan keagamaan berdampak;
d. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
e. Pesantren berdaya;
f. pemberdayaan ekonomi umat;
g. Sukses penyelenggaraan haji; dan;
h. Digitalisasi tata kelola.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penggabungan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi Satker Sebelumnya. Modul dalam aplikasi SAKTI;

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator;

Laporan Keuangan 2025 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2025 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) adalah 39 satuan kerja

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	299089	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO		1		1
2	299052	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO		1		1
3	299098	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		1		1
4	299057	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI		1		1

5	417825	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK		1		1
6	299112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR		1		1
7	417832	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO		1		1
8	299140	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI		1		1
9	299107	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI		1		1
10	299093	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI		1		1
11	299128	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG		1		1
12	299135	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN		1		1
13	299170	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG		1		1
14	299145	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN		1		1
15	299077	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO		1		1
16	418002	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER		1		1
17	309126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO		1		1
18	650080	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU		1		1
19	417885	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO		1		1
20	417801	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		1		1
21	417982	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO		1		1
22	299160	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO		1		1
23	299071	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN		1		1
24	299157	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN		1		1
25	417817	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA		1		1
26	417854	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN		1		1
27	299064	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG		1		1
28	299150	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN		1		1
29	299104	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG		1		1
30	299081	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG		1		1
31	299118	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK		1		1
32	299167	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP		1		1
33	417905	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG		1		1
34	417863	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO		1		1

35	417892	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN		1		1
36	299086	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN		1		1
37	299163	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN		1		1
38	299173	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN		1		1
39	299124	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK		1		1
Jumlah				**39**		**39**

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Akuntansi

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	139.000.800.000	139.000.800.000
Jumlah Pendapatan	**139.000.800.000**	**139.000.800.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	41.892.000.000	23.020.884.000
Belanja Barang	112.767.265.000	114.980.429.000
Belanja Modal	33.463.000.000	28.535.856.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**188.122.265.000**	**166.537.169.000**

Pendapatan Rp121.100.145.539

B.1 Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.100.145.539 atau mencapai -87,12 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp-139.000.800.000. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp121.084.545.539. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pengembalian belanja pegawai, barang tahun yang lalu , pendapatan jasa kantor urusan agama (Kegiatan Bimbingan Pernikahan) dengan rincian

Rincian Estimasi dan Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	139.000.800.000	121.084.545.539	87,11
Jumlah	**139.000.800.000**	**121.084.545.539**	**87,11**

Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 2,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	121.084.545.539	123.713.195.442	(2,12)
Jumlah	**121.084.545.539**	**123.713.195.442**	**(2,12)**

Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp121.100.145.539

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp121.100.145.539 dan Rp123.713.195.442. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2,12 dari TA 2024 Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pengembalian belanja pegawai, barang tahun yang lalu , pendapatan jasa kantor urusan agama (Kegiatan Bimbingan Pernikahan) . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	121.084.545.539	123.713.195.442	(2,12)
Jumlah	**121.084.545.539**	**123.713.195.442**	**(2,12)**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.526.250	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	700.000	5.108.000	(86,30)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	4.653.200	-	-
Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	120.993.600.000	123.720.600.000	(2,20)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	10.000.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	14.270.641	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	59.717.848	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	677.600	142	477.083,10
Jumlah	**121.100.145.539**	**123.725.708.142**	**(2,12)**

Belanja Rp144.045.478.578

B.2 Belanja

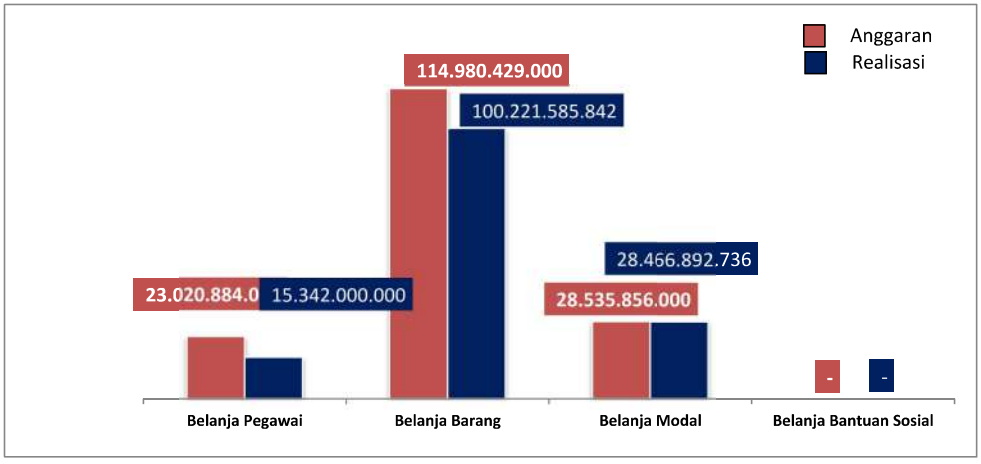
Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp144.045.478.578 atau 86,49 % dari anggaran belanja sebesar Rp.166.537.169.000 Rincian anggaran dan belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	23.020.884.000	15.342.000.000	66,64
Belanja Barang	114.980.429.000	100.236.585.842	87,18
Belanja Modal	28.535.856.000	28.466.892.736	99,76
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**166.537.169.000**	**144.045.478.578**	**86,49**

Komposisi anggaran dan belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 25,26% Kenaikan realisasi belanja tahun berjalan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhitung mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS uang makan PNS uang lembur PNS dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023 tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. dan terbayarnya tenaga PPPK . Berikut rincian belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	15.342.000.000	49.141.023.710	(68,78)
Belanja Barang	100.221.585.842	134.712.013.285	(25,60)
Belanja Modal	28.466.892.736	8.851.794.540	221,59
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**144.030.478.578**	**192.704.831.535**	**(25,26)**

Belanja Pegawai Rp15.342.000.000

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.342.000.000 dan Rp49.141.023.710. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 68,78 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Penurunan realisasi belanja pegawai karena belanja gaji pokok anggaran terpusat DIPA Sekretariat Jenderal

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	15.342.000.000	49.146.000.000	(68,78)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	**15.342.000.000**	**49.146.000.000**	**(68,78)**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	4.976.290	(100,00)
Jumlah Belanja	**15.342.000.000**	**49.141.023.710**	**(68,78)**

Belanja Barang Rp100.236.585.842

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp100.236.585.842 dan Rp134.712.013.285. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 25,60% dari TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	23.516.645.784	26.543.691.073	(11,40)
Belanja Barang Non Operasional	17.709.267.646	3.846.376.518	360,41
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	376.213.931	277.069.794	35,78
Belanja Jasa	26.789.861.331	58.004.142.644	(53,81)
Belanja Pemeliharaan	11.592.596.842	6.003.035.334	93,11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20.320.705.958	40.060.596.294	(49,28)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	4.000.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**100.309.291.492**	**134.734.911.657**	**(25,55)**
Pengembalian Belanja	87.705.650	22.898.372	283,02
Jumlah Belanja	**100.221.585.842**	**134.712.013.285**	**(25,60)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Belanja Modal Rp28.466.892.736

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp28.466.892.736 dan Rp8.851.794.540. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 221,59% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**28.490.284.316**	**8.851.794.540**	**221,86**
Pengembalian Belanja	23.391.580	-	-
Jumlah Belanja	**28.466.892.736**	**8.851.794.540**	**221,59**

Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp5.818.485.784

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.818.485.784 dan Rp1.065.383.080, mengalami kenaikan sebesar 446,14 % bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.818.485.784	1.065.383.080	446,14
Jumlah Belanja Kotor	**5.818.485.784**	**1.065.383.080**	**446,14**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**5.818.485.784**	**1.065.383.080**	**446,14**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp22.671.798.532

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.671.798.532 dan Rp7.786.411.460 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 190,87% dibandingkan TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.471.936.852	7.786.411.460	175,76
Jumlah Belanja Kotor	**22.671.798.532**	**7.786.411.460**	**191,17**
Pengembalian Belanja	23.391.580	-	-
Jumlah Belanja	**22.648.406.952**	**7.786.411.460**	**190,87**

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Nama Satker	Jumlah
1	Kas dibendahara pemgeluaran	-
2	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	-
3	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	-
4	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	-
5	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO	-
6	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG	-
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN	-
8	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO	-
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI	-
10	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR	-
11	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG	-
12	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	-
13	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR	-
14	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK	-
15	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK	-
16	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG	-
17	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	-
18	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI	-
19	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	-
20	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN	-
21	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN	-
22	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	-
23	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN	-
24	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP	-
25	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG	-
26	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN	-
27	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO	-
28	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	-
29	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	-
30	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK	-
31	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO	-
32	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN	-
33	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	-
34	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	-
35	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	-
36	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG	-
37	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO	-
38	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER	-
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	-
Jumlah		

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

dan Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp -	Rp -
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp308.000.000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	308.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**308.000.000**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp2.131.396.386

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.131.396.386 dan Rp2.288.874.597. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
Barang Konsumsi	2.131.305.386	2.287.782.497
Jumlah	**2.131.396.386**	**2.288.248.997**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		**-**	**-**

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp237.527.541.816

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp237.527.541.816 dan Rp231.977.132.816. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**231.977.132.816**
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**233.247.132.816**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	0	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp66.468.453.098

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp66.468.453.098 dan Rp60.097.834.048. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**60.097.834.048**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(29.642.610)
Saldo per 31 Desember 2025	**60.964.303.208**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(55.985.739.179)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**4.978.564.029**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Penjelasan mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap terdapat pada satker;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp279.335.769.580

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp279.335.769.580 dan Rp279.891.203.400. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**279.891.203.400**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**279.891.203.400**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(77.137.989.511)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**202.753.213.889**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp431.518.202

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.431.518.202 dan Rp.409.918.202. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**409.918.202**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**409.918.202**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(41.333.400)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**368.584.802**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp21.448.545.272

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.21.448.545.272 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Satker Sekjen Tingkat Wilayah ada sebagai berikut; Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	805.697.500
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**5.684.554.500**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp133.165.062.090

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp133.165.062.090 dan Rp119.124.984.245. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	66.468.453.098	(55.985.739.179)	10.482.713.919
2	Gedung dan Bangunan	279.335.769.580	(77.137.989.511)	202.197.780.069
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	431.518.202	(41.333.400)	390.184.802
Akumulasi Penyusutan		**346.235.740.880**	**(133.165.062.090)**	**213.070.678.790**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Dengan Pihak Ketiga Rp0

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp40.139.125

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp40.139.125 dan Rp40.139.125. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam) berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**40.139.125**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**40.139.125**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(7.565.125)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**32.574.000**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp155.281.998

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp155.281.998 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp280.908.486

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp280.908.486 dan Rp601.719.275. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**601.719.275**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	29.206.734
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**630.926.009**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(142.945.133)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**487.980.876**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- -

Mutasi Kurang

- -

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Tagihan Penjualan

C.39 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp150.510.258 dan Rp158.496.737. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	40.139.125	(7.565.125)	32.574.000
Aset Lain-lain	280.908.486	(142.945.133)	137.963.353
Total	**321.047.611**	**(150.510.258)**	**170.537.353**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp338.729.260

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp338.729.260 dan Rp1.683.275.600. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	(183.447.262)	(1.683.275.600)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(155.281.998)	-
Total	**(338.729.260)**	**(1.683.275.600)**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan : Daftar Lampiran / Memo Penyesuaian

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Muka Kerja Tahun 2025 dari KPPN sdh nihil	*0*
Jumlah	*0*

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp474.165.252.355

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp474.165.252.355. dan Rp454.648.064.881. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan PajakRp120.992.270.641

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada dan adalah sebesar Rp120.992.270.641 dan Rp123.708.087.300. pendapatan perpajakan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar -2,20. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	(120.978.000.000)	(123.708.000.000,00)	(2,21)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	(14.270.641)	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	(87.300,00)	(100,00)
Jumlah	**(120.992.270.641,00)**	**(123.708.087.300,00)**	**(2,20)**

Beban Pegawai Rp15.342.000.000

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.342.000.000 dan Rp49.141.023.710.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 68,78 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	15.342.000.000	49.141.023.710	(68,78)
Jumlah	**15.342.000.000**	**49.141.023.710**	**(68,78)**

Beban Persediaan Rp1.660.270.015

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.660.270.015 dan Rp1.748.910.370

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	1.660.270.015	1.748.910.370	(5,07)
Jumlah Beban Persediaan	**1.660.270.015,00**	**1.748.910.370**	**(5,07)**

Beban Barang dan Jasa Rp67.466.798.773

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.466.798.773 dan Rp76.815.306.492.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12,17 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja barang dan jasa pada belanja sewa sdh tidak ada pada DIPA Masing2 Satker. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	21.501.299.715	25.000.274.127	(14,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.725.546.500	1.530.275.280	12,76
Beban Bahan	12.810.171.494	1.564.128.031	719,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	263.720.000	33.820.000	679,78
Beban Sewa	1.022.390.000	559.047.873	82,88
Jumlah	**67.466.798.773**	**76.815.306.492,00**	**(12,17)**

Beban Pemeliharaan Rp11.592.972.342

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.592.972.342 dan Rp6.070.921.222.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 90,96 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan perbaikan aset bmn masih bisa digunakan atau layak pakai Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.720.861.587	1.133.179.700	51,86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	59.999.800	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	375.500	2.083.600	(81,98)
Jumlah	**11.592.972.342**	**6.070.921.222**	**90,96**

Beban Perjalanan Dinas Rp19.006.947.958

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.006.947.958 dan Rp34.494.811.294

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 44,90 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas karena kegiatan atau program berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	3.174.584.208	3.569.610.565	(11,07)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.607.540.790	29.705.265.549	(54,19)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.375.074.000	706.498.000	94,63
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	849.748.960	513.437.180	65,50
Jumlah	**19.006.947.958,00**	**34.494.811.294**	**(44,90)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.625.600

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.625.600 dan Rp16.294.104

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 71,61 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehPenurunan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat rumah ibadah. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	160.000	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk	465.600	16.294.104,00	(97,14)
Jumlah	**4.625.600,00**	**16.294.104**	**(71,61)**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Kenaikan beban bantuan sosial bertambahnya penerima bantuan sosial untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang. Rincian Tahun

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp14.605.138.622

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.605.138.622 dan Rp14.822.340.233.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Jumah Penyusutan	*14.605.138.622*	*14.822.340.233*	*(1,47)*
Jumlah	**14.605.138.622**	**14.822.340.233**	**(1,47)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus/Beban Pelepasan Aset Rp-901.668.312

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/Beban Pelepasan Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-901.668.312 dan Rp-369.213.914

Rincian Surplus/Beban Pelepasan Aset Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(923.547.762)	(374.321.914,00)	147
Jumlah	**(906.321.512,00)**	**(369.213.914)**	**145**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp70.395.448

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp70.395.448 dan Rp3.177.091.142

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(59.717.848)	-	-
Jumlah	**(70.395.448,00)**	**(142)**	**49.574.159**

Beban dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp113.581.027

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp113.581.027 dan Rp130.386.192.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(113.581.027)	(130.386.192,00)	(12,89)
Jumlah	**(113.581.027,00)**	**(130.386.192)**	**(12,89)**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian Beban Penanganan Covid-19 TA 2025 dan 2024

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp-454.648.064.881,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-454.648.064.881,00 dan Rp.-439.359.816.619,00

Defisit LO Rp.-9.631.336.560,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-9.631.336.560,00 dan Rp.-56.724.029.089,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.079.296.595 dan Rp.188.714.133 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp2.387.296.595

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.387.296.595 dan Rp.-290.318.867.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.387.296.595
Jumlah	**2.387.296.595,0**

Koreksi Lain-Lain Rp-308.000.000

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-308.000.000 dan Rp.479.033.000. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	(308.000.000)
-	-
Jumlah	**(308.000.000,0)**

Transaksi Antar Entitas Rp27.069.227.439

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.27.069.227.439 dan Rp.71.823.563.218. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	144.045.478.578
Diterima dari Entitas Lain	(121.084.545.539)
Transfer Keluar	(16.471.931.157)
Transfer Masuk	18.869.513.557
Pengesahan Hibah Langsung	1.710.712.000
Jumlah	**27.069.227.439**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 144.045.478.578, sedangkan DDEL sebesar Rp 121.084.545.539

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-16.471.931.157 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp18.869.513.557 yang terdiri

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp-435.130.877.407

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-435.130.877.407,00 dan Rp.-424.071.568.357,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025030500KD

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**139,000,800,000**	**121,084,545,539**	**(17,916,254,461)**	**87.11**	**140,521,800,000**	**123,713,195,442**	**(16,808,604,558)**	**88.04**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	139,000,800,000	121,084,545,539	(17,916,254,461)	87.11	140,521,800,000	123,713,195,442	(16,808,604,558)	88.04
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**139,000,800,000**	**121,084,545,539**	**(17,916,254,461)**	**87.11**	**140,521,800,000**	**123,713,195,442**	**(16,808,604,558)**	**88.04**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	166,537,169,000	144,045,478,578	(22,491,690,422)	86.49	211,890,166,000	192,704,831,535	(19,185,334,465)	90.95
1. Belanja Pegawai	23,020,884,000	15,342,000,000	(7,678,884,000)	66.64	49,237,000,000	49,141,023,710	(95,976,290)	99.81
2. Belanja Barang	114,980,429,000	100,236,585,842	(14,743,843,158)	87.18	153,783,166,000	134,712,013,285	(19,071,152,715)	87.6
3. Belanja Modal	28,535,856,000	28,466,892,736	(68,963,264)	99.76	8,870,000,000	8,851,794,540	(18,205,460)	99.79
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025030500KD

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**166,537,169,000**	**144,045,478,578**	**(22,491,690,422)**	**86.49**	**211,890,166,000**	**192,704,831,535**	**(19,185,334,465)**	**90.95**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

UAPPAW : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	308,000,000	(308,000,000)	(100.00)
Persediaan	2,131,396,386	2,288,874,597	(157,478,211)	(6.88)
JUMLAH ASET LANCAR	**2,131,396,386**	**2,596,874,597**	**(465,478,211)**	**(17.92)**
ASET TETAP				
Tanah	237,527,541,816	231,977,132,816	5,550,409,000	2.39
Peralatan dan Mesin	66,468,453,098	60,097,834,048	6,370,619,050	10.60
Gedung dan Bangunan	279,335,769,580	279,891,203,400	(555,433,820)	(0.20)
Aset Tetap Lainnya	431,518,202	409,918,202	21,600,000	5.27
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21,448,545,272	0	21,448,545,272	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(133,165,062,090)	(119,124,984,245)	(14,040,077,845)	11.79
JUMLAH ASET TETAP	**472,046,765,878**	**453,251,104,221**	**18,795,661,657**	**4.15**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	40,139,125	40,139,125	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	155,281,998	0	155,281,998	0.00
Aset Lain-lain	280,908,486	601,719,275	(320,810,789)	(53.32)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(150,510,258)	(158,496,737)	7,986,479	(5.04)
JUMLAH ASET LAINNYA	**325,819,351**	**483,361,663**	**(157,542,312)**	**(32.59)**
JUMLAH ASET	**474,503,981,615**	**456,331,340,481**	**18,172,641,134**	**3.98**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	338,729,260	1,683,275,600	(1,344,546,340)	(79.88)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**338,729,260**	**1,683,275,600**	**(1,344,546,340)**	**(79.88)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**338,729,260**	**1,683,275,600**	**(1,344,546,340)**	**(79.88)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	474,165,252,355	454,648,064,881	19,517,187,474	4.29
JUMLAH EKUITAS	**474,165,252,355**	**454,648,064,881**	**19,517,187,474**	**4.29**
JUMLAH EKUITAS	**474,165,252,355**	**454,648,064,881**	**19,517,187,474**	**4.29**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**474,503,981,615**	**456,331,340,481**	**18,172,641,134**	**3.98**

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

UAPPAW : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : **(025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	120,992,270,641	123,708,087,300	(2,715,816,659)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	120,992,270,641	123,708,087,300	(2,715,816,659)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	120,992,270,641	123,708,087,300	(2,715,816,659)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	15,342,000,000	49,141,023,710	(33,799,023,710)	-
Beban Persediaan	1,660,270,015	1,748,910,370	(88,640,355)	-
Beban Barang dan Jasa	67,466,798,773	76,815,306,492	(9,348,507,719)	-
Beban Pemeliharaan	11,592,972,342	6,070,921,222	5,522,051,120	-
Beban Perjalanan Dinas	19,006,947,958	34,494,811,294	(15,487,863,336)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4,625,600	16,294,104	(11,668,504)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : **(025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14,605,138,622	14,822,340,233	(217,201,611)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	129,678,753,310	183,109,607,425	(53,430,854,115)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,686,482,669)	(59,401,520,125)	50,715,037,456	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(901,668,312)	(369,213,914)	(532,454,398)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	21,879,450	5,108,000	16,771,450	-
Beban Pelepasan Aset	923,547,762	374,321,914	549,225,848	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(43,185,579)	3,046,704,950	(3,089,890,529)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	70,395,448	3,177,091,142	(3,106,695,694)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	113,581,027	130,386,192	(16,805,165)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(944,853,891)	2,677,491,036	(3,622,344,927)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,631,336,560)	(56,724,029,089)	47,092,692,529	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,631,336,560)	(56,724,029,089)	47,092,692,529	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM
Halaman : 1
lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	454,648,064,881	439,359,816,619	15,288,248,262	3.48
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,631,336,560)	(56,724,029,089)	47,092,692,529	(83.02)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,079,296,595	188,714,133	1,890,582,462	1,001.82
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	2,387,296,595	(290,318,867)	2,677,615,462	(922.3)
LAIN-LAIN	(308,000,000)	479,033,000	(787,033,000)	(164.3)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	27,069,227,439	71,823,563,218	(44,754,335,779)	(62.31)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	19,517,187,474	15,288,248,262	4,228,939,212	27.66
EKUITAS AKHIR	474,165,252,355	454,648,064,881	19,517,187,474	4.29

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 03**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025030500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 12:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	41,892,000,000	23,020,884,000	15,342,000,000	0	15,342,000,000	66.64	7,678,884,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	41,892,000,000	23,020,884,000	15,342,000,000	0	15,342,000,000	66.64	7,678,884,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	41,892,000,000	23,020,884,000	15,342,000,000	0	15,342,000,000	66.64	7678884000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,477,707,000	21,823,031,000	21,490,892,257	16,794,889	21,474,097,368	98.4	348,933,632
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,769,688,000	1,733,848,000	1,726,050,000	503,500	1,725,546,500	99.52	8,301,500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	299,900,000	299,703,527	0	299,703,527	99.93	196,473
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	29,247,395,000	23,856,779,000	23,516,645,784	17,298,389	23,499,347,395	99.28	357,431,605
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	18,419,686,000	13,233,607,000	12,810,271,494	100,000	12,810,171,494	96.8	423,435,506
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	328,088,000	637,902,000	587,626,000	0	587,626,000	92.12	50,276,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,000,000	265,850,000	263,720,000	0	263,720,000	99.2	2,130,000
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	44,500,000	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	1,530,500,000	1,182,000,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	100	0
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	3,000,000	0	0	0	0	0	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	83,083,000	2,838,401,000	2,831,650,152	0	2,831,650,152	99.76	6,750,848
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,447,857,000	18,191,760,000	17,709,267,646	100,000	17,709,167,646	83.98	482,592,354
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	231,661,000	377,422,000	376,213,931	0	376,213,931	99.68	1,208,069
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	231,661,000	377,422,000	376,213,931	0	376,213,931	99.68	1,208,069
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,232,198,000	1,158,421,000	1,113,906,790	3,254,337	1,110,652,453	95.88	47,768,547
522112	Belanja Langganan Telepon	502,768,000	543,788,000	540,259,905	4,891,324	535,368,581	98.45	8,419,419
522113	Belanja Langganan Air	553,693,000	310,732,000	285,775,379	0	285,775,379	91.97	24,956,621
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	810,186,000	790,230,000	776,632,187	288,600	776,343,587	98.24	13,886,413
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	50,000,000	49,500,000	0	49,500,000	99	500,000
522141	Belanja Sewa	700,387,000	1,044,910,000	1,037,390,000	0	1,037,390,000	99.28	7,520,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 03**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025030500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 12:46 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522151	Belanja Jasa Profesi	21,822,886,000	22,663,615,000	22,022,148,000	2,415,000	22,019,733,000	97.16	643,882,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	261,200,000	971,244,000	964,249,070	0	964,249,070	99.28	6,994,930
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	25,883,318,000	27,532,940,000	26,789,861,331	10,849,261	26,779,012,070	97.41	753,927,930
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,243,729,000	9,580,265,000	9,537,891,255	0	9,537,891,255	99.56	42,373,745
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,000,000	333,860,000	333,844,000	0	333,844,000	100	16,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,125,149,000	1,729,542,000	1,720,861,587	0	1,720,861,587	99.5	8,680,413
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,378,878,000	11,643,667,000	11,592,596,842	0	11,592,596,842	99.69	51,070,158
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,654,230,000	4,131,794,000	3,176,142,208	1,558,000	3,174,584,208	76.83	957,209,792
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,947,061,000	25,977,336,000	14,919,740,790	57,900,000	14,861,840,790	57.21	11,115,495,210
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,890,065,000	2,001,560,000	1,375,074,000	0	1,375,074,000	68.7	626,486,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,060,800,000	1,248,171,000	849,748,960	0	849,748,960	68.08	398,422,040
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	33,552,156,000	33,358,861,000	20,320,705,958	59,458,000	20,261,247,958	67.7	13,097,613,042
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	100	0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	22,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	22,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	112,767,265,000	114,980,429,000	100,324,291,492	87,705,650	100,236,585,842	90.52	14743843158
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,273,000,000	5,827,170,000	5,818,485,784	0	5,818,485,784	99.85	8,684,216
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	4,273,000,000	5,827,170,000	5,818,485,784	0	5,818,485,784	99.85	8,684,216
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,990,000,000	21,508,686,000	21,471,936,852	23,391,580	21,448,545,272	99.72	60,140,728
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,200,000,000	1,200,000,000	1,199,861,680	0	1,199,861,680	99.99	138,320
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	29,190,000,000	22,708,686,000	22,671,798,532	23,391,580	22,648,406,952	99.86	60,279,048
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	33,463,000,000	28,535,856,000	28,490,284,316	23,391,580	28,466,892,736	99.85	68963264

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 03**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025030500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 12:46 PM

Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	188,122,265,000	166,537,169,000	144,156,575,808	111,097,230	144,045,478,578	86.56	22,491,690,422

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,131,305,386	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	91,000	0
0.0	131111	Tanah	237,527,541,816	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	66,468,453,098	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	279,335,769,580	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	431,518,202	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	21,448,545,272	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	55,985,739,179
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	77,137,989,511
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	41,333,400
0.0	162151	Software	7,565,125	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	32,574,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	155,281,998	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	280,908,486	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	142,945,133
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	7,565,125
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	183,447,262
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	155,281,998
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	144,045,478,578
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	121,084,545,539	0
0.0	313211	Transfer Keluar	16,471,931,157	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	18,869,513,557
0.0	391111	Ekuitas	0	454,648,064,881
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,387,296,595
0.0	391119	Koreksi Lainnya	308,000,000	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,710,712,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,526,250
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	700,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,653,200
3.0	425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	120,978,000,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	10,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,270,641
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	59,717,848
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	677,600
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	15,342,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	21,501,299,715	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,725,546,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	299,703,527	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	12,810,171,494	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	587,626,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	263,720,000	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	34,000,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,197,000,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,541,450,152	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,113,822,101	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	536,257,398	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	287,211,829	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	776,343,587	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	49,500,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,022,390,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	21,756,507,400	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	964,249,070	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,538,138,255	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	333,597,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,720,861,587	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,174,584,208	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,607,540,790	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,375,074,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	849,748,960	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,402,130,412	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10,191,881,922	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	11,126,288	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,660,270,015	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	375,500	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	160,000	0
3.0	593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan	4,000,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	465,600	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	923,547,762	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	113,581,027	0
JUMLAH			**876,399,912,758**	**876,399,912,758**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	144,045,478,578
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	121,084,545,539	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,526,250
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	700,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,653,200
3.0	425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	120,993,600,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	10,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,270,641
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	59,717,848
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	677,600
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	15,342,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	21,490,892,257	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,726,050,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	299,703,527	0
3.0	521211	Belanja Bahan	12,810,271,494	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	587,626,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	263,720,000	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	34,000,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,182,000,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,831,650,152	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	376,213,931	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,113,906,790	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	540,259,905	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	285,775,379	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	776,632,187	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	49,500,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,037,390,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	22,022,148,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	964,249,070	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,537,891,255	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	333,844,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,720,861,587	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,176,142,208	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,919,740,790	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,375,074,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	849,748,960	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	4,000,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	15,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025030500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 12:45 PM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,818,485,784	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,471,936,852	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,199,861,680	0
3.1	425351	Pengembalian Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	15,600,000	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	16,794,889
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	503,500
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	100,000
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	3,254,337
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	4,891,324
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	288,600
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	2,415,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,558,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	57,900,000
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	23,391,580
JUMLAH			**265,256,721,347**	**265,256,721,347**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT WILAYAH

PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl. Cetak 05/05/2026

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	308,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,287,782,497	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	466,500	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	160,000	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	465,600	0
0.0	131111	Tanah	231,977,132,816	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	60,097,834,048	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	279,891,203,400	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	409,918,202	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	51,477,188,001
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	67,606,462,844
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	41,333,400
0.0	162151	Software	7,565,125	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	32,574,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	601,719,275	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	150,931,612
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	7,565,125
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,683,275,600
0.0	391111	Ekuitas	0	454,648,064,881
JUMLAH			**575,614,821,463**	**575,614,821,463**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 025030500KD **Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 05/05/26 12:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,526,250	0	16,526,250	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	700,000	0	700,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	4,653,200	0	4,653,200	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	21,879,450	0	21,879,450	
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	139,000,800,000	120,993,600,000	15,600,000	120,978,000,000	87.03
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	139,000,800,000	120,993,600,000	15,600,000	120,978,000,000	87.03
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	10,000,000	0	10,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	10,000,000	0	10,000,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14,270,641	0	14,270,641	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	14,270,641	0	14,270,641	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	59,717,848	0	59,717,848	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	677,600	0	677,600	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	60,395,448	0	60,395,448	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	139,000,800,000	121,100,145,539	15,600,000	121,084,545,539	87.11
	JUMLAH PENDAPATAN	139,000,800,000	121,100,145,539	15,600,000	121,084,545,539	87.11

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**219,061**	**231,977,132,816**	**22,570**	**5,550,409,000**	**3,261**	**0**	**238,370**	**237,527,541,816**
20101	TANAH PERSIL	218,914	231,867,132,816	22,570	5,550,409,000	3,261	0	238,223	237,417,541,816
20102	TANAH NON PERSIL	147	110,000,000	0	0	0	0	147	110,000,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**17,373**	**60,768,392,777**	**7,947**	**12,242,882,556**	**560**	**3,317,503,254**	**24,760**	**69,693,772,079**
30103	ALAT BANTU	6	9,363,400	2	1,350,000	0	0	8	10,713,400
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	155	2,455,444,625	0	0	0	0	155	2,455,444,625
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	2,947,050	0	0	0	0	1	2,947,050
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	14,433,920	0	0	0	0	5	14,433,920
30303	ALAT UKUR	21	570,621,430	1	949,050	0	0	22	571,570,480
30401	ALAT PENGOLAHAN	64	239,090,160	22	52,730,000	0	0	86	291,820,160
30501	ALAT KANTOR	2,446	10,912,485,833	800	1,423,483,763	1	5,527,800	3,245	12,330,441,796
30502	ALAT RUMAH TANGGA	9,499	12,551,670,366	6,461	5,223,739,950	314	831,138,500	15,646	16,944,271,816
30601	ALAT STUDIO	175	787,515,432	25	15,788,430	0	0	200	803,303,862
30602	ALAT KOMUNIKASI	328	808,275,952	2	1,990,000	3	6,190,000	327	804,075,952
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	134,895,600	2	31,999,000	0	0	14	166,894,600
30701	ALAT KEDOKTERAN	228	363,908,032	20	21,199,996	0	0	248	385,108,028
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	129	659,739,959	12	153,721,500	0	0	141	813,461,459
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	40	91,820,400	0	0	0	0	40	91,820,400
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	2	2,500,000	0	0	0	0	2	2,500,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	12,000,000	0	0	0	0	1	12,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	6	48,496,660	0	0	0	0	6	48,496,660
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	48	86,555,148	0	0	0	0	48	86,555,148
31001	KOMPUTER UNIT	2,056	18,879,799,587	42	406,288,157	13	120,128,124	2,085	19,165,959,620
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,085	11,780,839,683	558	4,909,642,710	229	2,354,518,830	2,414	14,335,963,563
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	8	3,077,000	0	0	0	0	8	3,077,000
31301	SUMUR	2	39,930,000	0	0	0	0	2	39,930,000
31503	ALAT SAR	16	33,650,000	0	0	0	0	16	33,650,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	37	271,817,540	0	0	0	0	37	271,817,540
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	6,480,000	0	0	0	0	2	6,480,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	1,035,000	0	0	0	0	1	1,035,000
133111	**Gedung dan Bangunan**	**665**	**280,147,105,688**	**12**	**13,093,219,074**	**19**	**13,648,652,894**	**658**	**279,591,671,868**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	661	279,687,195,522	12	13,093,219,074	19	13,648,652,894	654	279,131,761,702
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	144,250,000	0	0	0	0	1	144,250,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	315,660,166	0	0	0	0	3	315,660,166
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**54**	**409,918,202**	**1**	**21,600,000**	**0**	**0**	**55**	**431,518,202**
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	17	11,220,000	0	0	0	0	17	11,220,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	37	398,698,202	1	21,600,000	0	0	38	420,298,202
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**39**	**601,814,275**	**17**	**1,918,208,895**	**17**	**2,239,019,684**	**39**	**281,003,486**
30501	ALAT KANTOR	8	514,000	0	0	0	0	8	514,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	20	1,225,000	6	4,350,000	6	4,350,000	20	1,225,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	1	4,200,000	1	4,200,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	6	39,620,075	1	17,564,124	1	17,564,124	6	39,620,075
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	1,758,250	1	3,092,610	1	3,092,610	3	1,758,250
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	537,096,950	8	1,889,002,161	7	2,188,212,950	2	237,886,161
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	21,600,000	0	0	1	21,600,000	0	0
TOTAL			**573,904,363,758**		**32,826,319,525**		**19,205,175,832**		**587,525,507,451**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**219,061**	**231,977,132,816**	**22,570**	**5,550,409,000**	**3,261**	**0**	**238,370**	**237,527,541,816**
20101	TANAH PERSIL	218,914	231,867,132,816	22,570	5,550,409,000	3,261	0	238,223	237,417,541,816
20102	TANAH NON PERSIL	147	110,000,000	0	0	0	0	147	110,000,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**15,150**	**60,097,834,048**	**3,146**	**9,686,132,304**	**558**	**3,315,513,254**	**17,738**	**66,468,453,098**
30103	ALAT BANTU	6	9,363,400	0	0	0	0	6	9,363,400
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	155	2,455,444,625	0	0	0	0	155	2,455,444,625
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	2,947,050	0	0	0	0	1	2,947,050
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	14,233,920	0	0	0	0	4	14,233,920
30303	ALAT UKUR	21	570,621,430	0	0	0	0	21	570,621,430
30401	ALAT PENGOLAHAN	64	239,090,160	21	52,050,000	0	0	85	291,140,160
30501	ALAT KANTOR	2,373	10,886,865,223	572	1,270,306,663	1	5,527,800	2,944	12,151,644,086
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,451	11,942,366,173	2,033	2,947,125,524	314	831,138,500	9,170	14,058,353,197
30601	ALAT STUDIO	156	780,385,956	0	0	0	0	156	780,385,956
30602	ALAT KOMUNIKASI	307	804,290,952	0	0	1	4,200,000	306	800,090,952
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	134,895,600	2	31,999,000	0	0	14	166,894,600
30701	ALAT KEDOKTERAN	216	356,858,122	2	5,000,000	0	0	218	361,858,122
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	129	659,739,959	9	152,821,500	0	0	138	812,561,459
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	40	91,820,400	0	0	0	0	40	91,820,400
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	2	2,500,000	0	0	0	0	2	2,500,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	12,000,000	0	0	0	0	1	12,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	6	48,496,660	0	0	0	0	6	48,496,660
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	27	83,884,148	0	0	0	0	27	83,884,148
31001	KOMPUTER UNIT	2,056	18,879,799,587	41	405,299,157	13	120,128,124	2,084	19,164,970,620
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,061	11,767,193,143	466	4,821,530,460	229	2,354,518,830	2,298	14,234,204,773
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	2,125,000	0	0	0	0	4	2,125,000
31301	SUMUR	2	39,930,000	0	0	0	0	2	39,930,000
31503	ALAT SAR	16	33,650,000	0	0	0	0	16	33,650,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	37	271,817,540	0	0	0	0	37	271,817,540
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	6,480,000	0	0	0	0	2	6,480,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	1,035,000	0	0	0	0	1	1,035,000
133111	**Gedung dan Bangunan**	**641**	**279,891,203,400**	**12**	**13,093,219,074**	**19**	**13,648,652,894**	**634**	**279,335,769,580**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	637	279,431,293,234	12	13,093,219,074	19	13,648,652,894	630	278,875,859,414
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	144,250,000	0	0	0	0	1	144,250,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	315,660,166	0	0	0	0	3	315,660,166
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**54**	**409,918,202**	**1**	**21,600,000**	**0**	**0**	**55**	**431,518,202**
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	17	11,220,000	0	0	0	0	17	11,220,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	37	398,698,202	1	21,600,000	0	0	38	420,298,202
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**38**	**601,719,275**	**17**	**1,918,208,895**	**17**	**2,239,019,684**	**38**	**280,908,486**
30501	ALAT KANTOR	7	419,000	0	0	0	0	7	419,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	20	1,225,000	6	4,350,000	6	4,350,000	20	1,225,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	1	4,200,000	1	4,200,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	6	39,620,075	1	17,564,124	1	17,564,124	6	39,620,075
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	1,758,250	1	3,092,610	1	3,092,610	3	1,758,250
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	537,096,950	8	1,889,002,161	7	2,188,212,950	2	237,886,161
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	21,600,000	0	0	1	21,600,000	0	0
TOTAL			**572,977,807,741**		**30,269,569,273**		**19,203,185,832**		**584,044,191,182**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 05/05/26 12:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	6,182,554
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	542,873
1010301003	Penjepit Kertas	5,400,149
1010301004	Penghapus/Korektor	331,660
1010301005	Buku Tulis	7,259,542
1010301006	Ordner Dan Map	3,855,570
1010301007	Penggaris	118,802
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	739,967
1010301010	Alat Perekat	1,193,908
1010301011	Stadler HD	46,532
1010301012	Staples	803,820
1010301013	Isi Staples	1,215,260
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2,291,165
1010302001	Kertas HVS	35,489,745
1010302002	Berbagai Kertas	1,142,640
1010302003	Kertas Cover	123,000
1010302004	Amplop	1,592,684
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	233,360
1010303002	Tinta Cetak	380,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	11,504,245
1010304006	USB/Flash Disk	150,000
1010304007	kartu Memori	2,900,000
1010304009	Harddisk Internal	2,604,060
1010304010	Mouse	2,333,976
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	329,700
1010306010	Batu Baterai	751,364
1010309003	Stempel	18,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	986,124
1010316001	Akte Nikah	319,791,582
1010316002	Buku Nikah	1,140,104,652
1010316003	Daftar Pemeriksaan Nikah	314,519,867
1010316004	Duplikat Nikah	46,896,940
1010316005	Kartu Nikah	126,508,904
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	92,962,741
Jumlah Barang Konsumsi		**2,131,305,386**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305001	Sapu Dan Sikat	91,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**91,000**
TOTAL		**2,131,396,386**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 2,377,707 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 74,231,330 dalam kondisi usang.

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	**Tanah**	**238,370**	**237,527,541,816**	**0**	**0**	**0**	**237,527,541,816**
20101	TANAH PERSIL	238,223	237,417,541,816	0	0	0	237,417,541,816
20102	TANAH NON PERSIL	147	110,000,000	0	0	0	110,000,000
132111	**Peralatan dan Mesin**	**17,738**	**66,468,453,098**	**(51,477,188,001)**	**(4,508,551,178)**	**(55,985,739,179)**	**10,482,713,919**
30103	ALAT BANTU	6	9,363,400	(8,459,223)	(361,671)	(8,820,894)	904,177
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	155	2,455,444,625	(2,455,444,625)	0	(2,455,444,625)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	2,947,050	(2,947,050)	0	(2,947,050)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	14,233,920	(8,511,960)	(2,531,784)	(11,043,744)	5,721,960
30303	ALAT UKUR	21	570,621,430	(367,327,519)	(85,925,741)	(453,253,260)	203,293,911
30401	ALAT PENGOLAHAN	85	291,140,160	(235,572,914)	(9,351,039)	(244,923,953)	55,567,246
30501	ALAT KANTOR	2,944	12,151,644,086	(7,754,816,632)	(1,399,529,292)	(9,154,345,924)	4,396,827,454
30502	ALAT RUMAH TANGGA	9,170	14,058,353,197	(9,593,241,617)	(1,217,585,923)	(10,810,827,540)	4,465,111,580
30601	ALAT STUDIO	156	780,385,956	(610,424,796)	(69,646,550)	(680,071,346)	169,961,160
30602	ALAT KOMUNIKASI	306	800,090,952	(799,837,272)	1,230,880	(798,606,392)	253,680
30603	PERALATAN PEMANCAR	14	166,894,600	(94,699,960)	(16,689,460)	(111,389,420)	72,194,640
30701	ALAT KEDOKTERAN	218	361,858,122	(270,767,235)	(44,870,760)	(315,637,995)	91,090,887
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	138	812,561,459	(445,628,141)	(55,180,154)	(500,808,295)	366,933,318
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	40	91,820,400	(38,949,073)	(5,948,984)	(44,898,057)	52,871,327
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	2	2,500,000	(2,375,000)	(125,000)	(2,500,000)	125,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	12,000,000	(12,000,000)	0	(12,000,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	6	48,496,660	(48,496,660)	0	(48,496,660)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	27	83,884,148	(81,872,873)	(1,465,850)	(83,338,723)	2,011,275
31001	KOMPUTER UNIT	2,084	19,164,970,620	(17,467,469,953)	(824,425,969)	(18,291,895,922)	1,697,500,667
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,298	14,234,204,773	(10,985,910,935)	(746,491,551)	(11,732,402,486)	3,248,293,838
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	2,125,000	(2,125,000)	0	(2,125,000)	0
31301	SUMUR	2	39,930,000	(29,947,500)	(3,993,000)	(33,940,500)	9,982,500
31503	ALAT SAR	16	33,650,000	(33,650,000)	0	(33,650,000)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	37	271,817,540	(122,926,276)	(24,863,473)	(147,789,749)	148,891,264
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	6,480,000	(3,564,000)	(648,000)	(4,212,000)	2,916,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	1,035,000	(221,787)	(147,857)	(369,644)	813,213
133111	**Gedung dan Bangunan**	**634**	**279,335,769,580**	**(67,606,462,844)**	**(9,531,526,667)**	**(77,137,989,511)**	**202,197,780,069**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	630	278,875,859,414	(67,553,332,748)	(9,522,271,359)	(77,075,604,107)	211,322,526,666
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	144,250,000	(12,982,500)	(2,885,000)	(15,867,500)	131,267,500
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	315,660,166	(40,147,596)	(6,370,308)	(46,517,904)	275,512,570
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**55**	**431,518,202**	**(41,333,400)**	**0**	**(41,333,400)**	**390,184,802**
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	17	11,220,000	0	0	0	11,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	38	420,298,202	(41,333,400)	0	(41,333,400)	378,964,802

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**38**	**280,908,486**	**(150,931,612)**	**7,986,479**	**(142,945,133)**	**137,963,353**
30501	ALAT KANTOR	7	419,000	(419,000)	0	(419,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	20	1,225,000	(1,225,000)	0	(1,225,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	6	39,620,075	(39,620,075)	0	(39,620,075)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	1,758,250	(1,758,250)	0	(1,758,250)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	237,886,161	(107,909,287)	7,986,479	(99,922,808)	129,976,874
JUMLAH		**256,835**	**584,044,191,182**	**(119,275,915,857)**	**(14,032,091,366)**	**(133,308,007,223)**	**464,768,275,325**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**Peralatan dan Mesin**	**2,223**	**670,558,729**	**4,801**	**2,556,750,252**	**2**	**1,990,000**	**7,022**	**3,225,318,981**
30103	ALAT BANTU	0	0	2	1,350,000	0	0	2	1,350,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
30303	ALAT UKUR	0	0	1	949,050	0	0	1	949,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	680,000	0	0	1	680,000
30501	ALAT KANTOR	73	25,620,610	228	153,177,100	0	0	301	178,797,710
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,048	609,304,193	4,428	2,276,614,426	0	0	6,476	2,885,918,619
30601	ALAT STUDIO	19	7,129,476	25	15,788,430	0	0	44	22,917,906
30602	ALAT KOMUNIKASI	21	3,985,000	2	1,990,000	2	1,990,000	21	3,985,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	12	7,049,910	18	16,199,996	0	0	30	23,249,906
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	3	900,000	0	0	3	900,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	21	2,671,000	0	0	0	0	21	2,671,000
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	1	989,000	0	0	1	989,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	24	13,646,540	92	88,112,250	0	0	116	101,758,790
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	952,000	0	0	0	0	4	952,000
133111	**Gedung dan Bangunan**	**24**	**255,902,288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**255,902,288**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	24	255,902,288	0	0	0	0	24	255,902,288
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi**	**1**	**95,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**95,000**
30501	ALAT KANTOR	1	95,000	0	0	0	0	1	95,000
TOTAL			**926,556,017**		**2,556,750,252**		**1,990,000**		**3,481,316,269**

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

		Objek Penelaahan		**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A						
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran						
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN						
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab		√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE		√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan		√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal		√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual		√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas		√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun		√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI						
		Kesesuaian Saldo		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI		√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.						
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI						
		Persamaan Dasar Akuntansi		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas		√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI						
		To Do List		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			√	Tidak
2		Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√		Ya
3		Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
4		Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			√	Tidak
5		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
6		Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
7		Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			√	Tidak
8		Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			√	Tidak
9		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
10		Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			√	Tidak
11		Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

12		Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah						
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?			√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			√	Tidak
		a. Pagu/DIPA			√	Tidak
		b. Estimasi PNBP			√	Tidak
		c. Belanja			√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		e. Pendapatan			√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		g. Kas BLU			√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran			√	Tidak
		i. Kas Hibah			√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung			√	Tidak
		Rekon Internal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal			√	Tidak
		Daftar MONSAKTI		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?			√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			√	Tidak
6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL						
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal			√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)			√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			√	Tidak
		Terkait Satker BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			√	Tidak
		Hibah Langsung		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			√	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			√	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			√	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**Rp.**		
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**Rp.**		
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			√	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			√	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			√	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA						
		Pengecekan Pos-pos Neraca		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√		Ya

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Saldo pada neraca bernilai wajar		√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√		Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
		Pengecekan Pos-pos LO		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			√	Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			√	Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
		Pengecekan Pos-pos LPE		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Ya
2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			√	Ya
		Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp..... dengan dokumen sumber BAST				
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)						
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB			√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN						
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "AD		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			√	Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			√	Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			√	Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)			√	Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			√	Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			√	Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			√	Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417801) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Islam)
Kode dan Nama Eselon I : (03) Ditjen Bimas Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU						
		LPSAL BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			√	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			√	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			√	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			√	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			√	Ya
		LAK BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			√	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			√	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			√	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			√	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN						
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang						

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

SANGIDUN, S.Kom, M.AP
NIP. 198207062011011005

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Penyusun Laporan Keuangan

Rochmad, S.Ag
NIP. 197404072007011032

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

REKONSILIASI SAKTI - SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Status Rekonsiliasi	Tanggal SHR	Jumlah Data TDK			Proses SHR / Download SHR
							TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail	
1	02503	299052	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 14:00:30	0	0		Download
2	02503	299057	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
3	02503	299064	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 15:00:23	0	0		Download
4	02503	299071	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 12:00:31	0	0		Download
5	02503	299077	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download
6	02503	299081	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 20:00:21	0	0		Download
7	02503	299086	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
8	02503	299089	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 11:56:07	0	0		Download
9	02503	299093	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 17:00:23	0	0		Download
10	02503	299098	KANTOR	2025-12	Rekon selesai Hasil	2026-01-22 22:00:21	0	0		

			KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		Rekonsiliasi Terbentuk					Download
11	02503	299104	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 09:00:24	0	0		Download
12	02503	299107	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 12:00:24	0	0		Download
13	02503	299112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download
14	02503	299118	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
15	02503	299124	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
16	02503	299128	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download
17	02503	299135	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 10:00:29	0	0		Download
18	02503	299140	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
19	02503	299145	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 13:00:35	0	0		Download
20	02503	299150	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 09:00:30	0	0		Download

21	02503	299157	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
22	02503	299160	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 16:00:27	0	0		Download
23	02503	299163	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
24	02503	299167	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 09:00:27	0	0		Download
25	02503	299170	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 11:00:28	0	0		Download
26	02503	299173	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 19:00:25	0	0		Download
27	02503	309126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 17:00:25	0	0		Download
28	02503	417801	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 18:00:23	0	0		Download
29	02503	417817	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 18:00:26	0	0		Download
30	02503	417825	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 14:00:36	0	0		Download
31	02503	417832	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 08:00:24	0	0		Download

			MOJOKERTO							
32	02503	417854	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 12:00:31	0	0		Download
33	02503	417863	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 08:00:25	0	0		Download
34	02503	417885	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
35	02503	417892	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 05:00:31	0	0		Download
36	02503	417905	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 12:00:33	0	0		Download
37	02503	417982	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 13:00:35	0	0		Download
38	02503	418002	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 17:00:37	0	0		Download
39	02503	650080	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 10:00:40	0	0		Download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299052 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:08
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,140,064,000	3,140,064,000	0
2	Belanja	2,576,437,594	2,576,437,594	0
3	Pengembalian Belanja	-814,831	-814,831	0
4	Estimasi Pendapatan	1,795,200,000	1,795,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,696,800,000	1,696,800,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BANYUWANGI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299057 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,233,522,000	5,233,522,000	0
2	Belanja	4,524,707,716	4,524,707,716	0
3	Pengembalian Belanja	-2,585,737	-2,585,737	0
4	Estimasi Pendapatan	6,791,400,000	6,791,400,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,931,042,096	5,931,042,096	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl.Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:46 PM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,131,305,386
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	91,000
131111	Tanah	237,527,541,816
132111	Peralatan dan Mesin	66,468,453,098
133111	Gedung dan Bangunan	279,335,769,580
135121	Aset Tetap Lainnya	431,518,202
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	21,448,545,272
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(55,985,739,179)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(77,137,989,511)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(41,333,400)
162151	Software	7,565,125
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	32,574,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	280,908,486
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(142,945,133)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(7,565,125)
J U M L A H		**474,348,699,617**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 12:47 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025030500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**7,022**	**3,225,318,981**	**(485,460,836)**	**(339,189,980)**	**(824,650,816)**	**2,400,668,165**
30103	ALAT BANTU	2	1,350,000	0	(96,428)	(96,428)	1,253,572
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	200,000	(200,000)	0	(200,000)	0
30303	ALAT UKUR	1	949,050	0	(94,905)	(94,905)	854,145
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	680,000	0	(85,000)	(85,000)	595,000
30501	ALAT KANTOR	301	178,797,710	(20,276,499)	(17,452,696)	(37,729,195)	141,068,515
30502	ALAT RUMAH TANGGA	6,476	2,885,918,619	(444,573,764)	(299,003,850)	(743,577,614)	2,142,341,005
30601	ALAT STUDIO	44	22,917,906	(5,699,026)	(2,024,943)	(7,723,969)	15,193,937
30602	ALAT KOMUNIKASI	21	3,985,000	(3,985,000)	0	(3,985,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	30	23,249,906	(2,112,437)	(3,029,982)	(5,142,419)	18,107,487
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	900,000	0	(56,250)	(56,250)	843,750
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	21	2,671,000	(2,671,000)	0	(2,671,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	1	989,000	0	(123,625)	(123,625)	865,375
31002	PERALATAN KOMPUTER	116	101,758,790	(4,991,110)	(17,222,301)	(22,213,411)	79,545,379
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4	952,000	(952,000)	0	(952,000)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**24**	**255,902,288**	**(13,562,518)**	**(5,119,764)**	**(18,682,282)**	**237,220,006**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	24	255,902,288	(13,562,518)	(5,119,764)	(18,682,282)	237,220,006
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**1**	**95,000**	**(95,000)**	**0**	**(95,000)**	**0**
30501	ALAT KANTOR	1	95,000	(95,000)	0	(95,000)	0
JUMLAH		**7,047**	**3,481,316,269**	**(499,118,354)**	**(344,309,744)**	**(843,428,098)**	**2,637,888,171**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299064 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,521,335,000	8,521,335,000	0
2	Belanja	7,277,401,040	7,277,401,040	0
3	Pengembalian Belanja	-283,050	-283,050	0
4	Estimasi Pendapatan	10,483,200,000	10,483,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,737,400,000	9,737,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-1,800,000	-1,800,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	327,834,000	327,834,000	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299071 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,758,672,000	5,758,672,000	0
2	Belanja	4,557,442,939	4,557,442,939	0
3	Pengembalian Belanja	-1,500,000	-1,500,000	0
4	Estimasi Pendapatan	4,412,400,000	4,412,400,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,160,400,000	4,160,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299077 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,300,289,000	3,300,289,000	0
2	Belanja	3,101,437,481	3,101,437,481	0
3	Pengembalian Belanja	-1,719,070	-1,719,070	0
4	Estimasi Pendapatan	1,612,800,000	1,612,800,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,625,655,340	1,625,655,340	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299081 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,282,276,000	2,282,276,000	0
2	Belanja	1,981,510,541	1,981,510,541	0
3	Pengembalian Belanja	-200,000	-200,000	0
4	Estimasi Pendapatan	2,243,400,000	2,243,400,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,981,270,000	1,981,270,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-600,000	-600,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299086 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	866,233,000	866,233,000	0
2	Belanja	722,340,750	722,340,750	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	592,200,000	592,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	531,849,750	531,849,750	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299089 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	974,416,000	974,416,000	0
2	Belanja	734,728,576	734,728,576	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	649,800,000	649,800,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	532,200,000	532,200,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299093 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:09
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,231,646,000	5,231,646,000	0
2	Belanja	4,523,426,957	4,523,426,957	0
3	Pengembalian Belanja	-2,000,000	-2,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	5,955,000,000	5,955,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,170,620,357	5,170,620,357	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-1,800,000	-1,800,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299098 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 9:10
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,971,987,000	3,971,987,000	0
2	Belanja	3,341,977,598	3,341,977,598	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,710,000,000	4,710,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,892,200,000	3,892,200,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	1,382,878,000	1,382,878,000	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299104 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,430,966,000	4,430,966,000	0
2	Belanja	3,603,115,061	3,603,115,061	0
3	Pengembalian Belanja	-56,813,525	-56,813,525	0
4	Estimasi Pendapatan	4,059,600,000	4,059,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,292,388,766	3,292,388,766	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299107 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,003,669,000	1,003,669,000	0
2	Belanja	770,524,260	770,524,260	0
3	Pengembalian Belanja	-100,000	-100,000	0
4	Estimasi Pendapatan	756,000,000	756,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	710,700,000	710,700,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299112 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	824,196,000	824,196,000	0
2	Belanja	682,305,374	682,305,374	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	568,200,000	568,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	548,431,857	548,431,857	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299118 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,506,667,000	3,506,667,000	0
2	Belanja	2,914,850,690	2,914,850,690	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,140,000,000	4,140,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,511,200,000	3,511,200,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-600,000	-600,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299124 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,512,415,000	2,512,415,000	0
2	Belanja	2,232,305,452	2,232,305,452	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,411,400,000	2,411,400,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,855,220,397	1,855,220,397	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299128 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,946,048,000	3,946,048,000	0
2	Belanja	3,267,897,450	3,267,897,450	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,807,800,000	4,807,800,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,449,400,000	3,449,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299135 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,766,709,000	2,766,709,000	0
2	Belanja	2,444,931,464	2,444,931,464	0
3	Pengembalian Belanja	-631,714	-631,714	0
4	Estimasi Pendapatan	2,499,000,000	2,499,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,139,633,300	2,139,633,300	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299140 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,567,750,000	3,567,750,000	0
2	Belanja	3,130,349,862	3,130,349,862	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	3,208,200,000	3,208,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,865,743,000	2,865,743,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299145 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:41
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,546,838,000	2,546,838,000	0
2	Belanja	2,244,963,763	2,244,963,763	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,251,800,000	2,251,800,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,093,867,708	2,093,867,708	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299150 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:42
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	728,551,000	728,551,000	0
2	Belanja	666,203,443	666,203,443	0
3	Pengembalian Belanja	-1,558,000	-1,558,000	0
4	Estimasi Pendapatan	552,600,000	552,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	476,400,000	476,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PACITAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299157 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,990,590,000	1,990,590,000	0
2	Belanja	1,615,248,822	1,615,248,822	0
3	Pengembalian Belanja	-5,000,000	-5,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	2,274,000,000	2,274,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,778,149,950	1,778,149,950	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299160 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,078,694,000	3,078,694,000	0
2	Belanja	2,680,977,884	2,680,977,884	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	3,736,200,000	3,736,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,894,089,266	2,894,089,266	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-1,800,000	-1,800,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299163 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,419,863,000	3,419,863,000	0
2	Belanja	2,738,859,000	2,738,859,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,973,600,000	2,973,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,173,800,000	2,173,800,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299167 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,723,320,000	5,723,320,000	0
2	Belanja	5,026,358,100	5,026,358,100	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,468,800,000	4,468,800,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,840,000,000	3,840,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299170 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,457,695,000	3,457,695,000	0
2	Belanja	2,896,316,761	2,896,316,761	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,762,200,000	4,762,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,849,000,000	3,849,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN PAMEKASAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299173 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,598,148,000	2,598,148,000	0
2	Belanja	2,315,187,720	2,315,187,720	0
3	Pengembalian Belanja	-344,160	-344,160	0
4	Estimasi Pendapatan	3,178,800,000	3,178,800,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,885,488,725	2,885,488,725	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 309126 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	786,010,000	786,010,000	0
2	Belanja	599,537,094	599,537,094	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	430,200,000	430,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	395,400,000	395,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417801 - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	32,541,865,000	32,541,865,000	0
2	Belanja	31,372,379,789	31,372,379,789	0
3	Pengembalian Belanja	-23,391,580	-23,391,580	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	22,213,952	22,213,952	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417817 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,911,129,000	6,911,129,000	0
2	Belanja	5,626,012,297	5,626,012,297	0
3	Pengembalian Belanja	-4,538,194	-4,538,194	0
4	Estimasi Pendapatan	7,500,000,000	7,500,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,075,500,052	7,075,500,052	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-6,000,000	-6,000,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417825 - KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,942,045,000	3,942,045,000	0
2	Belanja	3,225,886,356	3,225,886,356	0
3	Pengembalian Belanja	-906,618	-906,618	0
4	Estimasi Pendapatan	4,653,000,000	4,653,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,157,825,907	4,157,825,907	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417832 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,446,184,000	4,446,184,000	0
2	Belanja	3,945,512,275	3,945,512,275	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	3,648,600,000	3,648,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,444,000,000	3,444,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN TUBAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417854 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:44
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,152,005,000	4,152,005,000	0
2	Belanja	3,460,209,120	3,460,209,120	0
3	Pengembalian Belanja	-1,000,000	-1,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	4,371,600,000	4,371,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,002,925,350	4,002,925,350	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BOJONEGORO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417863 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,635,499,000	4,635,499,000	0
2	Belanja	4,119,069,115	4,119,069,115	0
3	Pengembalian Belanja	-638,500	-638,500	0
4	Estimasi Pendapatan	4,675,200,000	4,675,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,074,250,000	4,074,250,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417885 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,731,351,000	4,731,351,000	0
2	Belanja	4,134,619,468	4,134,619,468	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	6,906,600,000	6,906,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,991,900,000	5,991,900,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BOJONEGORO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417892 - KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,477,679,000	4,477,679,000	0
2	Belanja	3,702,706,100	3,702,706,100	0
3	Pengembalian Belanja	-3,340,000	-3,340,000	0
4	Estimasi Pendapatan	4,206,600,000	4,206,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,929,400,000	3,929,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417905 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,470,203,000	4,470,203,000	0
2	Belanja	3,609,244,573	3,609,244,573	0
3	Pengembalian Belanja	-289,034	-289,034	0
4	Estimasi Pendapatan	4,909,200,000	4,909,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,572,552,891	4,572,552,891	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-600,000	-600,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

DATA SETORAN TIDAK DIAKUI SATKER DENGAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAKUI

Catatan KPPN:

DATA SETORAN TIDAK DIAKUI SATKER DENGAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAKUI

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417982 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,877,765,000	2,877,765,000	0
2	Belanja	2,331,018,266	2,331,018,266	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	2,885,400,000	2,885,400,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,116,800,000	2,116,800,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 418002 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,283,702,000	6,283,702,000	0
2	Belanja	4,676,972,458	4,676,972,458	0
3	Pengembalian Belanja	-3,443,217	-3,443,217	0
4	Estimasi Pendapatan	8,238,600,000	8,238,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,030,226,875	7,030,226,875	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-2,400,000	-2,400,000	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 650080 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 12:43
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	899,173,000	899,173,000	0
2	Belanja	781,602,599	781,602,599	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	682,200,000	682,200,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	664,200,000	664,200,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2025

TINGKAT WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40
VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.275.360 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp36.275.360 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.343.036.212 atau mencapai 96,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp4.493.845.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp72.560.711 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.135.999; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp68.424.712 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan Rp64.560.711

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.406.138.401 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp4.406.138.401, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-36.275.360 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp4.369.863.041.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp127.662.900, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4.369.863.041 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4.306.760.852 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp64.560.711

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajaka	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	36.275.360	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**36.275.360**	**-**	**-**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.375.729.000	2.351.242.000	98,97	1.865.400.000
Belanja Barang	B.2.2	2.118.116.000	1.991.794.212	94,04	2.129.990.215
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BE		**4.493.845.000**	**4.343.036.212**	**96,64**	**3.995.390.215**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	4.135.999	9.671.563
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**4.135.999**	**9.671.563**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	399.791.255	399.791.255
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(331.366.543)	(281.799.918)
Jumlah Aset Tetap		**68.424.712**	**117.991.337**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	9.400.000	9.400.000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(9.400.000)	(9.400.000)
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**72.560.711**	**127.662.900**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	8.000.000	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**8.000.000**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**8.000.000**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	64.560.711	127.662.900
JUMLAH EKUTAS		**64.560.711**	**127.662.900**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**72.560.711**	**127.662.900**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		**-**	**-**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	2.359.242.000	1.865.400.000
Beban Persediaan	D.4	49.219.228	42.734.183
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.421.335.679	1.339.764.300
Beban Pemeliharaan	D.6	68.578.975	47.515.200
Beban Perjalanan Dinas	D.7	274.546.894	493.258.862
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	183.649.000	220.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	49.566.625	49.566.625
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**4.406.138.401**	**4.058.239.170**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**4.406.138.401**	**(4.058.239.170)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	(36.275.360)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**(36.275.360)**	**-**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**4.369.863.041**	**(4.058.239.170)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**4.369.863.041**	**(4.058.239.170)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**127.662.900**	**190.511.855**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(4.369.863.041)**	**(4.058.239.170)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**-**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		**-**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.306.760.852	3.995.390.215
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(63.102.189)	(62.848.955)
EKUITAS AKHIR	E.6	**64.560.711**	**127.662.900**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan. Pengintregasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan literatur, penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Kementerian dalam Ditjen-ditjen dan seterusnya sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian Kementerian Agama termasuk organisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Kementerian Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012. Penyempurnaan itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".” Visi ini mencerminkan tujuan Kemenag dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1 Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Beragama;
2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4 Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
b. Ekoteologi;
c. Layanan keagamaan berdampak;
d. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
e. Pesantren berdaya;
f. pemberdayaan ekonomi umat;
g. Sukses penyelenggaraan haji; dan;
h. Digitalisasi tata kelola.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penggabungan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi Satker Sebelumnya. Modul dalam aplikasi SAKTI;

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator;

Laporan Keuangan 2025 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2025 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) adalah 12 satuan kerja

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	299083	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG		1		1
2	650082	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU		1		1
3	299073	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN		1		1
4	299100	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		1		1
5	681935	KANKEMENAG KAB. KEDIRI		1		1
6	417819	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA		1		1
7	299137	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN		1		1
8	418004	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER		1		1
9	299153	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN		1		1

10	417803	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		1		1
11	417887	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO		1		1
12	299066	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG		1		1
Jumlah				12		12

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sev
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	1.884.000.000	2.375.729.000
Belanja Barang	3.211.630.000	2.118.116.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**5.095.630.000**	**4.493.845.000**

Pendapatan Rp36.275.360

B.1 Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.275.360 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp36.275.360. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan penerimaan kembali belanja pegawai tanhun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	36.275.360	-
Jumlah	**-**	**36.275.360**	**-**

Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	36.275.360	-	-
Jumlah	**36.275.360**	**-**	**-**

Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp36.275.360

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp36.275.360 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dari TA 2024 Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan penerimaan kembali belanja pegawai tanhun anggaran yang lalu. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	36.275.360	-	-
Jumlah	**36.275.360**	**-**	**-**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	**36.275.360**	**-**	**-**

Belanja
Rp4.343.036.212

B.2 Belanja

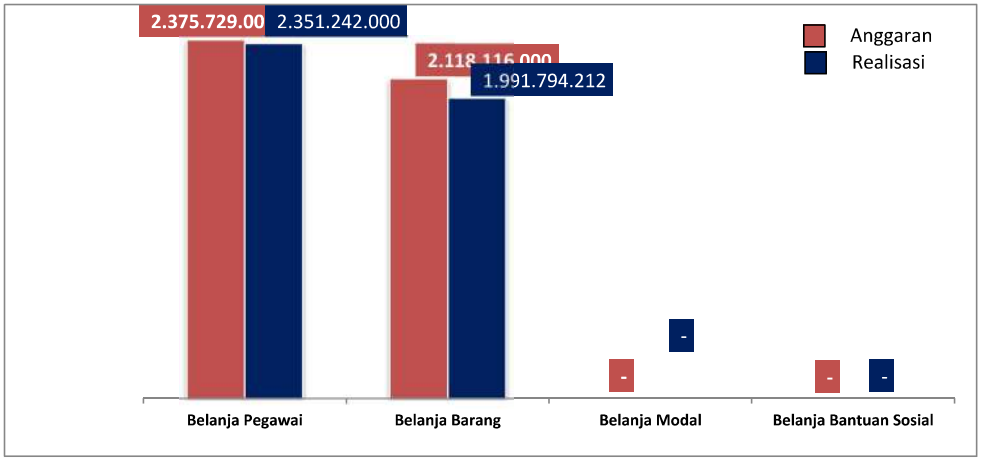
Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp4.343.036.212 atau 96,64 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.493.845.000 Rincian anggaran dan belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2.375.729.000	2.351.242.000	98,97
Belanja Barang	2.118.116.000	1.991.794.212	94,04
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**4.493.845.000**	**4.343.036.212**	**96,64**

Komposisi anggaran dan belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,70% Kenaikan realisasi belanja tahun berjalan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhitung mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS uang makan PNS uang lembur PNS dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023 tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. dan terbayarnya tenaga PPPK . Berikut rincian belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	2.351.242.000	1.865.400.000	26,04
Belanja Barang	1.991.794.212	2.129.990.215	(6,49)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**4.343.036.212**	**3.995.390.215**	**8,70**

Belanja Pegawai Rp2.351.242.000

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.351.242.000 dan Rp1.865.400.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 26,04 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan realisasi belanja pegawai karena belanja gaji pokok anggaran terpusat DIPA Sekretariat Jenderal

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1.376.242.000	596.850.000	130,58
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	477.000.000	772.000.000	(38,21)
Jumlah Belanja kotor	**2.351.242.000**	**1.866.350.000**	**25,98**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	950.000	(100,00)
Jumlah Belanja	**2.351.242.000**	**1.865.400.000**	**26,04**

Belanja Barang Rp1.991.794.212

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.991.794.212 dan Rp2.129.990.215. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 6,49% dari TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	275.665.174	241.969.300	13,93
Belanja Barang Non Operasional	1.126.070.505	1.071.155.000	5,13
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44.213.664	30.118.953	46,80
Belanja Jasa	20.600.000	26.640.000	(22,67)
Belanja Pemeliharaan	68.048.975	46.848.100	45,25
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	274.546.894	493.258.862	(44,34)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	183.649.000	220.000.000	(16,52)
Jumlah Belanja Kotor	**1.992.794.212**	**2.129.990.215**	**(6,44)**
Pengembalian Belanja	1.000.000	-	-
Jumlah Belanja	**1.991.794.212**	**2.129.990.215**	**(6,49)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Nama Satker	Jumlah
1	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	-
2	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	-
3	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	-
4	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	-
5	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	-
Jumlah		**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp -	Rp -
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp4.135.999

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.135.999 dan Rp9.671.563. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
Barang Konsumsi	4.135.999	9.671.563
Jumlah	**4.135.999**	**9.671.563**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp0

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	0	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp399.791.255

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp399.791.255 dan Rp399.791.255. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**399.791.255**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**409.961.760**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(331.366.543)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**78.595.217**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Penjelasan mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap terdapat pada satker;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Satker Sekjen Tingkat Wilayah ada sebagai berikut; Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp331.366.543

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp331.366.543 dan Rp281.799.918. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	399.791.255	(331.366.543)	68.424.712
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**399.791.255**	**(331.366.543)**	**68.424.712**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen) berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-

Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp9.400.000

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp9.400.000 dan Rp9.400.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**9.400.000**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**9.400.000**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(9.400.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-

Mutasi Kurang

-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 9.400.000

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp9.400.000 dan Rp9.400.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	9.400.000	(9.400.000)	-
Total	**9.400.000**	**(9.400.000)**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp8.000.000

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	(8.000.000)	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	**(8.000.000)**	**-**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga : Utang Kepada Pihak Ketiga Tunjangan Profesi Guru

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp64.560.711

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp64.560.711. dan Rp127.662.900. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada dan adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Pegawai Rp2.359.242.000

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.359.242.000 dan Rp1.865.400.000.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 26,47 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1.384.242.000	596.850.000	131,92
Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	477.000.000	772.000.000	(38,21)
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh	498.000.000	496.550.000	0,29
Jumlah	**2.359.242.000**	**1.865.400.000**	**26,47**

Beban Persediaan Rp49.219.228

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.219.228 dan Rp42.734.183

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	49.219.228	42.734.183	15,18
Jumlah Beban Persediaan	**49.219.228,00**	**42.734.183**	**15,18**

Beban Barang dan Jasa Rp1.421.335.679

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.421.335.679 dan Rp1.339.764.300.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan belanja barang dan jasa pada pemberian bantuan dalam bentuk jasa lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	47.813.174	50.000.300	(4,37)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	226.852.000	191.969.000	18,17
Beban Bahan	15.650.000	19.220.000	(18,57)
Beban Honor Output Kegiatan	2.300.000	2.450.000	(6,12)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	1.097.950.000	1.049.485.000	4,62
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10.170.505	-	-
Beban Jasa Profesi	14.600.000	26.640.000	(45,20)
Beban Jasa Lainnya	6.000.000	-	-
Jumlah	**1.421.335.679**	**1.339.764.300,00**	**6,09**

Beban Pemeliharaan Rp68.578.975

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp68.578.975 dan Rp47.515.200.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 44,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan perbaikan aset bmn masih bisa digunakan atau layak pakai Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.999.500	27.570.000	8,81
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.049.475	19.278.100	97,37
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	530.000	667.100	(20,55)
Jumlah	**68.578.975**	**47.515.200**	**44,33**

Beban Perjalanan Dinas Rp274.546.894

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp274.546.894 dan Rp493.258.862

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 44,34 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas karena kegiatan atau program berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	136.528.894	273.148.862	(50,02)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.347.000	23.400.000	(21,59)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.875.000	33.220.000	(58,23)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103.996.000	159.890.000	(34,96)
Beban Perjalanan Tetap	1.800.000	3.600.000	(50,00)
Jumlah	**274.546.894,00**	**493.258.862**	**(44,34)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp183.649.000

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp183.649.000 dan Rp220.000.000

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 16,52 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehKenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Al Kitab). Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	118.649.000	220.000.000,00	(46,07)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	15.000.000	-	-
Jumlah	**183.649.000,00**	**220.000.000**	**(16,52)**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Penurunan beban bantuan sosial tidak ada alokasi pagu anggaran. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp49.566.625

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.566.625 dan Rp49.566.625.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Jumah Penyusutan	***49.566.625***	***49.566.625***	**-**
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	**49.566.625**	**49.566.625**	**-**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp-36.275.360

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-36.275.360 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.275.360	-	-
Jumlah	**36.275.360,00**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian Beban Penanganan Covid-19 TA 2025 dan 2024

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp127.662.900,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.127.662.900,00 dan Rp.190.511.855,00

Defisit LO Rp.-4.369.863.041,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-4.369.863.041,00 dan Rp.-4.058.239.170,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp4.306.760.852

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4.306.760.852 dan Rp.3.995.390.215. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.343.036.212
Diterima dari Entitas Lain	(36.275.360)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**4.306.760.852**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 4.343.036.212, sedangkan DDEL sebesar Rp 36.275.360

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp64.560.711

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.64.560.711,00 dan Rp.127.662.900,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I **: (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

WILAYAH/PROVINSI **: (025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:14 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0	0	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	2,359,242,000	1,865,400,000	493,842,000	-
Beban Persediaan	49,219,228	42,734,183	6,485,045	-
Beban Barang dan Jasa	1,421,335,679	1,339,764,300	81,571,379	-
Beban Pemeliharaan	68,578,975	47,515,200	21,063,775	-
Beban Perjalanan Dinas	274,546,894	493,258,862	(218,711,968)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	183,649,000	220,000,000	(36,351,000)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

WILAYAH/PROVINSI : **(025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:14 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	49,566,625	49,566,625	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	4,406,138,401	4,058,239,170	347,899,231	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,406,138,401)	(4,058,239,170)	(347,899,231)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,275,360	0	36,275,360	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,275,360	0	36,275,360	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	36,275,360	0	36,275,360	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,369,863,041)	(4,058,239,170)	(311,623,871)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,369,863,041)	(4,058,239,170)	(311,623,871)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

WILAYAH/PROVINSI : (025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:14 AM

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	127,662,900	190,511,855	(62,848,955)	(32.99)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,369,863,041)	(4,058,239,170)	(311,623,871)	7.68
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,306,760,852	3,995,390,215	311,370,637	7.79
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(63,102,189)	(62,848,955)	(253,234)	0.4
EKUITAS AKHIR	64,560,711	127,662,900	(63,102,189)	(49.43)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025050500KD

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:15 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**36,275,360**	**36,275,360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	36,275,360	36,275,360	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**36,275,360**	**36,275,360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,493,845,000	4,343,036,212	(150,808,788)	96.64	4,079,430,000	3,995,390,215	(84,039,785)	97.94
1. Belanja Pegawai	2,375,729,000	2,351,242,000	(24,487,000)	98.97	1,920,000,000	1,865,400,000	(54,600,000)	97.16
2. Belanja Barang	2,118,116,000	1,991,794,212	(126,321,788)	94.04	2,159,430,000	2,129,990,215	(29,439,785)	98.64
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025050500KD

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 8:15 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**4,493,845,000**	**4,343,036,212**	**(150,808,788)**	**96.64**	**4,079,430,000**	**3,995,390,215**	**(84,039,785)**	**97.94**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 05**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025050500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 8:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	630,000,000	1,382,729,000	1,376,242,000	0	1,376,242,000	99.53	6,487,000
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	756,000,000	495,000,000	477,000,000	0	477,000,000	96.36	18,000,000
511529	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh	498,000,000	498,000,000	498,000,000	0	498,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	1,884,000,000	2,375,729,000	2,351,242,000	0	2,351,242,000	98.63	24,487,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,884,000,000	2,375,729,000	2,351,242,000	0	2,351,242,000	98.63	24487000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	48,297,000	51,375,000	48,813,174	1,000,000	47,813,174	93.07	3,561,826
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	234,600,000	227,352,000	226,852,000	0	226,852,000	99.78	500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	282,897,000	278,727,000	275,665,174	1,000,000	274,665,174	96.42	4,061,826
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	43,590,000	16,440,000	15,650,000	0	15,650,000	95.19	790,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,300,000	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	1,276,630,000	1,213,110,000	1,097,950,000	0	1,097,950,000	90.51	115,160,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,600,000	10,172,000	10,170,505	0	10,170,505	99.99	1,495
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,328,120,000	1,242,022,000	1,126,070,505	0	1,126,070,505	96.42	115,951,495
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42,709,000	44,237,000	44,213,664	0	44,213,664	99.95	23,336
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	42,709,000	44,237,000	44,213,664	0	44,213,664	99.95	23,336
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	36,800,000	14,600,000	14,600,000	0	14,600,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,800,000	20,600,000	20,600,000	0	20,600,000	100	0
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	30,000,000	29,999,500	0	29,999,500	100	500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,928,000	38,428,000	38,049,475	0	38,049,475	99.01	378,525
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	50,928,000	68,428,000	68,048,975	0	68,048,975	99.5	379,025
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 05**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025050500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 8:15 AM

Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	426,836,000	142,395,000	136,528,894	0	136,528,894	95.88	5,866,106
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3,600,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,100,000	18,347,000	18,347,000	0	18,347,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,750,000	13,875,000	13,875,000	0	13,875,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	477,890,000	104,036,000	103,996,000	0	103,996,000	99.96	40,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	965,176,000	280,453,000	274,546,894	0	274,546,894	99.17	5,906,106
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	180,000,000	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	100	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	325,000,000	118,649,000	118,649,000	0	118,649,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	505,000,000	183,649,000	183,649,000	0	183,649,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,211,630,000	2,118,116,000	1,992,794,212	1,000,000	1,991,794,212	98.52	126321788
	JUMLAH BELANJA	5,095,630,000	4,493,845,000	4,344,036,212	1,000,000	4,343,036,212	96.67	150,808,788

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 025050500KD **Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 05/05/26 8:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,275,360	0	36,275,360	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	36,275,360	0	36,275,360	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	36,275,360	0	36,275,360	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	36,275,360	0	36,275,360	

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

UAPPAW : (025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:15 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	4,135,999	9,671,563	(5,535,564)	(57.24)
JUMLAH ASET LANCAR	**4,135,999**	**9,671,563**	**(5,535,564)**	**(57.24)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	399,791,255	399,791,255	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(331,366,543)	(281,799,918)	(49,566,625)	17.59
JUMLAH ASET TETAP	**68,424,712**	**117,991,337**	**(49,566,625)**	**(42.01)**
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	9,400,000	9,400,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(9,400,000)	(9,400,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**72,560,711**	**127,662,900**	**(55,102,189)**	**(43.16)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	8,000,000	0	8,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**8,000,000**	**0**	**8,000,000**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**8,000,000**	**0**	**8,000,000**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	64,560,711	127,662,900	(63,102,189)	(49.43)
JUMLAH EKUITAS	**64,560,711**	**127,662,900**	**(63,102,189)**	**(49.43)**
JUMLAH EKUITAS	**64,560,711**	**127,662,900**	**(63,102,189)**	**(49.43)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**72,560,711**	**127,662,900**	**(55,102,189)**	**(43.16)**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

WILAYAH/PROVINSI : (025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,135,999	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	399,791,255	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	331,366,543
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	9,400,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	9,400,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	8,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,343,036,212
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	36,275,360	0
0.0	391111	Ekuitas	0	127,662,900
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	36,275,360
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,384,242,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	477,000,000	0
3.0	511529	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh	498,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	47,813,174	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	226,852,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,650,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,300,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,097,950,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10,170,505	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	14,600,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	6,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,999,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,049,475	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	136,528,894	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1,800,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,347,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,875,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103,996,000	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	118,649,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49,566,625	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	49,219,228	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	530,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	50,000,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	15,000,000	0
JUMLAH			**4,855,741,015**	**4,855,741,015**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

WILAYAH/PROVINSI : (025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

WILAYAH/PROVINSI : (025050500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 8:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,343,036,212
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	36,275,360	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	36,275,360
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,376,242,000	0
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	477,000,000	0
3.0	511529	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh	498,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	48,813,174	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	226,852,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	15,650,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,300,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,097,950,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	10,170,505	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	44,213,664	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	14,600,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	6,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,999,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,049,475	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136,528,894	0
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,800,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,347,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,875,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103,996,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	65,000,000	0
3.0	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	118,649,000	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,000,000
JUMLAH			**4,380,311,572**	**4,380,311,572**

Keterangan :

FINAL

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

		Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A						
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran						
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN						
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab		√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE		√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan		√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal		√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual		√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas		√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun		√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI						
		Kesesuaian Saldo		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI		√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.						
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI						
		Persamaan Dasar Akuntansi		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas		√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI						
		To Do List		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			√	Tidak
2		Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√		Ya
3		Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
4		Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			√	Tidak
5		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
6		Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
7		Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			√	Tidak
8		Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			√	Tidak
9		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
10		Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			√	Tidak
11		Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

12		Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah						
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?			√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			√	Tidak
		a. Pagu/DIPA			√	Tidak
		b. Estimasi PNBP			√	Tidak
		c. Belanja			√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		e. Pendapatan			√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		g. Kas BLU			√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran			√	Tidak
		i. Kas Hibah			√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung			√	Tidak
		Rekon Internal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal			√	Tidak
		Daftar MONSAKTI		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?			√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			√	Tidak
6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL						
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal			√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)			√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			√	Tidak
		Terkait Satker BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			√	Tidak
		Hibah Langsung		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			√	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			√	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			√	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**Rp.**		
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**Rp.**		
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			√	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			√	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			√	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA						
		Pengecekan Pos-pos Neraca		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√		Ya

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Saldo pada neraca bernilai wajar		√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√		Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
		Pengecekan Pos-pos LO		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			√	Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			√	Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
		Pengecekan Pos-pos LPE		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Ya
2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			√	Ya
		Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp..... dengan dokumen sumber BAST				
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)						
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB			√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN						
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "AD		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			√	Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			√	Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			√	Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)			√	Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			√	Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			√	Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			√	Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Satker

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAKPA : (0500.417803) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Kristen)
Kode dan Nama Eselon I : (05) Ditjen Bimas Kristen
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU						
		LPSAL BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			√	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			√	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			√	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			√	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			√	Ya
		LAK BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			√	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			√	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			√	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			√	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN						
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang						

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

SANGIDUN, S.Kom, M.AP
NIP. 198207062011011005

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Penyusun Laporan Keuangan

Rochmad
NIP. 197404072007011032

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

REKONSILIASI SAKTI - SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Status Rekonsiliasi	Tanggal SHR	Jumlah Data TDK			Proses SHR / Download SHR
							TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail	
1	02505	299066	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 15:00:39	0	0		Download
2	02505	299073	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 16:00:26	0	0		Download
3	02505	299083	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 02:00:25	0	0		Download
4	02505	299100	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 10:56:49	0	0		Download
5	02505	299137	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
6	02505	299153	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
7	02505	417803	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 13:00:36	0	0		Download
8	02505	417819	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 18:00:26	0	0		Download
9	02505	417887	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-20 15:00:23	0	0		Download
10	02505	418004	KANTOR	2025-12	Rekon selesai Hasil	2026-01-15 11:00:25	0	0		

			KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER		Rekonsiliasi Terbentuk					Download
11	02505	650082	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
12	02505	681935	KANKEMENAG KAB. KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 10:00:22	0	0		Download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299066 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	93,600,000	93,600,000	0
2	Belanja	93,599,200	93,599,200	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	34,697,040	34,697,040	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299073 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,700,000	7,700,000	0
2	Belanja	7,700,000	7,700,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299083 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	9,500,000	9,500,000	0
2	Belanja	9,495,000	9,495,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299100 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	102,000,000	102,000,000	0
2	Belanja	96,000,000	96,000,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299137 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	46,000,000	46,000,000	0
2	Belanja	46,000,000	46,000,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299153 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,700,000	7,700,000	0
2	Belanja	7,692,000	7,692,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417803 - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,694,159,000	3,694,159,000	0
2	Belanja	3,558,532,980	3,558,532,980	0
3	Pengembalian Belanja	-1,000,000	-1,000,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417819 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	284,690,000	284,690,000	0
2	Belanja	284,150,000	284,150,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417887 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:13
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	118,600,000	118,600,000	0
2	Belanja	116,980,625	116,980,625	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,578,320	1,578,320	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 418004 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:14
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	74,296,000	74,296,000	0
2	Belanja	68,289,000	68,289,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 650082 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:14
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,700,000	7,700,000	0
2	Belanja	7,697,559	7,697,559	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 681935 - KANKEMENAG KAB. KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 8:14
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	47,900,000	47,900,000	0
2	Belanja	47,899,848	47,899,848	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB W : 025050500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl.Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 8:17 AM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	4,135,999
132111	Peralatan dan Mesin	399,791,255
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(331,366,543)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	9,400,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(9,400,000)
J U M L A H		**72,560,711**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025050500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 05/05/26 8:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	253,400
1010301003	Penjepit Kertas	27,400
1010301004	Penghapus/Korektor	13,700
1010301005	Buku Tulis	143,500
1010301006	Ordner Dan Map	803,150
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	134,900
1010301010	Alat Perekat	268,612
1010301012	Staples	52,000
1010301013	Isi Staples	19,100
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	82,400
1010302001	Kertas HVS	1,529,837
1010302002	Berbagai Kertas	78,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	626,000
1010304010	Mouse	15,000
1010306010	Batu Baterai	26,000
1010309001	Meterai	36,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	15,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12,000
Jumlah Barang Konsumsi		**4,135,999**
TOTAL		**4,135,999**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025050500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tanggal : 05/05/26 8:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_posisi_neraca_uappa

Kode	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	4,135,999
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
JUMLAH		**4,135,999**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 8:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025050500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**21**	**10,170,505**	**0**	**(1,444,101)**	**(1,444,101)**	**8,726,404**
30501	ALAT KANTOR	1	990,000	0	(99,000)	(99,000)	891,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	20	9,180,505	0	(1,345,101)	(1,345,101)	7,835,404
JUMLAH		**21**	**10,170,505**	**0**	**(1,444,101)**	**(1,444,101)**	**8,726,404**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tanggal : 05/05/26 8:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw_poc

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025050500KD Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	**Peralatan dan Mesin**	**59**	**399,791,255**	**(281,799,918)**	**(49,566,625)**	**(331,366,543)**	**68,424,712**
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	3,850,000	(3,850,000)	0	(3,850,000)	0
30501	ALAT KANTOR	8	52,843,507	(38,212,107)	(4,180,400)	(42,392,507)	14,631,400
30502	ALAT RUMAH TANGGA	8	29,670,800	(25,470,800)	(1,400,000)	(26,870,800)	4,200,000
30601	ALAT STUDIO	2	20,485,000	(20,485,000)	0	(20,485,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	7,650,000	(7,650,000)	0	(7,650,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	24	240,959,448	(155,868,886)	(38,279,975)	(194,148,861)	85,090,562
31002	PERALATAN KOMPUTER	13	35,882,500	(25,725,625)	(4,861,250)	(30,586,875)	10,156,875
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	8,450,000	(4,537,500)	(845,000)	(5,382,500)	3,912,500
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**	**1**	**9,400,000**	**(9,400,000)**	**0**	**(9,400,000)**	**0**
31001	KOMPUTER UNIT	1	9,400,000	(9,400,000)	0	(9,400,000)	0
JUMLAH		**60**	**409,191,255**	**(291,199,918)**	**(49,566,625)**	**(340,766,543)**	**117,991,337**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl. Cetak 05/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,671,563	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	399,791,255	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	281,799,918
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	9,400,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	9,400,000
0.0	391111	Ekuitas	0	127,662,900
JUMLAH			**418,862,818**	**418,862,818**

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025

TINGKAT WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 04 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40
VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 05 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.875.682.050 atau mencapai 99,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.876.028.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp153.689.872 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp161.100; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp153.528.772 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp153.689.872

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.856.974.307 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp1.856.974.307, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.856.974.307.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp134.982.129, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-1.856.974.307 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 1.875.682.050 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp153.689.872

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajaka	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**-**	**-**	**-**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	381.000.000	381.000.000	100,00	597.000.000
Belanja Barang	B.2.2	1.355.178.000	1.354.842.050	99,98	3.250.887.778
Belanja Modal	B.2.3	98.000.000	97.990.000	99,99	65.826.110
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	41.850.000	41.850.000	100,00	-
JUMLAH BE		**1.876.028.000**	**1.875.682.050**	**99,98**	**3.913.713.888**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	161.100	392.984
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**161.100**	**392.984**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	728.303.455	630.313.455
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(574.774.683)	(495.724.310)
Jumlah Aset Tetap		**153.528.772**	**134.589.145**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	-	-
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**153.689.872**	**134.982.129**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	153.689.872	134.982.129
JUMLAH EKUTAS		**153.689.872**	**134.982.129**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**153.689.872**	**134.982.129**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		**-**	**-**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	381.000.000	597.000.000
Beban Persediaan	D.4	3.292.134	9.743.486
Beban Barang dan Jasa	D.5	566.186.000	1.802.124.600
Beban Pemeliharaan	D.6	15.700.000	31.971.032
Beban Perjalanan Dinas	D.7	54.895.800	490.283.176
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	715.000.000	917.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.9	41.850.000	18.750.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	79.050.373	60.178.588
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**1.856.974.307**	**3.927.050.882**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**1.856.974.307**	**(3.927.050.882)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**-**	**-**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**1.856.974.307**	**(3.927.050.882)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		**1.856.974.307**	**(3.927.050.882)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**134.982.129**	**125.644.523**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(1.856.974.307)**	**(3.927.050.882)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**3.924.600**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	3.924.600
Jumlah		**-**	**3.924.600**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.875.682.050	3.932.463.888
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		18.707.743	9.337.606
EKUITAS AKHIR	E.6	**153.689.872**	**134.982.129**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan. Pengintregasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan literatur, penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Kementerian dalam Ditjen-ditjen dan seterusnya sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian Kementerian Agama termasuk organisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Kementerian Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012. Penyempurnaan itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".” Visi ini mencerminkan tujuan Kemenag dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1 Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Beragama;
2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4 Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
b. Ekoteologi;
c. Layanan keagamaan berdampak;
d. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
e. Pesantren berdaya;
f. pemberdayaan ekonomi umat;
g. Sukses penyelenggaraan haji; dan;
h. Digitalisasi tata kelola.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penggabungan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi Satker Sebelumnya. Modul dalam aplikasi SAKTI;

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator;

Laporan Keuangan 2025 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2025 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) adalah 6 satuan kerja

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	635002	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN		1		1
2	635003	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN		1		1
3	299068	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG		1		1
4	635001	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR		1		1
5	299061	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI		1		1
6	417805	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		1		1
Jumlah				6		6

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sev
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	612.000.000	381.000.000
Belanja Barang	4.223.470.000	1.355.178.000
Belanja Modal	98.000.000	98.000.000
Belanja Bantuan Sosial	51.750.000	41.850.000
Jumlah Belanja	**4.985.220.000**	**1.876.028.000**

Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0. Pendapatan ini dari tahun sebelumnya Tidak ada Penurunan/Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pendapatan jasa penjualan atau pemanfaatan Barang Milik Negara atau pengembalian Anggaran Tahun berjalan atau tahun yang lalu dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Pajak sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp0

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 Tidak ada Penurunan/Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pendapatan jasa penjualan atau pemanfaatan Barang Milik Negara atau pengembalian Anggaran Tahun berjalan atau tahun yang lalu. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Belanja Rp1.875.682.050

B.2 Belanja

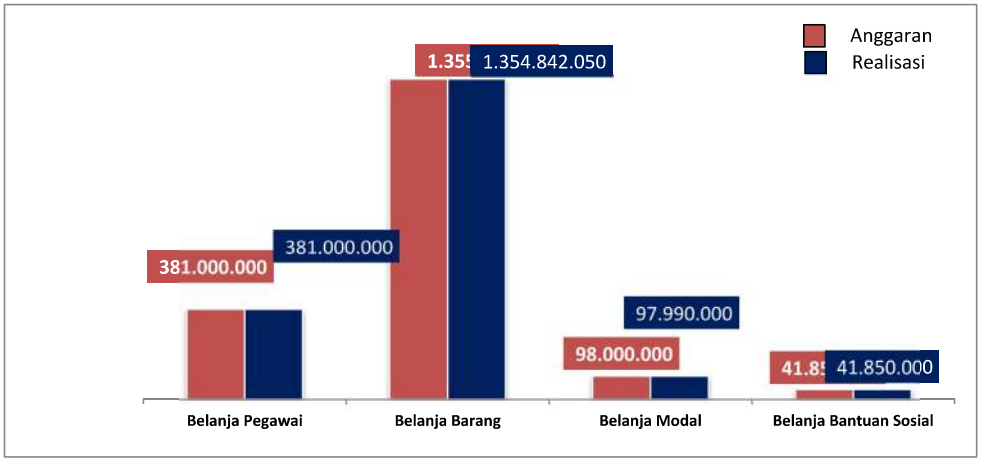
Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.875.682.050 atau 99,98 % dari anggaran belanja sebesar Rp.1.876.028.000 Rincian anggaran dan belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	381.000.000	381.000.000	100,00
Belanja Barang	1.355.178.000	1.354.842.050	99,98
Belanja Modal	98.000.000	97.990.000	99,99
Belanja Bantuan Sosial	41.850.000	41.850.000	100,00
Jumlah	**1.876.028.000**	**1.875.682.050**	**99,98**

Komposisi anggaran dan belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 52,30% Penurunan realisasi belanja tahun berjalan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhitung mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS uang makan PNS uang lembur PNS dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023 tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. dan terbayarnya tenaga PPPK . Berikut rincian belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	381.000.000	597.000.000	(36,18)
Belanja Barang	1.354.842.050	3.250.887.778	(58,32)
Belanja Modal	97.990.000	65.826.110	48,86
Belanja Bantuan Sosial	41.850.000	18.750.000	123,20
Jumlah	**1.875.682.050**	**3.932.463.888**	**(52,30)**

Belanja Pegawai Rp381.000.000

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.000.000 dan Rp597.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 36,18 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Penurunan realisasi belanja pegawai karena belanja gaji pokok anggaran terpusat DIPA Sekretariat Jenderal

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	168.000.000	165.000.000	1,82
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	213.000.000	432.000.000	(50,69)
Jumlah Belanja kotor	**381.000.000**	**597.000.000**	**(36,18)**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**381.000.000**	**597.000.000**	**(36,18)**

Belanja Barang Rp1.354.842.050

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.354.842.050 dan Rp3.250.887.778. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 58,32% dari TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	173.436.000	167.065.600	3,81
Belanja Barang Non Operasional	270.450.000	1.421.559.000	(80,98)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.060.250	9.508.970	(67,82)
Belanja Jasa	120.800.000	213.500.000	(43,42)
Belanja Pemeliharaan	15.700.000	31.971.032	(50,89)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	56.395.800	490.283.176	(88,50)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	715.000.000	917.000.000	(22,03)
Jumlah Belanja Kotor	**1.354.842.050**	**3.250.887.778**	**(58,32)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**1.354.842.050**	**3.250.887.778**	**(58,32)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Belanja Modal Rp97.990.000

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp97.990.000 dan Rp65.826.110. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 48,86% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.990.000	65.826.110	48,86
Jumlah Belanja Kotor	**97.990.000**	**65.826.110**	**48,86**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**97.990.000**	**65.826.110**	**48,86**

Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp97.990.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp97.990.000 dan Rp65.826.110, mengalami kenaikan sebesar 48,86 % bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.990.000	65.826.110	48,86
Jumlah Belanja Kotor	**97.990.000**	**65.826.110**	**48,86**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**97.990.000**	**65.826.110**	**48,86**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Bantuan Sosial Rp41.850.000

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.850.000 dan Rp18.750.000. tersebut pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 123,20 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Kenaikan belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	41.850.000	18.750.000	123,20
Jumlah Belanja Kotor	**41.850.000**	**18.750.000**	**123,20**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**41.850.000**	**18.750.000**	**123,20**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Nama Satker	Jumlah
1	-	-
Jumlah		**15**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp -	Rp -
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp161.100

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp161.100 dan Rp392.984. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
Barang Konsumsi	161.100	392.984
Jumlah	**161.100**	**392.984**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp0

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	0	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp728.303.455

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp728.303.455 dan Rp630.313.455. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**630.313.455**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**728.303.455**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(574.774.683)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**153.528.772**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Penjelasan mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap terdapat pada satker;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Satker Sekjen Tingkat Wilayah ada sebagai berikut; Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp574.774.683

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp574.774.683 dan Rp495.724.310. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	728.303.455	(574.774.683)	153.528.772
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**728.303.455**	**(574.774.683)**	**153.528.772**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu) berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-

Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp0

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-

Mutasi Kurang

-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Muka Kerja Tahun 2025 dari KPPN Nihil	*0*
Jumlah	*0*

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp153.689.872

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp153.689.872. dan Rp134.982.129. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada dan adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Pegawai Rp381.000.000

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp381.000.000 dan Rp597.000.000.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 36,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	168.000.000	165.000.000	1,82
Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	213.000.000	432.000.000	(50,69)
Jumlah	**381.000.000**	**597.000.000**	**(36,18)**

Beban Persediaan Rp3.292.134

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.292.134 dan Rp9.743.486

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 66,21 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	3.292.134	9.743.486	(66,21)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**3.292.134,00**	**9.743.486**	**(66,21)**

Beban Barang dan Jasa Rp566.186.000

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp566.186.000 dan Rp1.802.124.600.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 68,58 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja barang dan jasa pada pemberian bantuan dalam bentuk penanganan pandemi covid 19. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	37.451.000	37.649.600	(0,53)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	137.100.000	128.707.000	6,52
Beban Bahan	8.300.000	79.309.000	(89,53)
Beban Honor Output Kegiatan	1.600.000	40.650.000	(96,06)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	260.550.000	1.301.600.000	(79,98)
Beban Jasa Profesi	3.200.000	95.900.000	(96,66)
Jumlah	**566.186.000**	**1.802.124.600,00**	**(68,58)**

Beban Pemeliharaan Rp15.700.000

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.700.000 dan Rp31.971.032.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 50,89 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan perbaikan aset bmn masih bisa digunakan atau layak pakai Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.700.000	31.971.032	(50,89)
Jumlah	**15.700.000**	**31.971.032**	**(50,89)**

Beban Perjalanan Dinas Rp54.895.800

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp54.895.800 dan Rp490.283.176

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 88,80 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas karena kegiatan atau program berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	28.135.800	148.672.176	(81,08)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.860.000	30.370.000	(34,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.900.000	155.786.000	(95,57)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	155.455.000	(100,00)
Jumlah	**54.895.800,00**	**490.283.176**	**(88,80)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp715.000.000

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp715.000.000 dan Rp917.000.000

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 22,03 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehKenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat rumah ibadah. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	165.000.000	137.000.000,00	20,44
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan	550.000.000	780.000.000,00	(29,49)
Jumlah	**715.000.000,00**	**917.000.000**	**(22,03)**

Beban Bantuan Sosial Rp41.850.000

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp41.850.000 dan Rp18.750.000

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 123,20 disebabkan oleh Kenaikan beban bantuan sosial bertambahnya penerima bantuan sosial untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	41.850.000	18.750.000,00	123,20
Jumlah	**41.850.000**	**18.750.000,00**	**123,20**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp79.050.373

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp79.050.373 dan Rp60.178.588.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Jumah Penyusutan	***79.050.373***	***60.178.588***	***31,36***
Jumlah	**79.050.373**	**60.178.588**	**31,36**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian Beban Penanganan Covid-19 TA 2025 dan 2024

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp134.982.129,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.134.982.129,00 dan Rp.125.644.523,00

Defisit LO Rp.-1.856.974.307,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-1.856.974.307,00 dan Rp.-3.927.050.882,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.924.600 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.924.600. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp1.875.682.050

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.875.682.050 dan Rp.3.932.463.888. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.875.682.050
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**1.875.682.050**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 1.875.682.050, sedangkan DDEL sebesar Rp 0

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp153.689.872

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.153.689.872,00 dan Rp.134.982.129,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

		Objek Penelaahan		**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A						
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran						
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN						
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab		√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE		√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan		√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal		√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual		√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas		√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun		√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI						
		Kesesuaian Saldo		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI		√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.						
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI						
		Persamaan Dasar Akuntansi		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas		√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI						
		To Do List		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			√	Tidak
2		Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√		Ya
3		Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
4		Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			√	Tidak
5		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
6		Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
7		Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			√	Tidak
8		Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			√	Tidak
9		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
10		Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			√	Tidak
11		Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

12		Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah						
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?			√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			√	Tidak
		a. Pagu/DIPA			√	Tidak
		b. Estimasi PNBP			√	Tidak
		c. Belanja			√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		e. Pendapatan			√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		g. Kas BLU			√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran			√	Tidak
		i. Kas Hibah			√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung			√	Tidak
		Rekon Internal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal			√	Tidak
		Daftar MONSAKTI		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?			√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			√	Tidak
6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL						
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal			√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)			√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			√	Tidak
		Terkait Satker BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			√	Tidak
		Hibah Langsung		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			√	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			√	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			√	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**Rp.**		
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**Rp.**		
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			√	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			√	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			√	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA						
		Pengecekan Pos-pos Neraca		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√		Ya

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Saldo pada neraca bernilai wajar		√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√		Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
		Pengecekan Pos-pos LO		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			√	Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			√	Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
		Pengecekan Pos-pos LPE		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Ya
2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			√	Ya
		Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp..... dengan dokumen sumber BAST				
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)						
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB			√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN						
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "AD		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			√	Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			√	Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			√	Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)			√	Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			√	Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			√	Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			√	Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417805) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Hindu)
Kode dan Nama Eselon I : (07) Ditjen Bimas Hindu
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU						
		LPSAL BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			√	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			√	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			√	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			√	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			√	Ya
		LAK BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			√	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			√	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			√	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			√	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN						
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang						

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

SANGIDUN, S.Kom, M.AP
NIP. 198207062011011005

Sidoarjo, 4 Mei 2026
Penyusun Laporan Keuangan

Rochmad, S.Ag
NIP. 197404072007011032

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I **: (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**

WILAYAH/PROVINSI **: (025070500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0	0	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	381,000,000	597,000,000	(216,000,000)	-
Beban Persediaan	3,292,134	9,743,486	(6,451,352)	-
Beban Barang dan Jasa	566,186,000	1,802,124,600	(1,235,938,600)	-
Beban Pemeliharaan	15,700,000	31,971,032	(16,271,032)	-
Beban Perjalanan Dinas	54,895,800	490,283,176	(435,387,376)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	715,000,000	917,000,000	(202,000,000)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**

WILAYAH/PROVINSI : **(025070500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:12 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	41,850,000	18,750,000	23,100,000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	79,050,373	60,178,588	18,871,785	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	1,856,974,307	3,927,050,882	(2,070,076,575)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,856,974,307)	(3,927,050,882)	2,070,076,575	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,856,974,307)	(3,927,050,882)	2,070,076,575	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,856,974,307)	(3,927,050,882)	2,070,076,575	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

WILAYAH/PROVINSI : (025070500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:12 AM
Halaman : 1
lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	134,982,129	125,644,523	9,337,606	7.43
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,856,974,307)	(3,927,050,882)	2,070,076,575	(52.71)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	3,924,600	(3,924,600)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	3,924,600	(3,924,600)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,875,682,050	3,932,463,888	(2,056,781,838)	(52.3)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	18,707,743	9,337,606	9,370,137	100.35
EKUITAS AKHIR	153,689,872	134,982,129	18,707,743	13.86

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025070500KD

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:12 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,876,028,000	1,875,682,050	(345,950)	99.98	3,952,050,000	3,932,463,888	(19,586,112)	99.5
1. Belanja Pegawai	381,000,000	381,000,000	0	100.00	597,000,000	597,000,000	0	100
2. Belanja Barang	1,355,178,000	1,354,842,050	(335,950)	99.98	3,270,100,000	3,250,887,778	(19,212,222)	99.41
3. Belanja Modal	98,000,000	97,990,000	(10,000)	99.99	66,200,000	65,826,110	(373,890)	99.44
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	41,850,000	41,850,000	0	100.00	18,750,000	18,750,000	0	100
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025070500KD

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:12 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**1,876,028,000**	**1,875,682,050**	**(345,950)**	**99.98**	**3,952,050,000**	**3,932,463,888**	**(19,586,112)**	**99.5**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 07**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025070500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	192,000,000	168,000,000	168,000,000	0	168,000,000	100	0
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	420,000,000	213,000,000	213,000,000	0	213,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	612,000,000	381,000,000	381,000,000	0	381,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	612,000,000	381,000,000	381,000,000	0	381,000,000	100	0
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	41,120,000	35,951,000	35,951,000	0	35,951,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	500,000	385,000	0	385,000	77	115,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	168,720,000	137,100,000	137,100,000	0	137,100,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	211,340,000	173,551,000	173,436,000	0	173,436,000	92.33	115,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	145,275,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	100	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	59,350,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	1,264,000,000	260,550,000	260,550,000	0	260,550,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,468,625,000	270,450,000	270,450,000	0	270,450,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,020,000	3,063,000	3,060,250	0	3,060,250	99.91	2,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	11,020,000	3,063,000	3,060,250	0	3,060,250	99.91	2,750
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	120,000,000	117,600,000	117,600,000	0	117,600,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	173,020,000	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	293,020,000	120,800,000	120,800,000	0	120,800,000	100	0
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,100,000	15,898,000	15,700,000	0	15,700,000	98.75	198,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	25,100,000	15,898,000	15,700,000	0	15,700,000	98.75	198,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227,160,000	29,656,000	29,635,800	0	29,635,800	99.93	20,200
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,370,000	19,860,000	19,860,000	0	19,860,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 07**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025070500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:13 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	242,470,000	6,900,000	6,900,000	0	6,900,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	433,365,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	954,365,000	56,416,000	56,395,800	0	56,395,800	74.98	20,200
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	285,000,000	165,000,000	165,000,000	0	165,000,000	100	0
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	975,000,000	550,000,000	550,000,000	0	550,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	1,260,000,000	715,000,000	715,000,000	0	715,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,223,470,000	1,355,178,000	1,354,842,050	0	1,354,842,050	92.22	335950
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98,000,000	98,000,000	97,990,000	0	97,990,000	99.99	10,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	98,000,000	98,000,000	97,990,000	0	97,990,000	99.99	10,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	98,000,000	98,000,000	97,990,000	0	97,990,000	99.99	10000
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	51,750,000	41,850,000	41,850,000	0	41,850,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	51,750,000	41,850,000	41,850,000	0	41,850,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	51,750,000	41,850,000	41,850,000	0	41,850,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	4,985,220,000	1,876,028,000	1,875,682,050	0	1,875,682,050	99.98	345,950

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 0 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : null **null**
WILAYAH/PROVINSI : null **null**

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 04/05/26 9:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null null	null null					
	null	null	null	null	null	0
	null	null	null	null	null	0
	JUMLAH PENDAPATAN	null	null	null	null	0

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

UAPPAW : (025070500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:13 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	161,100	392,984	(231,884)	(59.01)
JUMLAH ASET LANCAR	**161,100**	**392,984**	**(231,884)**	**(59.01)**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	728,303,455	630,313,455	97,990,000	15.55
AKUMULASI PENYUSUTAN	(574,774,683)	(495,724,310)	(79,050,373)	15.95
JUMLAH ASET TETAP	**153,528,772**	**134,589,145**	**18,939,627**	**14.07**
JUMLAH ASET	**153,689,872**	**134,982,129**	**18,707,743**	**13.86**

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	153,689,872	134,982,129	18,707,743	13.86
JUMLAH EKUITAS	**153,689,872**	**134,982,129**	**18,707,743**	**13.86**
JUMLAH EKUITAS	**153,689,872**	**134,982,129**	**18,707,743**	**13.86**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**153,689,872**	**134,982,129**	**18,707,743**	**13.86**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

WILAYAH/PROVINSI : (025070500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:13 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	161,100	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	728,303,455	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	574,774,683
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,875,682,050
0.0	391111	Ekuitas	0	134,982,129
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	168,000,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	213,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	37,451,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	385,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	137,100,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	8,300,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,600,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	260,550,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	117,600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,200,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,700,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28,135,800	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,860,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,900,000	0
3.0	526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	165,000,000	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	550,000,000	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	41,850,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79,050,373	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,292,134	0
JUMLAH			**2,585,438,862**	**2,585,438,862**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

WILAYAH/PROVINSI : (025070500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:13 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,875,682,050
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	168,000,000	0
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	213,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	35,951,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	385,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	137,100,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	8,300,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,600,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	260,550,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,060,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	117,600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,200,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,700,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,635,800	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,860,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,900,000	0
3.0	526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	165,000,000	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	550,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97,990,000	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	41,850,000	0
JUMLAH			**1,875,682,050**	**1,875,682,050**

Keterangan :

FINAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

REKONSILIASI SAKTI - SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Status Rekonsiliasi	Tanggal SHR	Jumlah Data TDK			Proses SHR / Download SHR
							TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail	
1	02507	299061	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 17:00:27	0	0		Download
2	02507	299068	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
3	02507	417805	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 16:00:29	0	0		Download
4	02507	635001	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 10:56:49	0	0		Download
5	02507	635002	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 05:00:23	0	0		Download
6	02507	635003	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 10:00:24	0	0		Download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BANYUWANGI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299061 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 1:33
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	218,110,000	218,110,000	0
2	Belanja	218,094,300	218,094,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299068 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 1:33
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	150,742,000	150,742,000	0
2	Belanja	150,740,000	150,740,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417805 - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 1:33
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,140,567,000	1,140,567,000	0
2	Belanja	1,140,436,750	1,140,436,750	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 635001 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 1:33
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	161,410,000	161,410,000	0
2	Belanja	161,410,000	161,410,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 635002 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 1:33
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	106,941,000	106,941,000	0
2	Belanja	106,941,000	106,941,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BONDOWOSO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 635003 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PROBOLINGGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 1:33
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	98,258,000	98,258,000	0
2	Belanja	98,060,000	98,060,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2025

TINGKAT WILAYAH

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan Laporan iv

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 2

III Laporan Operasional 3

IV Laporan Perubahan Ekuitas 5

V Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum 5
- A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
- A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- A.3 Basis Akuntansi
- A.4 Dasar Pengukuran
- A.5 Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
- B.1 Pendapatan
- B.1.2 Penerimaan Pajak
- B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
- B.2 Belanja
- B.2.1 Belanja Pegawai
- B.2.2 Belanja Barang
- B.2.3 Belanja Modal
- B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
- B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
- C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
- C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
- C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)
- C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
- C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- C.7 Piutang Bukan Pajak
- C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
- C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.13 Persediaan
- C.14 Persediaan yang Belum Diregister
- C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.19 Tanah
- C.20 Tanah Belum Diregister
- C.21 Peralatan dan Mesin
- C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.23 Gedung dan Bangunan
- C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.27 Aset Tetap Lainnya
- C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.32 Aset Tak Berwujud

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir
F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40
VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 5 Mei 2026

Kepala,

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I
NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.784.436 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.784.436 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.563.622.784 atau mencapai 99,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.576.331.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp77.593.320 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp21.503.229; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp56.090.091 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp77.593.320

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.586.837.362 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp3.586.837.362, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.784.436 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp3.583.052.926.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp100.807.898, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-3.583.052.926 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3.559.838.348 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp77.593.320

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Perpajaka	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	3.784.436	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**3.784.436**	**-**	**-**
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	1.886.954.000	1.875.954.000	99,42	1.995.954.000
Belanja Barang	B.2.2	1.689.377.000	1.687.668.784	99,90	3.999.894.187
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	46.467.600
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BE		**3.576.331.000**	**3.563.622.784**	**99,64**	**6.042.315.787**

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	21.503.229	9.732.424
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		**21.503.229**	**9.732.424**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**-**	**-**
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	753.460.626	753.460.626
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(697.370.535)	(662.385.152)
Jumlah Aset Tetap		**56.090.091**	**91.075.474**
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	-	-
Jumlah Aset Lainnya		**-**	**-**
JUMLAH ASET		**77.593.320**	**100.807.898**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	77.593.320	100.807.898
JUMLAH EKUTAS		**77.593.320**	**100.807.898**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**77.593.320**	**100.807.898**

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		**-**	**-**
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	1.875.954.000	1.995.954.000
Beban Persediaan	D.4	20.930.320	24.066.809
Beban Barang dan Jasa	D.5	847.814.725	1.393.274.158
Beban Pemeliharaan	D.6	98.460.842	99.709.100
Beban Perjalanan Dinas	D.7	163.992.092	615.769.267
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	544.700.000	1.870.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	34.985.383	37.566.320
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		**3.586.837.362**	**6.036.339.654**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**3.586.837.362**	**(6.036.339.654)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	**-**	**-**
Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	3.784.436	**-**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	**-**	**-**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**3.784.436**	**-**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**3.583.052.926**	**(6.036.339.654)**
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		**-**	**-**
Beban Perjalanan Dinas		**-**	**-**
Beban Persediaan		**-**	**-**
-		**-**	**-**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**3.583.052.926**	**(6.036.339.654)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**100.807.898**	**94.831.765**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**(3.583.052.926)**	**(6.036.339.654)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	**-**	**-**
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		**-**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.559.838.348	6.042.315.787
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(23.214.578)	5.976.133
EKUITAS AKHIR	E.6	**77.593.320**	**100.807.898**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan. Pengintregasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan literatur, penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Kementerian dalam Ditjen-ditjen dan seterusnya sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian Kementerian Agama termasuk organisasi “Integrated Type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Kementerian Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012. Penyempurnaan itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umroh;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Raya Juanda No 26 Sidoarjo. Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".” Visi ini mencerminkan tujuan Kemenag dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, berdaya guna, berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1 Meningkatkan Pemahaman Kehidupan Beragama;
2 Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3 Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4 Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Kerukunan dan cinta kemanusiaan;
b. Ekoteologi;
c. Layanan keagamaan berdampak;
d. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;
e. Pesantren berdaya;
f. pemberdayaan ekonomi umat;
g. Sukses penyelenggaraan haji; dan;
h. Digitalisasi tata kelola.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penggabungan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Perbedaan SAKTI Dengan Aplikasi Satker Sebelumnya. Modul dalam aplikasi SAKTI;

1. Modul Penganggaran;
2. Modul Komitmen;
3. Modul Pembayaran;
4. Modul Bendahara;
5. Modul Persediaan;
6. Modul Aset Tetap;
7. Modul Pelaporan;
8. Modul Administrator;

Laporan Keuangan 2025 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2025 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) adalah 12 satuan kerja

No	Kode Wilayah	Satker	Jumah dan Jenis			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	'052549	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO		1		1
2	'055926	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU		1		1
3	'052152	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR		1		1
4	299062	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI		1		1

5	299148	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN		1		1
6	418007	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER		1		1
7	417806	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		1		1
8	299069	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG		1		1
9	299133	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG		1		1
10	309129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO		1		1
11	417823	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA		1		1
12	'055737	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI		1		1
Jumlah				**12**		**12**

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sev
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

  Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap	
Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	2.313.594.000	1.886.954.000
Belanja Barang	2.847.800.000	1.689.377.000
Belanja Modal	40.000.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**5.201.394.000**	**3.576.331.000**

Pendapatan Rp3.784.436

B.1 Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.784.436 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.784.436. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pendapatan pengembalian belanja barang tahun yang lalu dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	3.784.436	-
Jumlah	**-**	**3.784.436**	**-**

Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.784.436	-	-
Jumlah	**3.784.436**	**-**	**-**

Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak sebesar persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Pendapatan	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	**-**	**-**	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp3.784.436

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp3.784.436 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dari TA 2024 Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak dikarenakan pengembalian belanja barang tahun yang lalu. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.784.436	-	-
Jumlah	**3.784.436**	**-**	**-**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	**3.784.436**	**-**	**-**

Belanja Rp3.563.622.784

B.2 Belanja

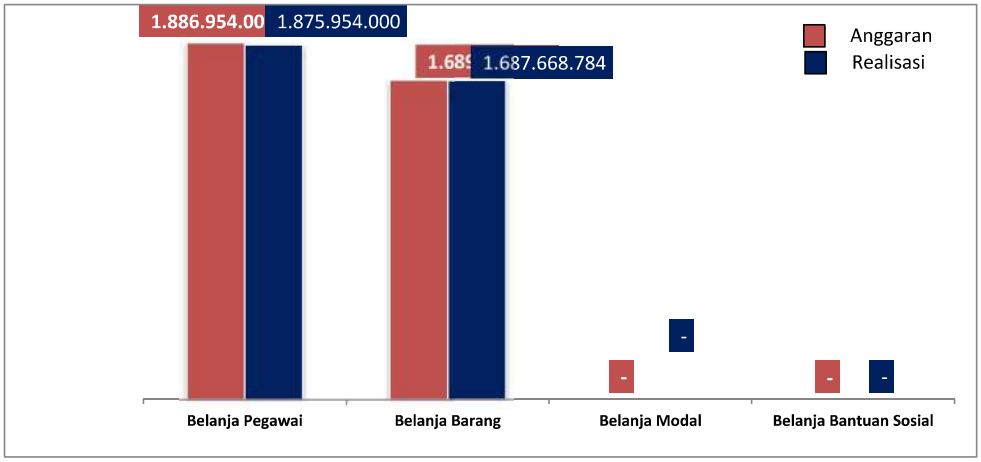
Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp3.563.622.784 atau 99,64 % dari anggaran belanja sebesar Rp.3.576.331.000 Rincian anggaran dan belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	1.886.954.000	1.875.954.000	99,42
Belanja Barang	1.689.377.000	1.687.668.784	99,90
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**3.576.331.000**	**3.563.622.784**	**99,64**

Komposisi anggaran dan belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 41,02% Kenaikan realisasi belanja tahun berjalan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terhitung mulai tahun anggaran 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai satker-satker lingkup Kemenag meliputi gaji dan tunjangan melekat PNS uang makan PNS uang lembur PNS dan tunjangan guru/pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan swasta/badan/komisi yang dilaksanakan dengan beban DIPA tahun anggaran 2023 tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. dan terbayarnya tenaga PPPK . Berikut rincian belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	1.875.954.000	1.995.954.000	(6,01)
Belanja Barang	1.687.668.784	3.999.894.187	(57,81)
Belanja Modal	-	46.467.600	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**3.563.622.784**	**6.042.315.787**	**(41,02)**

Belanja Pegawai Rp1.875.954.000

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.875.954.000 dan Rp1.995.954.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 6,01 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Penurunan realisasi belanja pegawai karena belanja gaji pokok anggaran terpusat DIPA Sekretariat Jenderal

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1.041.954.000	753.954.000	38,20
Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	834.000.000	1.242.000.000	(32,85)
Jumlah Belanja kotor	**1.875.954.000**	**1.995.954.000**	**(6,01)**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**1.875.954.000**	**1.995.954.000**	**(6,01)**

Belanja Barang Rp1.687.668.784

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.687.668.784 dan Rp3.999.894.187. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 57,81% dari TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	163.509.775	134.243.030	21,80
Belanja Barang Non Operasional	665.704.950	1.209.086.600	(44,94)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32.701.125	26.536.262	23,23
Belanja Jasa	18.600.000	44.549.928	(58,25)
Belanja Pemeliharaan	98.460.842	99.709.100	(1,25)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	163.992.092	615.769.267	(73,37)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	544.700.000	1.870.000.000	(70,87)
Jumlah Belanja Kotor	**1.687.668.784**	**3.999.894.187**	**(57,81)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**1.687.668.784**	**3.999.894.187**	**(57,81)**

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	-

Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp46.467.600. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**46.467.600**	**(100,00)**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**46.467.600**	**(100,00)**

Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp46.467.600, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal tahun berjalan dikarena perbaikan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A.2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	46.467.600	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**46.467.600**	**(100,00)**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**46.467.600**	**(100,00)**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2025	T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Nama Satker	Jumlah
1	-	-
Jumlah		

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-		
Jumlah		

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya dan setara kas	Rp -	Rp -
Jumlah	**Rp -**	**Rp -**

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Beban Bantuan Sosial Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Pegawai Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**-**		**-**

Persediaan Rp21.503.229

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp21.503.229 dan Rp9.732.424. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	T.A.2025	T.A. 2024
Barang Konsumsi	21.503.229	9.732.424
Jumlah	**21.503.229**	**9.732.424**

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka pengangan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	T.A.2025	T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	T.A.2025	T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	**-**		**-**
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

Tanah Rp0

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
-	-	0	-
Jumlah			**-**

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp753.460.626

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp753.460.626 dan Rp753.460.626. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**753.460.626**
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**753.460.626**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(697.370.535)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**56.090.091**

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Penjelasan mutasi tambah peralatan dan mesin / aset tetap terdapat pada satker;

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada mutasi kurang peralatan dan mesin / aset tetap

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp0

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	**-**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan Satker Sekjen Tingkat Wilayah ada sebagai berikut; Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	**-**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp697.370.535

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp697.370.535 dan Rp662.385.152. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	753.460.626	(697.370.535)	56.090.091
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		**753.460.626**	**(697.370.535)**	**56.090.091**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		**-**

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha) berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-

Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	**-**
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	**-**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain Rp0

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	**-**
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**-**

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-

Mutasi Kurang

-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Hibah Langsung yang belum disahkan	-
Jumlah	**-**

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang Muka Kerja Tahun 2025 dari KPPN sudah Nihil	*0*
Jumlah	*0*

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	T.A.2025	T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
	-	-
	-	-
Total	**-**	**-**

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp77.593.320

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp77.593.320. dan Rp100.807.898. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada dan adalah sebesar Rp0 dan Rp0. pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Pegawai Rp1.875.954.000

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.875.954.000 dan Rp1.995.954.000.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 6,01 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1.041.954.000	753.954.000	38,20
Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	834.000.000	1.242.000.000	(32,85)
Jumlah	**1.875.954.000**	**1.995.954.000**	**(6,01)**

Beban Persediaan Rp20.930.320

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.930.320 dan Rp24.066.809

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 13,03 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	20.930.320	24.066.809	(13,03)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**20.930.320,00**	**24.066.809**	**(13,03)**

Beban Barang dan Jasa Rp847.814.725

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp847.814.725 dan Rp1.393.274.158.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 39,15 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja barang dan jasa pada belanja sewa sdh tidak ada pada DIPA Masing2 Satker. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	62.769.775	48.893.030	28,38
Beban Bahan	2.454.950	81.036.600	(96,97)
Beban Honor Output Kegiatan	1.450.000	8.050.000	(81,99)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	661.800.000	1.120.000.000	(40,91)
Beban Sewa	9.000.000	-	-
	-	-	-
Jumlah	**847.814.725**	**1.393.274.158,00**	**(39,15)**

Beban Pemeliharaan Rp98.460.842

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp98.460.842 dan Rp99.709.100.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,25 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan perbaikan aset bmn masih bisa digunakan atau layak pakai Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.460.842	99.709.100	(1,25)
Jumlah	**98.460.842**	**99.709.100**	**(1,25)**

Beban Perjalanan Dinas Rp163.992.092

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp163.992.092 dan Rp615.769.267

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 73,37 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas karena kegiatan atau program berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	138.597.092	285.474.267	(51,45)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.275.000	10.500.000	(30,71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	45.600.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.120.000	274.195.000	(93,39)
Jumlah	**163.992.092,00**	**615.769.267**	**(73,37)**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp544.700.000

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp544.700.000 dan Rp1.870.000.000

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 70,87 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehKenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat rumah ibadah. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	110.500.000	550.000.000,00	(79,91)
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan	434.200.000	1.320.000.000,00	(67,11)
Jumlah	**544.700.000,00**	**1.870.000.000**	**(70,87)**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh Kenaikan beban bantuan sosial bertambahnya penerima bantuan sosial untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang. Rincian Tahun

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp34.985.383

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.985.383 dan Rp37.566.320.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Jumah Penyusutan	***34.985.383***	***37.566.320***	***(6,87)***
Jumlah	**34.985.383**	**37.566.320**	**(6,87)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp3.784.436

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.784.436 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	**(3.784.436,00)**	**-**	**-**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A.2025	T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian Beban Penanganan Covid-19 TA 2025 dan 2024

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp100.807.898,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.100.807.898,00 dan Rp.94.831.765,00

Defisit LO Rp.-3.583.052.926,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-3.583.052.926,00 dan Rp.-6.036.339.654,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	**-**

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	**-**

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp3.559.838.348

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.559.838.348 dan Rp.6.042.315.787. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.563.622.784
Diterima dari Entitas Lain	(3.784.436)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**3.559.838.348**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 3.563.622.784, sedangkan DDEL sebesar Rp 3.784.436

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		**-**

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		**-**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		**-**

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp77.593.320

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.77.593.320,00 dan Rp.100.807.898,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025080500KD

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**0**	**3,784,436**	**3,784,436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,784,436	3,784,436	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**0**	**3,784,436**	**3,784,436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,576,331,000	3,563,622,784	(12,708,216)	99.64	6,050,488,000	6,042,315,787	(8,172,213)	99.86
1. Belanja Pegawai	1,886,954,000	1,875,954,000	(11,000,000)	99.42	1,995,954,000	1,995,954,000	0	100
2. Belanja Barang	1,689,377,000	1,687,668,784	(1,708,216)	99.90	4,007,534,000	3,999,894,187	(7,639,813)	99.81
3. Belanja Modal	0	0	0	0	47,000,000	46,467,600	(532,400)	98.87
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025080500KD

Tgl Data : 05/05/26 1:29 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**3,576,331,000**	**3,563,622,784**	**(12,708,216)**	**99.64**	**6,050,488,000**	**6,042,315,787**	**(8,172,213)**	**99.86**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

UAPPAW : (025080500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	21,503,229	9,732,424	11,770,805	120.94
JUMLAH ASET LANCAR	**21,503,229**	**9,732,424**	**11,770,805**	**120.94**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	753,460,626	753,460,626	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(697,370,535)	(662,385,152)	(34,985,383)	5.28
JUMLAH ASET TETAP	**56,090,091**	**91,075,474**	**(34,985,383)**	**(38.41)**
JUMLAH ASET	**77,593,320**	**100,807,898**	**(23,214,578)**	**(23.03)**

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	77,593,320	100,807,898	(23,214,578)	(23.03)
JUMLAH EKUITAS	**77,593,320**	**100,807,898**	**(23,214,578)**	**(23.03)**
JUMLAH EKUITAS	**77,593,320**	**100,807,898**	**(23,214,578)**	**(23.03)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**77,593,320**	**100,807,898**	**(23,214,578)**	**(23.03)**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I **: (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

WILAYAH/PROVINSI **: (025080500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0	0	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	1,875,954,000	1,995,954,000	(120,000,000)	-
Beban Persediaan	20,930,320	24,066,809	(3,136,489)	-
Beban Barang dan Jasa	847,814,725	1,393,274,158	(545,459,433)	-
Beban Pemeliharaan	98,460,842	99,709,100	(1,248,258)	-
Beban Perjalanan Dinas	163,992,092	615,769,267	(451,777,175)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	544,700,000	1,870,000,000	(1,325,300,000)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA **: (025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I **: (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

WILAYAH/PROVINSI **: (025080500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	34,985,383	37,566,320	(2,580,937)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	3,586,837,362	6,036,339,654	(2,449,502,292)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,586,837,362)	(6,036,339,654)	2,449,502,292	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,784,436	0	3,784,436	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,784,436	0	3,784,436	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,784,436	0	3,784,436	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,583,052,926)	(6,036,339,654)	2,453,286,728	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,583,052,926)	(6,036,339,654)	2,453,286,728	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

WILAYAH/PROVINSI : (025080500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM
Halaman : 1
lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	100,807,898	94,831,765	5,976,133	6.3
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,583,052,926)	(6,036,339,654)	2,453,286,728	(40.64)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,559,838,348	6,042,315,787	(2,482,477,439)	(41.08)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(23,214,578)	5,976,133	(29,190,711)	(488.45)
EKUITAS AKHIR	77,593,320	100,807,898	(23,214,578)	(23.03)

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 08**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025080500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 7:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,089,594,000	1,041,954,000	1,041,954,000	0	1,041,954,000	100	0
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	1,224,000,000	845,000,000	834,000,000	0	834,000,000	98.7	11,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	2,313,594,000	1,886,954,000	1,875,954,000	0	1,875,954,000	99.35	11,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,313,594,000	1,886,954,000	1,875,954,000	0	1,875,954,000	99.35	11000000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	83,622,000	62,822,000	62,769,775	0	62,769,775	99.92	52,225
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	0	0	0	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	94,212,000	100,740,000	100,740,000	0	100,740,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	178,834,000	163,562,000	163,509,775	0	163,509,775	66.64	52,225
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	9,695,000	2,455,000	2,454,950	0	2,454,950	100	50
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,350,000	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	955,700,000	661,800,000	661,800,000	0	661,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	973,745,000	665,705,000	665,704,950	0	665,704,950	100	50
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,860,000	33,340,000	32,701,125	0	32,701,125	98.08	638,875
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	21,860,000	33,340,000	32,701,125	0	32,701,125	98.08	638,875
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	30,798,000	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	45,798,000	18,600,000	18,600,000	0	18,600,000	100	0
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96,310,000	98,574,000	98,460,842	0	98,460,842	99.89	113,158
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	96,310,000	98,574,000	98,460,842	0	98,460,842	99.89	113,158
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	351,946,000	139,501,000	138,597,092	0	138,597,092	99.35	903,908

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 08**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 025080500KD**	**Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 7:45 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,550,000	7,275,000	7,275,000	0	7,275,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43,600,000	0	0	0	0	0	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	230,057,000	18,120,000	18,120,000	0	18,120,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	635,153,000	164,896,000	163,992,092	0	163,992,092	74.84	903,908
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	330,000,000	110,500,000	110,500,000	0	110,500,000	100	0
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	550,000,000	434,200,000	434,200,000	0	434,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	880,000,000	544,700,000	544,700,000	0	544,700,000	100	0
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	16,100,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	16,100,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,847,800,000	1,689,377,000	1,687,668,784	0	1,687,668,784	83.18	1708216
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	5,201,394,000	3,576,331,000	3,563,622,784	0	3,563,622,784	99.64	12,708,216

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
WILAYAH/PROVINSI : 025080500KD **Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 05/05/26 7:46 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,784,436	0	3,784,436	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,784,436	0	3,784,436	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	3,784,436	0	3,784,436	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	3,784,436	0	3,784,436	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

WILAYAH/PROVINSI : (025080500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	21,503,229	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	753,460,626	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	697,370,535
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,563,622,784
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,784,436	0
0.0	391111	Ekuitas	0	100,807,898
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,784,436
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,041,954,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	834,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	62,769,775	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	100,740,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,454,950	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,450,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	661,800,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,460,842	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	138,597,092	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,275,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,120,000	0
3.0	526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	110,500,000	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	434,200,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34,985,383	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	20,930,320	0
JUMLAH			**4,365,585,653**	**4,365,585,653**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (08) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

WILAYAH/PROVINSI : (025080500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 7:45 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,563,622,784
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,784,436	0
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,784,436
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1,041,954,000	0
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	834,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	62,769,775	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	100,740,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,454,950	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,450,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	661,800,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,701,125	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,460,842	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138,597,092	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,275,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,120,000	0
3.0	526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	110,500,000	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	434,200,000	0
JUMLAH			**3,567,407,220**	**3,567,407,220**

Keterangan :

FINAL

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

		Objek Penelaahan		**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A						
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran						
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN						
		Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Pernyataan Tanggung Jawab		√		Ada
2		Face LRA, Neraca, LO dan LPE		√		Ada
3		Catatan atas Laporan Keuangan		√		Ada
		Laporan Keuangan Tambahan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal		√		Ada
2		Neraca Percobaan Akrual		√		Ada
3		Neraca Percobaan Kas		√		Ada
4		Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun		√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI						
		Kesesuaian Saldo		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI		√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.						
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI						
		Persamaan Dasar Akuntansi		**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		√		Sama
2		Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		√		Sama
3		Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas		√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI						
		To Do List		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan			√	Tidak
2		Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		√		Ya
3		Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
4		Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan			√	Tidak
5		Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
6		Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan			√	Tidak
7		Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan			√	Tidak
8		Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan			√	Tidak
9		Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)			√	Tidak
10		Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang			√	Tidak
11		Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

12		Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan			√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah						
		Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?			√	Tidak
2		Adakah "TDK COA" yang BEDA?			√	Tidak
3		Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?			√	Tidak
		a. Pagu/DIPA			√	Tidak
		b. Estimasi PNBP			√	Tidak
		c. Belanja			√	Tidak
		d. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		e. Pendapatan			√	Tidak
		f. Pengembangan Belanja			√	Tidak
		g. Kas BLU			√	Tidak
		h. Kas di Bendahara Pengeluaran			√	Tidak
		i. Kas Hibah			√	Tidak
		j. Pengesahan Hibah Langsung			√	Tidak
		Rekon Internal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Selisih Rekon Internal			√	Tidak
		Daftar MONSAKTI		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)			√	Ada/Tidak
2		Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)			√	Ada/Tidak
3		Adakah Neraca Tidak Balance?			√	Tidak
4		Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)			√	Tidak
5		Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?			√	Tidak
6		Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)			√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL						
		Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.		Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual			√	Tidak
2		Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas			√	Tidak
3		Terdapat Saldo bernilai desimal			√	Tidak
		Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√		Ya
2		Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√		Ya
3		Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
4		Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
5		Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√		Ya
6		Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√		Ya
7		Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√		Ya
		Akun-Akun yang tidak boleh ada		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			√	Tidak
3		Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			√	Tidak
4		Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			√	Tidak
5		Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"			√	Tidak
6		Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			√	Tidak
7		Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			√	Tidak
8		Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)			√	Tidak
9		Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN			√	Tidak
10		Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)			√	Tidak
11		Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)			√	Tidak
12		Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)			√	Tidak
13		Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)			√	Tidak
		Jika Bukan Satker BLU		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			√	Tidak
2		Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			√	Tidak
3		Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			√	Tidak
4		Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			√	Tidak
		Terkait Satker BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			√	Ada/Tidak
		Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial			√	Tidak
2		Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI			√	Tidak
		Hibah Langsung		**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
		Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

1		Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			√	Ada/Tidak
2		Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			√	Ada/Tidak
3		Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			√	Ya
4		Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			√	Ya
5		Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			√	Ya
		Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			√	Ada/Tidak
1		Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			√	Ya
		Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**Rp.**		
2		Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**Rp.**		
3		Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			√	Tidak
		Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**			√	Ya/Tidak
2		Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			√	Ya/Tidak
3		Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			√	Ya
		Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			√	Ya/Tidak
2		Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			√	Ya/Tidak
		Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk				
		Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA						
		Pengecekan Pos-pos Neraca		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√		Ya

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

2		Saldo pada neraca bernilai wajar		√		Ya
3		Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√		Ya
4		Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√		Ya
5		Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√		Ya
6		Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?			√	Tidak
7		Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√		Ya
8		Terdapat saldo bernilai desimal			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
		Pengecekan Pos-pos LO		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)			√	Tidak
2		Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			√	Tidak
3		Terdapat kodefikasi atau uraian akun null			√	Tidak
4		Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang			√	Ya
5		Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			√	Ya/Tidak
6		Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			√	Ya/Tidak
7		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
		Pengecekan Pos-pos LPE		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√		Ya
2		Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			√	Ya/Tidak
3		Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			√	Tidak
4		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
		Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			√	Ya
		Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp..... disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp....., transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp..... dengan dokumen sumber BAST				
2		Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)						
		Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Terdapat saldo negatif di LRAB			√	Tidak
2		Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			√	Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			√	Tidak
4		Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			√	Tidak
5		Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			√	Tidak
6		Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya/Tidak
7		Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN						
		Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "AD		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			√	Ya/Tidak
		- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			√	Ya/Tidak
2		Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			√	Ya/Tidak
3		Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Beban Persediaan (di LO)			√	Ya/Tidak
4		Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			√	Ya/Tidak
		- Akumulasi AT/AL (Neraca)			√	Ya/Tidak
		- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			√	Ya/Tidak
5		Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?			√	Ya/Tidak
		Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			√	Ya
		Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
2		Apakah ada Beban Bansos ?			√	Ya/Tidak
		Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			√	Ya
		Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
2		Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

Kode dan Nama UAPPA-W : (0500.417806) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Bimas Buddha)
Kode dan Nama Eselon I : (08) Ditjen Bimas Buddha
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

3		Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
4		Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			√	Ya/Tidak
		- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
5		Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual			√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU						
		LPSAL BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			√	Ya
2		Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			√	Tidak
3		Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			√	Ya
4		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
5		Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			√	Ya
6		Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			√	Ya
		LAK BLU		**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1		Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			√	Ya
2		Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			√	Ya
3		Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			√	Ya
4		Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
5		Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			√	Ya
6		Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			√	Ya
7		Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN						
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang						

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

SANGIDUN, S.Kom, M.AP
NIP. 198207062011011005

Sidoarjo, 5 Mei 2026
Penyusun Laporan Keuangan

Rochmad, S.Ag
NIP. 197404072007011032

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

REKONSILIASI SAKTI - SPAN SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Status Rekonsiliasi	Tanggal SHR	Jumlah Data TDK			Proses SHR / Download SHR
							TDK Rupiah	TDK COA	TDK Detail	
1	02508	052152	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 10:56:49	0	0		Download
2	02508	052549	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 16:00:27	0	0		Download
3	02508	055737	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-12 12:00:24	0	0		Download
4	02508	055926	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
5	02508	299062	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 16:00:29	0	0		Download
6	02508	299069	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-21 09:00:26	0	0		Download
7	02508	299133	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-22 08:00:24	0	0		Download
8	02508	299148	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-23 13:00:35	0	0		Download
9	02508	309129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-13 17:00:25	0	0		Download
10	02508	417806	KANWIL	2025-12	Rekon selesai Hasil	2026-01-23 15:00:23	0	0		

			KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR		Rekonsiliasi Terbentuk					Download
11	02508	417823	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-14 18:00:26	0	0		Download
12	02508	418007	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER	2025-12	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	2026-01-15 10:00:27	0	0		Download

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 052152 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	12,200,000	12,200,000	0
2	Belanja	12,200,000	12,200,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 052549 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,500,000	7,500,000	0
2	Belanja	7,028,000	7,028,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN KEDIRI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 055737 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,000,000	8,000,000	0
2	Belanja	8,000,000	8,000,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 055926 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,625,000	21,625,000	0
2	Belanja	21,572,575	21,572,575	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BANYUWANGI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299062 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	11,000,000	11,000,000	0
2	Belanja	11,000,000	11,000,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MALANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299069 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	15,700,000	15,700,000	0
2	Belanja	15,699,900	15,699,900	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN BLITAR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299133 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,000,000	2,000,000	0
2	Belanja	2,000,000	2,000,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MADIUN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 299148 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,000,000	5,000,000	0
2	Belanja	4,921,000	4,921,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN MOJOKERTO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 309129 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,000,000	2,000,000	0
2	Belanja	2,000,000	2,000,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SIDOARJO

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417806 - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,478,356,000	3,478,356,000	0
2	Belanja	3,466,331,309	3,466,331,309	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,784,436	3,784,436	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN SURABAYA II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 417823 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,950,000	10,950,000	0
2	Belanja	10,950,000	10,950,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Januari 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KPPN JEMBER

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 418007 - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/05/26 7:47
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,000,000	2,000,000	0
2	Belanja	1,920,000	1,920,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Januari 2026

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mengacu Peraturab Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara ada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 5 Mei 2026

Kepala

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar M.Pd.I

NIP. 197204122000031002

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii Pernyataan
Tanggung Jawab iii Ringkasan
Laporan iv I
Laporan Realisasi Anggaran 1
II Neraca 2
III Laporan Operasional 3
IV Laporan Perubahan Ekuitas 5
V Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Penjelasan Umum 5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.3 Basis Akuntansi
A.4 Dasar Pengukuran A.5 Kebijakan Akuntansi
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 10
B.1 Pendapatan
B.1.2 Penerimaan Pajak
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.2 Belanja
B.2.1 Belanja Pegawai B.2.2 Belanja Barang
B.2.3 Belanja Modal
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran C.2 Kas di Bendahara Penerimaan C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid) C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
C.7 Piutang Bukan Pajak
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
C.13 Persediaan
C.14 Persediaan yang Belum Diregister
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
C.19 Tanah
C.20 Tanah Belum Diregister
C.21 Peralatan dan Mesin
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
C.23 Gedung dan Bangunan
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
C.27 Aset Tetap Lainnya
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
C.32 Aset Tak Berwujud
C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
C.34 Aset Lain-lain
C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister
C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.37 Utang kepada Pihak Ketiga
C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
C.39 Hibah Yang Belum Disahkan
C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
C.41 Pendapatan Diterima Dimuka
C.42 Uang Muka dari KPPN
C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya
C.44 Ekuitas
C.45 Catatan Penting Lainnya neraca

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
D.2 Beban Pegawai
D.3 Beban Persediaan
D.4 Beban Barang dan Jasa
D.5 Beban Pemeliharaan
D.6 Beban Perjalanan Dinas
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
D.8 Beban Bantuan Sosial
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya
D.14 Pos Luar Biasa
D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1 Ekuitas Awal
E.2 Surplus (Defisit) LO
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
E.5 Transaksi Antar Entitas
E.6 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas 40

VI. Lampiran dan Daftar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur (Pendis) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sidoarjo, 5 Mei 2026

Kepala

Dr. Akhmad Sruji Bahtiar M.Pd.I

NIP. 197204122000031002

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

   Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

   Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,536,713,384,898 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp768,356,692,449 atau mencapai 199.58 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp769,972,220,000.

   Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4,608,183,208,621 atau mencapai 90.96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5,066,238,951,000..

2. NERACA

   Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp15,093,284,907,636 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp803,161,954,062; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp20,302,354; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14,268,051,219,508 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp22,051,431,712.

   Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39,155,433,142 dan Rp15,054,129,474,494

3. LAPORAN OPERASIONAL

   Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

   Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp763,256,055,915 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4,330,689,829,273 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-3,567,433,773,358, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-24,204,818,046 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp-3,591,638,591,404.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

   Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp14,719,807,504,606, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-3,591,638,591,404 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -17,517,946,658 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 3,943,478,507,950 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp15,054,129,474,494

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	768,356,692,449	-	738,983,791,980
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	769,972,220,000	768,356,692,449	99.79	738,978,367,711
JUMLAH PENDAPATAN		769,972,220,000	1,536,713,384,898	199.58	1,477,962,159,691
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2,936,216,893,000	2,886,862,737,665	98.32	2,608,667,369,190
Belanja Barang	B.2.2	1,195,374,547,000	999,916,798,106	83.65	1,024,651,298,710
Belanja Modal	B.2.3	795,875,911,000	582,863,072,850	73.24	994,446,635,116
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	138,771,600,000	138,540,600,000	99.83	-
JUMLAH BELANJA		5,066,238,951,000	4,608,183,208,621	90.96	4,627,765,303,016

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	27,041,975,422	42,321,929,023
Kas dan Bank - BLU	C.4	742,646,255,405	430,861,059,461
Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU	C.5	13,000,000,000	236,892,000,000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.6	37,500,000	9,220,000,000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	9,143,152,671	7,868,801,594
Piutang Bukan Pajak	C.8	-	2,000,000
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	C.9	1,061,531,000	1,753,346,000
Piutang Sewa Tanah - BLU	C.10	499,343,500	851,329,731
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan	C.11	(24,302,525)	(35,404,588)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan	C.12	(48,438,463)	(47,688,316)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti R	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntuta	C.14	-	-
Persediaan	C.15	9,804,937,052	9,995,801,284
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		803,161,954,062	739,683,174,189
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	20,302,354	33,595,950
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		20,302,354	33,595,950
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	3,316,020,511	3,316,020,511
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(525,015,567)	(446,492,334)
ASET TETAP			
Tanah	C.23	8,177,820,133,319	8,181,715,205,843
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	1,776,166,744,556	1,562,160,978,489
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	5,605,245,488,060	5,492,055,771,009
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	65,167,905,816	65,187,905,816
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	148,472,663,585	160,648,743,258
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	822,573,134,225	666,364,622,373
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(2,330,185,854,997)	(2,059,078,846,642)
Aset Konsesi Jasa	C.35		
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36		
Jumlah Aset Tetap		14,268,051,219,508	14,071,923,908,323
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	17,821,118,287	11,751,804,617
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	5,659,924,960	10,585,490,424
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	25,273,660,872	17,645,461,259
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(26,703,272,407)	(20,666,731,013)
Jumlah Aset Lainnya		22,051,431,712	19,316,025,287
JUMLAH ASET		15,093,284,907,636	14,830,956,703,749
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	34,055,093,300	106,774,114,605
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	5,100,339,842	4,374,217,738
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-

Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	866,800
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		39,155,433,142	111,149,199,143
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		39,155,433,142	111,149,199,143
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	15,054,129,474,494	14,719,807,504,606
JUMLAH EKUTAS		15,054,129,474,494	14,719,807,504,606
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15,093,284,907,636	14,830,956,703,749

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	117,460,243,805	113,574,900,221
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.2	645,795,812,110	625,402,032,209
Jumlah Pendapatan		763,256,055,915	738,976,932,430
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	3,086,101,409,259	2,812,693,567,546
Beban Persediaan	D.4	27,842,606,951	27,822,671,906
Beban Barang dan Jasa	D.5	610,764,050,777	608,463,368,624
Beban Pemeliharaan	D.6	107,311,918,340	93,246,863,988
Beban Perjalanan Dinas	D.7	53,462,729,301	86,632,792,963
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	987,350,321	498,573,080
Beban Bantuan Sosial	D.9	138,540,600,000	128,016,366,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	305,677,407,317	281,922,714,803
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	1,757,007	80,765,949
Jumlah Beban		4,330,689,829,273	4,039,377,684,859
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3,567,433,773,358)	(3,300,400,752,429)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(26,863,559,499)	(4,765,570,858)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.14	2,658,741,453	3,645,918,662
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(24,204,818,046)	(1,119,652,196)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(3,591,638,591,404)	(3,301,520,404,625)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(3,591,638,591,404)	(3,301,520,404,625)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	14,719,807,504,606	13,966,773,140,721
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(3,591,638,591,404)	(3,301,520,404,625)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(17,517,946,658)	(16,575,619,553)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	(11,372,000)	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	8,280,000	185,150,373
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(9,983,111,895)	(2,404,530,790)
Koreksi Lain-Lain	E.46	(7,531,742,763)	(14,356,239,136)
Jumlah		(17,517,946,658)	(16,575,619,553)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3,943,478,507,950	4,071,130,388,063
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		334,321,969,888	753,034,363,885
EKUITAS AKHIR	E.6	15,054,129,474,494	14,719,807,504,606

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia Yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2 :

1. Negara berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsesus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain untuk mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang- undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (added value) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercemin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Peraturan Presiden terbaru tentang Kementerian Agama adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2024 tentang Kementerian Agama yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Agama.

Sejak itu seluruh struktur organisasi Kementerian Agama lebih diintregasikan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama terbaru adalah PMA Nomor 72 Tahun 2022.

Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Agama agar lebih proporsional, efektif, dan efisien. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Ditjen Pendidikan Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan PMA Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Ditjen Pendidikan Islam berkeddukan di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dengan dasar pemikiran dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka dirumuskan visi Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat adalah :

"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Berdasarkan visi di atas, Kementerian Agama Prov. Jawa Timur menetapkan misi lima tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Stratejik (Renstra) meliputi :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Laporan Keuangan 2025 periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah

Kementerian Agama Prov. Jawa Timur yang meliputi Kantor wilayah Kemenag Jatim, Kantor Kemenag Kab/Kota se Jatim, Perguruan Tinggi Islam Negeri serta Madrasah se Jatim sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur (Pendis) adalah 335 satuan kerja sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker
1	573450	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 MAGETAN
2	573272	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 JOMBANG
3	299099	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BLITAR
4	308873	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KEDIRI
5	424690	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SIDOARJO
6	299090	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO
7	420016	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 LUMAJANG
8	573492	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PASURUAN
9	661469	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 MAGETAN
10	299087	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
11	553420	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PROBOLINGGO
12	662330	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 KEDIRI
13	598919	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 BOJONEGORO
14	573542	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 MADIUN
15	605508	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 KOTA SURABAYA
16	297460	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KEDIRI
17	598677	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LUMAJANG
18	417826	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK
19	598752	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 NGANJUK
20	573446	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 MAGETAN
21	554333	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TUBAN
22	598571	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 14 JOMBANG
23	573535	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 NGAWI
24	424704	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SIDOARJO
25	425871	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANYUWANGI
26	423837	IAIN MADURA
27	573247	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BOJONEGORO
28	537276	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SITUBONDO
29	553462	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MALANG
30	573336	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 NGANJUK
31	675272	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALANG
32	681354	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PASURUAN
33	598731	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 JEMBER
34	554375	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 LAMONGAN
35	573610	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 MALANG
36	573322	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 NGANJUK
37	'052809	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 TUBAN
38	424647	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 MADIUN
39	598855	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SITUBONDO
40	298245	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SUMENEP

41	537280	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA PROBOLINGGO
42	598550	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 12 JOMBANG
43	598525	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BLITAR
44	598787	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 MADIUN
45	299174	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PAMEKASAN
46	297971	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 NGAWI
47	604901	MADRASAH ALIYAH NEGERI 6 JOMBANG
48	297676	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 NGANJUK
49	297790	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TULUNGAGUNG
50	605512	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA BLITAR
51	299108	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI
52	573514	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 NGAWI
53	553413	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 NGAWI
54	297985	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 NGAWI
55	598813	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 12 MADIUN
56	417929	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 JOMBANG
57	423792	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
58	605533	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 BLITAR
59	553519	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 MADIUN
60	424653	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BLITAR
61	425792	MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
62	604854	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA MOJOKERTO
63	299065	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MALANG
64	598698	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 JEMBER
65	425859	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TRENGGALEK
66	417950	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JOMBANG
67	598944	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MADIUN
68	423806	IAIN KEDIRI
69	425777	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA SURABAYA
70	598930	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 NGAWI
71	297332	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PROBOLINGGO
72	573251	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 JOMBANG
73	573357	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 KEDIRI
74	299113	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BLITAR
75	573361	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KOTA KEDIRI
76	299168	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMENEP
77	598660	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 NGAWI
78	573301	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BLITAR
79	423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
80	573467	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 12 BANYUWANGI
81	308763	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MOJOKERTO
82	537297	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA MADIUN
83	604922	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BOJONEGORO
84	418003	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JEMBER
85	417972	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 JOMBANG
86	424631	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA PASURUAN
87	417878	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BOJONEGORO
88	598965	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 MADIUN

89	297896	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MADIUN
90	598809	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEDIRI
91	298092	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAGETAN
92	308920	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MADIUN
93	425828	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 LAMONGAN
94	299078	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO
95	297992	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 NGAWI
96	298177	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONOROGO
97	573315	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PACITAN
98	420017	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 BLITAR
99	'052112	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 BLITAR
100	297346	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PROBOLINGGO
101	297325	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGO
102	598642	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 MAGETAN
103	423786	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
104	299105	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUMAJANG
105	'050424	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 18 JOMBANG
106	417855	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN
107	417802	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR
108	598862	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MOJOKERTO
109	'050906	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BONDOWOSO
110	425730	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BOJONEGORO
111	424596	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 NGANJUK
112	297435	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
113	598710	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 JEMBER
114	573556	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 MADIUN
115	605529	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 BLITAR
116	553523	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 MALANG
117	604840	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MAGETAN
118	298231	MADRASAH ALIYAH NEGERI SUMENEP
119	573521	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 NGAWI
120	425761	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SITUBONDO
121	573500	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PASURUAN
122	299136	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN
123	297882	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MADIUN
124	424616	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BANYUWANGI
125	417864	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO
126	425865	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TUBAN
127	298088	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGETAN
128	575553	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 TULUNGAGUNG
129	598681	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 MALANG
130	424729	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PACITAN
131	299171	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMPANG
132	598546	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 BLITAR
133	537255	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MOJOKERTO
134	598724	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 JEMBER
135	598635	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 MAGETAN
136	598902	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 TULUNGAGUNG

137	575574	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MALANG
138	297854	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MADIUN
139	661473	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BLITAR
140	598880	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 PASURUAN
141	425715	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA SURABAYA
142	554340	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUWANGI
143	573268	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 JOMBANG
144	575560	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANYUWANGI
145	598834	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SIDOARJO
146	554382	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 NGANJUK
147	297414	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KEDIRI
148	420019	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 12 NGAWI
149	297168	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BONDOWOSO
150	308958	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MAGETAN
151	417893	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN
152	554354	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 NGAWI
153	297861	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MADIUN
154	598600	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 17 JOMBANG
155	425752	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA PROBOLINGGO
156	308869	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA KEDIRI
157	424622	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 JOMBANG
158	573382	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 KEDIRI
159	573560	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 JEMBER
160	675251	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BOJONEGORO
161	573399	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 TRENGGALEK
162	598986	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 GRESIK
163	425721	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI GRESIK
164	308990	MADRASAH ALIYAH NEGERI BANGKALAN
165	299161	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO
166	308852	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA MALANG
167	308759	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MOJOKERTO
168	308770	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MOJOKERTO
169	573488	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 BANYUWANGI
170	598770	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SAMPANG
171	423812	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
172	308848	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA MALANG
173	308937	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 NGAWI
174	297215	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BANYUWANGI
175	424678	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMONGAN
176	297772	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TULUNGAGUNG
177	598621	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 15 JOMBANG
178	553434	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 BANYUWANGI
179	308880	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KEDIRI
180	573411	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 TULUNGAGUNG
181	297950	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 NGAWI
182	297702	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 NGANJUK
183	598923	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 KEDIRI
184	308784	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BOJONEGORO

185	554361	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PASURUAN
186	417966	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JOMBANG
187	573471	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 BANYUWANGI
188	537241	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MALANG
189	299053	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONDOWOSO
190	298320	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PAMEKASAN
191	'050914	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BONDOWOSO
192	675289	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 BOJONEGORO
193	604939	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BLITAR
194	598990	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANYUWANGI
195	308902	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MADIUN
196	425709	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALANG
197	298355	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PAMEKASAN
198	417906	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
199	297680	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 NGANJUK
200	423899	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BLITAR
201	598841	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SIDOARJO
202	'051450	MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA PASURUAN
203	674682	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PROBOLINGGO
204	298334	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PAMEKASAN
205	423900	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BATU
206	573603	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KOTA SURABAYA
207	'051009	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SITUBONDO
208	299129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG
209	297456	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI
210	297257	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG
211	575595	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BLITAR
212	573378	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 KEDIRI
213	573230	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BOJONEGORO
214	297299	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PASURUAN
215	298341	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PAMEKASAN
216	573293	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BLITAR
217	424600	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 NGAWI
218	553497	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 TRENGGALEK
219	297875	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MADIUN
220	417547	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MOJOKERTO
221	308791	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JOMBANG
222	598614	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 16 JOMBANG
223	425812	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PONOROGO
224	417833	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO
225	537262	MADRASAH ALIYAH NEGERI LUMAJANG
226	553502	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 MADIUN
227	308983	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
228	417935	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 JOMBANG
229	417910	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JOMBANG
230	423868	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 JEMBER
231	675268	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MALANG
232	573425	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 TULUNGAGUNG
233	417941	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 JOMBANG

234	417818	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA
235	297545	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BLITAR
236	420015	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 JEMBER
237	598820	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 PAMEKASAN
238	553476	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 BANYUWANGI
239	553391	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PACITAN
240	297201	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANYUWANGI
241	553441	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 PONOROGO
242	424571	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 MAGETAN
243	553455	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANYUWANGI
244	598745	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TUBAN
245	299082	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
246	573404	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TRENGGALEK
247	298100	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MAGETAN
248	297112	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JEMBER
249	299158	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN
250	598567	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 JOMBANG
251	299125	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TRENGGALEK
252	425834	MADRASAH ALIYAH NEGERI SIDOARJO
253	573432	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TULUNGAGUNG
254	573598	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 PONOROGO
255	425840	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GRESIK
256	423843	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA SURABAYA
257	420020	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 13 NGAWI
258	674699	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA BATU
259	298313	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PAMEKASAN
260	308827	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 JEMBER
261	299152	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MADIUN
262	424684	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TUBAN
263	297697	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 NGANJUK
264	674704	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 PASURUAN
265	308894	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TULUNGAGUNG
266	'051202	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 JEMBER
267	297662	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 NGANJUK
268	417997	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SITUBONDO
269	423874	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI
270	598592	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 JOMBANG
271	598951	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MADIUN
272	297552	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BLITAR
273	297786	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 TULUNGAGUNG
274	425689	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BANYUWANGI
275	423919	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA PASURUAN
276	425670	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LAMONGAN
277	299146	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN
278	309023	MADRASAH ALIYAH NEGERI SAMPANG
279	604918	MADRASAH ALIYAH NEGERI 9 JOMBANG
280	309127	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO
281	553409	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BANYUWANGI
282	573577	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 PONOROGO

283	'050715	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SUMENEP
284	425746	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONOROGO
285	299141	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI
286	598766	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 NGANJUK
287	573289	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JOMBANG
288	424662	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BONDOWOSO
289	297498	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KEDIRI
290	604896	MADRASAH ALIYAH NEGERI 10 JOMBANG
291	598656	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 NGAWI
292	425689	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BANYUWANGI
293	308962	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MAGETAN
294	297744	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TRENGGALEK
295	575581	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PROBOLINGGO
296	554329	MADRASAH ALIYAH NEGERI PACITAN
297	424735	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 TRENGGALEK
298	604882	MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 JOMBANG
299	423880	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TULUNGAGUNG
300	598588	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 13 JOMBANG
301	'051710	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 KEDIRI
302	299072	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PASURUAN
303	604861	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 JOMBANG
304	598703	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JEMBER
305	575549	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JEMBER
306	598972	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TRENGGALEK
307	297126	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JEMBER
308	423852	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BOJONEGORO
309	417983	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SITUBONDO
310	420018	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 11 NGAWI
311	298071	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAGETAN
312	573340	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 NGANJUK
313	299120	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGANJUK
314	604875	MADRASAH ALIYAH NEGERI 7 JOMBANG
315	309019	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SAMPANG
316	425695	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 JEMBER
317	553480	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MALANG
318	650081	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU
319	308979	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PONOROGO
320	675293	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 KEDIRI
321	308831	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG
323	417886	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIDOARJO
324	309002	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SUMENEP
325	598791	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 10 MADIUN
326	424580	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 KEDIRI
327	573581	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 PONOROGO
328	299164	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKALAN
329	598897	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 TULUNGAGUNG
330	553530	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 BANYUWANGI
331	598876	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 PASURUAN
332	424710	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LUMAJANG

333	299058	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI
334	662326	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 NGANJUK
335	299094	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEDIRI

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut. :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

  * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung
-

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos Laporari Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp**5,066,238,951,000**. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang disebabkan adanya *Efisiensi Anggaran,* penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	769,972,220,000	769,972,220,000
Jumlah Pendapatan	769,972,220,000	769,972,220,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,526,163,469,000	2,936,216,893,000
Belanja Barang	1,218,138,058,000	1,195,374,547,000
Belanja Modal	346,592,432,000	795,875,911,000
Belanja Bantuan Sosial	138,771,600,000	138,771,600,000
Jumlah Belanja	4,229,665,559,000	5,066,238,951,000

Realisasi Pendapatan Rp1,536,713,384,898

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,536,713,384,898 atau mencapai 199,58 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp769,972,220,000. Pendapatan di satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	768,356,692,449	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	769,972,220,000	768,356,692,449	99.79
Jumlah	769,972,220,000	1,536,713,384,898	199.58

Realisasi Pendapatan Pendidikan TA 2025 mengalami kenaikan 3,98 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya pendapatan jasa perbankan BLU dan meningkatnya jasa pelayanan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri pada Satuan Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Juran Badan usaha mengalami kenaikan sebesar 42,85 persen yang berasal pendapatan sewa atas lahan kantor untuk ATMoleh beberapa bank.

Selain itu, Pendapatan Lain-lain lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengalami penurunan sebesar 16,67 persen karena berkurangnya pendapatan pengembalian atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan Audited TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	768,356,692,449	738,983,791,980	3.97
Penerimaan Negara Bukan Pajak	768,356,692,449	738,978,367,711	3.98
Jumlah	768,356,692,449	738,978,367,711	3.98

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	534,846,027,933	559,840,418,473	(4.46)
Pendapatan BLU Lainnya	85,546,791,225	40,974,324,225	108.78
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN,	895,309,158	1,518,703,864	(41.05)
Pendapatan Denda	2,251,706,779	52,724,222	4,170.73
Pendapatan Lain-Lain	4,833,933,562	2,736,896,632	76.62
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening	13,293,596	28,258,004	(52.96)
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pe	24,884,605,396	20,545,794,763	21.12
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan	115,085,024,800	113,286,671,797	1.59
	-	-	-
Jumlah	768,356,692,449	738,983,791,980	3.97
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	768,356,692,449	738,983,791,980	3.97

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp768,356,692,449

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp768,356,692,449 dan Rp738,978,367,711. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 3.98 dari TA 2024 Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak disebabkan meningkatnya pendapatan jasa layanan perbankan BLU dan meningkatnya jasa pelayanan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri, karena berubahnya status perguruan tinggi Keagamaan Negeri dari IAIN menjadi UIN antara lain UIN Ponorogo, UIN Kediri dan UIN Madura

Rincian Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	768,356,692,449	738,978,367,711	3.98
Jumlah	768,356,692,449	738,978,367,711	3.98

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	521,197,118,261	509,906,247,120	2.21
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	14,260,000	2,500,000	470.40
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa	13,634,649,672	49,931,671,353	(72.69
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan	24,468,611,196	20,545,794,763	19.09
Pendapatan Hasil Kerja Sama	415,994,200	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	42,372,467,921	34,968,889,319	21.17
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun	39,543,855	42,491,871	(6.94
Pendapatan Lain-lain BLU	1,317,459,324	2,610,120,973	(49.52)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	423,504,000	917,000,020	(53.82)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	560,175,800	429,642,500	30.38
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	39,138,734,325	646,848,569	5,950.68
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan	10,425,000	8,340,000	25.00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap	1,655,080,000	597,800,000	176.86
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	29,401,000	63,830,000	(53.94)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan	77,261,000	408,123,450	(81.07
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	412,590,407	775,863,835	(46.82)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	298,948,955	137,153,346	117.97
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	100,332,000	197,563,233	(49.22)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6,176,796	-	-
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	522,176,000	397,625,000	31.32
Pendapatan Biaya Pendidikan	113,709,533,300	111,998,489,800	1.53
Pendapatan Pendidikan Lainnya	853,315,500	890,556,997	(4.18)
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau	13,293,596	27,953,735	(52.44)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	2,251,706,779	47,604,222	4,630.06
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	555,339,578	684,623,814	(18.88
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun	121,614,774	413,503,749	(70.59
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun	1,041		
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,706,168		
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun		689,360,973	(100.00)
Jumlah	764,201,420,448	737,339,598,642	3.64

Realisasi Belanja
Rp4,608,183,208,621

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp4,608,183,208,621 atau 90.96 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 5,066,238,951,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

(dalam Rupiah)

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2,936,216,893,000	2,886,862,737,665	98.32
Belanja Barang	1,195,374,547,000	999,916,798,106	83.65
Belanja Modal	795,875,911,000	582,863,072,850	73.24
Belanja Bantuan Sosial	138,771,600,000	138,540,600,000	99.83
Jumlah	5,066,238,951,000	4,608,183,208,621	90.96

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (3.10) persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain: kebijakan Pemerintah sesuai Inpres No. 1 ahun 2025 tentng efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	2,886,862,737,665	2,608,667,369,190	10.66
Belanja Barang	999,916,798,106	1,024,651,298,710	(2.41)
Belanja Modal	582,863,072,850	994,446,635,116	(41.39)
Belanja Bantuan Sosial	138,540,600,000	128,013,6	8.22
Jumlah	4,608,183,208,621	4,755,778,903,016	(3.10)

Realisasi Belanja Pegawai
Rp2,886,862,737,665

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,886,862,737,665 dan Rp2,608,667,369,190. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS yang mengalami kenaikan disebabkan adanya pembayaran impasing Guru Non PNS disesuaikan dengan masa kerja PNS serta golomgannya serta bertambahnya guru yang lulus TPG tahun 2024. Disamping itu pembayaran kekurang TPG tahun 2018-2019 terbayarkan di tahun 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	167,563,231,340	162,467,324,100	3.14

Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,069,445	2,214,984	(6.57)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,631,587,110	13,301,370,026	2.48
Belanja Tunj. Anak PNS	4,189,449,542	4,110,188,083	1.93
Belanja Tunj. Struktural PNS	1,153,710,000	1,307,650,000	(11.77)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	32,563,321,000	31,894,958,000	2.10
Belanja Tunj. PPh PNS	2,677,962,591	2,606,793,827	2.73
Belanja Tunj. Beras PNS	9,215,807,100	9,076,964,160	1.53
Belanja Uang Makan PNS	22,533,305,000	21,714,477,000	3.77
Belanja Tunjangan Umum PNS	1,080,870,000	807,760,000	33.81
Belanja Uang Lembur	929,215,000	1,572,914,000	(40.92)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kine	72,288,770,342	69,756,945,797	3.63
Belanja Gaji Pokok PPPK	38,123,027,527	25,264,610,276	50.89
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	558,658	371,739	50.28
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,726,825,441	1,795,379,320	51.88
Belanja Tunjangan Anak PPPK	842,666,929	554,176,614	52.06
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,182,434,328	3,137,518,000	33.30
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,377,446,005	1,553,712,720	53.02
Belanja Uang Makan PPPK	6,972,183,000	4,210,526,000	65.59
Belanja Uang Lembur PPPK	234,136,000	135,138,000	73.26
Belanja Pegawai Tunjangan	17,299,939,796	9,195,295,329	88.14
Belanja Tunjangan Umum PPPK	215,770,000	-	-
Jumlah Belanja kotor	2,887,441,506,022	2,609,449,248,539	10.65
Pengembalian Belanja Pegawai	578,768,357	781,879,349	(25.98)
Jumlah Belanja	2,886,862,737,665	2,608,667,369,190	10.66

Realisasi Belanja Barang Rp999,916,798,106

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp999,916,798,106 dan Rp1,024,651,298,710. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 2.41% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang tahun berjalan dikarena Kebijakan pemerintah sesuai Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	100,883,076,769	108,858,285,464	(7.33)
Belanja Barang Non Operasional	268,697,716,780	268,387,106,816	0.12
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,592,486,004	19,980,131,931	13.07
Belanja Jasa	67,073,490,062	66,382,769,524	1.04
Belanja Pemeliharaan	84,149,130,068	77,612,172,582	8.42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29,691,725,623	46,920,103,597	(36.72)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	452,732,654	3,769,265,392	(87.99)
Belanja Barang BLU	426,586,232,405	432,873,260,705	(1.45)
Jumlah Belanja Kotor	1,000,207,168,365	1,024,783,096,011	(2.40)
Pengembalian Belanja	290,370,259	131,797,301	120.32
Jumlah Belanja	999,916,798,106	1,024,651,298,710	(2.41)

Belanja Modal Rp582,863,072,850

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp582,863,072,850 dan Rp994,446,635,116. Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Kementerian Agama Provinsi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 41.39 persen dibandingkan TA 2024 disebabkan Kebijakan pemerintah sesuai Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	3,672,559,153	(100.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,682,191,610	159,440,298,671	(53.16)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	373,069,807,816	669,682,390,018	(44.29)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	4,681,379,319	5,322,417,016	(12.04)
Belanja Modal BLU	130,797,996,205	156,336,737,338	(16.34)
Jumlah Belanja Kotor	583,231,374,950	994,454,402,196	(41.35)
Pengembalian Belanja	368,302,100	7,767,080	4,641.83
Jumlah Belanja	582,863,072,850	994,446,635,116	(41.39)

Belanja Modal Tanah Rp0,0

B.6.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3,672,559,153. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh Penurunan belanja modal Tanah disebabkan tidajk ada anggaran belanja modal tanah TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	2,875,453,153	(100.00)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	797,106,000	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	-	3,672,559,153	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	3,672,559,153	(100.00)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp74,682,191,610

B.6.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp74,682,191,610 dan Rp159,440,298,671. mengalami penurunan sebesar 53.16 Persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Penurunan belanja modal Peralatan dan Mesin disebabkan Kebijakan Pemerintah atas penghematan anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentng efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2025 Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,682,191,610	159,405,298,671	(53.15)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	35,000,000	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	74,682,191,610	159,440,298,671	(53.16)
Pengembalian	-	3,000,000	(100.00)
Jumlah Belanja	74,682,191,610	159,437,298,671	(53.16)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp373,069,807,816

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp373,069,807,816 dan Rp669,682,390,018 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 44.35% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Menurunnya belanja modal Gedung dan Bangunan disebabkan disebabkan Kebijakan Pemerintah atas penghematan anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentng efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	368,933,985,149	666,803,421,241	(44.67)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	4,135,822,667	2,878,968,777	43.66
Jumlah Belanja Kotor	373,069,807,816	669,682,390,018	(44.29)
Pengembalian Belanja	368,302,100	4,767,080	7,625.95
Jumlah Belanja	372,701,505,716	669,677,622,938	(44.35)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebesar 45,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan adanya tidak adanya anggaran Belanja Modal . Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	**-**	**-**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	**-**	**-**

Belanja Modal BLU Rp 130,797,996,205

B.5.5 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp130,797,996,205 dan Rp156,336,737,338, mengalami penurunan sebesar 16.34 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan penurunan belanja modal BLU disebabkan disebabkan Kebijakan Pemerintah atas penghematan anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentng efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah - BLU	8,841,494,572	81,642,062,700	(89.17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	94,951,531,716	49,987,405,249	89.95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	20,917,496,837	23,151,619,889	(9.65)
Belanja Modal Lainnya - BLU	6,087,473,080	1,555,649,500	291.31
Jumlah Belanja Kotor	130,797,996,205	156,336,737,338	(16.34)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	130,797,996,205	156,336,737,338	(16.34)

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp4,681,379,319

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp4,681,379,319 dan Rp5,322,417,016, mengalami penurunan sebesar 12.04 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Menurunnya belanja modal aset tetap Lainnya dikarenakan disebabkan Kebijakan Pemerintah atas penghematan anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentng efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	4,681,379,319	5,322,417,016	(12.04)

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4,681,379,319	5,322,417,016	(12.04)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4,681,379,319	5,322,417,016	(12.04)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp138,540,600,000

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp138,540,600,000 dan Rp128,013,600,000. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.22 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial Kenaikan belanja bansos disebabkan naiknya bantuan dalam rangkah menanggulangi dampak bencana alam dan meningkatnya bantuan beasiswa siswa miskin dan beasiswa Mahasiswa

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	138,547,200,000	128,013,600,000	8.23
Jumlah Belanja Kotor	138,547,200,000	128,013,600,000	8.23
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	138,547,200,000	128,013,600,000	8.23

B.7 Catatan Penting Lainnya

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp803,161,954,062

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur per 31 Desernber 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp 803,161,954,062 dan Rp 739,683,174,189..
Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Penqeluaran. Rp20.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP)yang belurn dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp27,041,975,422

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp27,041,975,422 dan Rp42,321,929,023. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,080,276,198	22,531,733,541
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	7,010,249,937	981,184,809
Kas Lainnya di BLU	15,893,568,473	18,809,010,673
-	-	-
-	-	-
Jumlah	26,984,094,608	42,321,929,023

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Kas dan setara kas adalah dua komponen penting dalam akuntansi yang berkaitan dengan aset lancar perusahaan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat, seperti deposito berjangka kurang dari 3 bulan atau obligasi pemerintah jangka pendek. Saldo kas Lainnya merupakan kas atau simpanan Bendahara untuk operasional kegiatan perkantoran.

Kas dan Bank - BLU Rp742,646,255,405

C.1.4. Kas dan Bank - BLU

Saldo Kas dan Bank - BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp742,646,255,405 dan Rp430,861,059,461. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Kas dan Bank - BLU disajikan sebagai berikut

Rincian Kas dan Bank - BLU Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas dan Bank - BLU	574,274,321,905	330,489,125,961
Surat Berharga - BLU	99,000,000,000	99,000,000,000
Setara kas Lainnya - BLU	69,371,933,500	1,371,933,500
	-	-
	-	-
Jumlah	742,646,255,405	430,861,059,461

Penjelasan tentang Kas dan Bank BLU

Kas dan Bank BLU pada neraca merupakan bagian dari aset lancar yang menunjukkan posisi keuangan BLU (Badan Layanan Umum) pada suatu tanggal tertentu. Kas pada BLU mencakup uang tunai dan saldo simpanan

di bank yang dikelola oleh BLU, serta setara kas yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas. Saldo Kas dan Bank BLU merupakan kas operasional BLU dan Investasi BLU.

Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU Rp13,000,000,000

C.1.5. Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU

Saldo Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp13,000,000,000 dan Rp236,892,000,000. Rincian Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU adalah sebagai berikut :

:

Tabelxx Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari	n	236,892,000,000
	-	-
	-	-
Jumlah	13,000,000,000	236,892,000,000

Penjelasan tentang Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya BLU
Deposito dan investasi jangka pendek merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Investasi jangka pendek ini bertujuan untuk mengelola kas dan mendapatkan keuntungan cepat. Saldo Deposito BLU mrupakan saldo deposito jangka pendek BLU

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp24. 000. 000

C.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp37,500,000. dan Rp9,220,000,000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) dengan rincian sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

No,	Uraian	TA 2025	TA. 2024
1.	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	37,500,000	9,220,000,000
Jumlah		37,500,000	9,220,000,000

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka (prepaid):
Belanja barang dibayar di muka adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang atau jasa, namun barang atau jasa tersebut belum diterima atau dinikmati oleh pihak yang membayar. Dalam akuntansi, pengeluaran ini dicatat sebagai aset, bukan sebagai beban, dan akan diakui sebagai beban seiring dengan penggunaan barang atau jasa tersebut.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rpl 1.055.000

C.1.7. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9,143,152,671 dan Rp7,868,801,594. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

dalam rupiah)

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9,143,152,671	7,868,801,594
	-	
Jumlah	9,143,152,671	7,868,801,594

Penjelasan tentang Pendapatan yang masih harus diterima: Pendapatan yang masih harus diterima, dalam akuntansi, adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan (sudah diperoleh) tetapi belum diterima pembayarannya secara tunai atau belum dicatat dalam faktur. Ini terjadi ketika suatu perusahaan telah memberikan barang atau jasa, namun tagihan atau pembayaran belum diterima.

Piutang Bukan Pajak Rp000

C.1.8. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp-2,000,000. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	Nilai Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	400.000.000 -	0,5%	2.000.000!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	400.000.000 -		2.000.000

Piutang BLU Pelayanan Pendidikan Rp2,606,675,731

C.1.9. Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Nilai Piutang BLU Pelayanan Pendidikan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.560.874.500 dan Rp2,606,675,731. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang BLU Pelayanan Pendidikan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Rincian Piutang BLU Pelayanan Pendidikan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Piutang Lainnya	-	2,000,000
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1,061,531,000	675,846,000
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa	-	1,077,500,000
Piutang Sewa Tanah - BLU	395,000,000	445,833,333

Piutang Sewa Gedung - BLU	0	207,900,000
Piutang Sewa Ruangan - BLU	10.000.000	9,999,999
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	94,343,500	187596399
Jumlah	1.560.874.500	2,606,675,731

Persediaan Rp9,804,937,052

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9,804,937,052 dan Rp9,995,801,284. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	8,282,205,234	7,250,257,809
Bahan untuk Pemeliharaan	1,120,192,808	2,208,292,424
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	402,491,358	537,251,051
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial		
Persediaan Lainnya		
	-	-
	-	-
Persediaan yang belum diregister		-
	-	-
Jumlah	9,804,889,400	9,995,801,284

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.12 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
PNS UIN Malang	20.302.354	33.595.950-
-	-	-
-	-	-
Ju	20.302.354	33.595.950-

Aset Tetap
Rp14,069,054,380,146

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama prov. Jawa Timur per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Adalah sebesar Rp14,265,260,214,564 dan Rp14,069,054,380,146.
Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan opreasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Agama prov. Jawa Timur berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya

ti Investasi
Rp3.316.020.511

C.2.1 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.316.020.511 dan Rp3.316.020.511. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Properti Investasi	3.316.020.511	3.316.020.511
Jumlah	**3.316.020.511**	**3.316.020.511**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Rp525.015.567

C.2.1.1 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp-525.015.567 dan Rp-446.492.334. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi

Tanah
Rp 8.181.715.205.843

C.2.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.177.820.133.319 dan Rp8.181.715.205.843. Nilai Tanah tersebut Penurunan Tanah dari Hibah Keluar sedangkan hibah masuk berasal MTsN, 7 kab. Tulungagung, MTsN 12 Kab. Madiun dan Kantor Kemenag Kab. Magetan. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**8,181,715,205,843**
Mutasi tambah :	
Saldo Awal	631,390,000
Hibah (Masuk)	8,803,428,000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	8,279,408,400
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	8,683,421,804
Pengembangan Melalui KDP	605,722,272
Mutasi kurang :	
Hibah (Keluar)	20,569,049,000
Koreksi Pencatatan	10,329,394,000
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Pencatatan	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	**8,177,820,133,319**

Mutasi tambah:
Hibah berasal dari Komite Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi, Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi, Kantor Kementerian Agama Kab. Magetan, Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan, Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo, Kantor Kementerian. Agama Kab. Lamongan. Man 1 Kab. Lamongan, Man 3 Kab. Tulungagung, Man 1 Kab. Malang, Mtsn 5 Kab. Blitar, Mtsn 7 Kab. Tulungagung, Mtsn 8 Kab. Blitar.

Mutasi kurang:
Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2024. Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di Jl Matoa No.20 pada Kantor Akuntansi Bogor, pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan oleh pihak ketiga

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	6298 M2 dari saldo awal	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PROBOLINGGO	631,390,000

2	44928 M2 Hibah Masuk	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO, KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN. MAN 1 KAB. LAMONGAN, MAN 3 KAB. TULUNGAGUNG, MAN 1 KAB. MALANG, MTsN 5 KAB. BLITAR, MTsN 7 KAB. TULUNGAGUNG, MTsN 8 KAB. BLITAR	8,803,428,000
3	6643 M2 Penyelesaian KDP	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG	8,279,408,400
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MALANG KAB. MALANG	8,683,421,804
5	Pengembangan Melalui KDP	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG	605,722,272
	Jumlah		**27,003,370,476**

Peralatan dan Mesin

C.2.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.776.166.744.556 dan Rp1.562.160.978.489. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1,562,160,978,489
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	941,300,000
Pembelian	179,416,946,198
Transfer Masuk	33,255,023,042
Hibah (Masuk)	642,835,000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	77,246,594,351
Reklasifikasi Masuk	1,025,322,525
Perolehan Lainnya	1,452,815,000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	-
Koreksi Perubahan Kondisi	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	536,559,000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	11,700,000
Penghapusan	8,900,862,225
Transfer Keluar	32,150,771,770
Hibah (Keluar)	740,138,560
Reklasifikasi Keluar	995,948,525
Koreksi Pencatatan	92,714,859
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	28,506,318,014
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	77,256,944,351
Saldo per 31 Desember 2025	1,708,022,975,301
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1,286,802,898,777)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	421,220,076,524

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a. Mutasi masuk dari pembelian adalh bersumber dari dana SBSN untuk Madrasah dan
b. Perguruan Tinggi Keagmaan Negeri
c. selain dari pembelian mutasi masuk Peralatan dan Mesin dari Transfer masuk yang berasal dari Dirjen Pendidikan Islam berupa komputer lainnya

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Mutasi berkurang berasal dari penghentian Aset dari Penggunaan disebabkan asset status rusak berat untuk dihapus dari catatan Barang Milik Negara.

Gedung dan Bangunan Rp5.605.245.488.060

C.2.4 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.605.245.488.060 dan Rp5.492.055.771.009. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	5,492,055,771,009
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	200,000,000
Pembelian	919,725,650
Transfer Masuk	198,770,349,270
Hibah (Masuk)	1,634,800,000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	87,451,498,998
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1,337,371,000
Pengembangan Nilai Aset	4,433,545,122
Koreksi Susulan	203,303,000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	16,070,897,966
Mutasi Kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	336,258,874
Penghapusan	84,436,093,317
Transfer Keluar	195,438,997,340
Hibah (Keluar)	2,874,719,000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	336,258,874
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	10,751,680,333
Saldo per 31 Desember 2025	5,509,239,513,151
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1,006,021,314,779)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4,503,218,198,372

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Gedung dan Bangunan bertambah dari transaksi penyelesaian dengan KDP dari sumber dana
- SBSN madrasah dan PTKN.
- Disamping penyelesaian KDP ada transfer masuk dari Kementerian PUPR atas penyelesaian

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Mutasi kurang Gedung dan Bangunan berasal dari penghentian Aset dari Penggunaan untuk Pembangunan Gedung bary sumber dana SBSN

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp65.167.905.816

C2.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.65.167.905.816 dan Rp.65.187.905.816. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	65,187,905,816
Mutasi tambah:	
Pembelian	7,000,000
	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	-
	-
Saldo per	65,194,905,816
Akumulasi Penyusutan s.d.	(27,038,638,413)
Nilai Buku per	38,156,267,403

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tahun 2025 tidak ada mutasi tambah dari aset jalan, irigasi dan jaringan

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tahun 2025 tidak ada mutasi berkurang dari aset jalan, irigasidan jaringan

Aset Tetap Lainnya Rp148.472.663.585

C.2.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.148.472.663.585 dan Rp.160.648.743.258. Aset tetap tersebut Mutasi tambah aset tetap lainnya dari pembelian di madrasah sumber dana BOS. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	160,648,743,258
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Pembelian	5,835,309,729
Koreksi Perubahan Kondisi	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	194,000
Penghapusan	97,965,865
Hibah (Keluar)	-
Reklasifikasi Keluar	97,926,000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	4,141,605,260
Saldo per 31 Desember 2025	162,146,361,862
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(10,323,003,028)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	151,823,358,834

Mutasi tambah/kurang:
Sedangkan mutasi kurang dari Penghentian dari Pengunaan kondisi aset rusak berat

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp822.573.134.225

C.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.822.573.134.225 dan Rp.666.364.622.373. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan

atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP ada di Satker PTKN dan Kanwil Kemenag Prov. Jatim, hal ini masih berlanjut di tahun berikutnya untuk proses penyelesaiannya. Sumber dari penyelesaian KDP dari SBSN dan Pinjaman serta Rupiah Murni.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	666,364,622,373
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	10,445,536,579
Pengembangan KDP	388,582,986,155
Koreksi Nilai KDP	95,296,540
Mutasi Kurang:	
Penghapusan/ Penghentian KDP	-
Koreksi Nilai KDP Berkurang	52,735,786,613
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	189,397,710,443
Reklasifikasi Dari Aset KDP ke Aset KDP	444,788,410
Koreksi Pencatatan KDP	337,021,956
Saldo per 31 Desember 2025	822,573,134,225

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.330.185.854.997

C.2.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp2.330.185.854.997 dan Rp2.059.078.846.642. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited)
Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,776,166,744,556	(1,286,802,898,777)	489,363,845,779
2	Gedung dan Bangunan	5,605,245,488,060	(1,006,021,314,779)	4,599,224,173,281
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	65,167,905,816	(27,038,638,413)	38,129,267,403
4	Aset Tetap	148,472,663,585	(10,323,003,028)	138,149,660,557
Akumulasi		7,595,052,802,017	(2,330,185,854,997)	5,264,866,947,020

Piutang Jangka Panjang Rp248.450.000

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Akuntansi Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp20,302,354 dan 33,595,950.

Piutang .Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Wilayah Akuntansi Jawa Barat merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntut an Ganti Rugi Rp20.302.354

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.302.354 dan Rp33.595.950.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
ASN UIN Malang	20.302.354	33.595.950-
Jumlah	20.302.354	33.595.950-

Aset *Lainnya* *Rp*22,051,431,712

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset La.innya Kantor Wilayah Akuntansi Jawa Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp22,051,431,712 dan Rp19,316,025,287.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Akuntansi Jawa Barat terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain

Aset Tak Berwujud Rp17.821.118.287

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp17.821.118.287 dan Rp11.751.804.617. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berupa Software

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	11,751,804,617
Mutasi tambah:	
Pembelian	4,352,254,670
Pengembangan Nilai Aset	999,999,000
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	17,104,058,287
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(10,000,500,143)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7,103,558,144

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. Mutasi tambah aset tak berwujud dari pembelian pada Satker perguruan tinggi keagamaan negeri sedangkan mutasi kurang tidak ada

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Rp5.659.924.960

C.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.659.924.960 dan Rp10.585.490.424. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana di Rekening Penampungan-	5,659,924,960	10,585,490,424
-	-	-
T	5,659,924,960	10,585,490,424

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasa di Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum

Aset Lain-lain
Rp25.273.660.872

C.4.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp25.273.660.872 dan Rp17.645.461.259. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2025	17,645,461,259
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	43,419,603,607
Transfer Masuk (Henti Guna)	75,500,000
Penghentian Sementara KDP	444,788,410
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	795,814,000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	36,630,218,180
Saldo per 31 Desember 2025	25.273.660.872
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(16,702,772,264)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	7,456,548,832

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Mutasi Tambah

- Mutasi Tambah Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi aset ke aset Lainnya :
- Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertaninian, Alat Kantor dan Rumah
- Mutasi Tambah Aset Lain-lain berupa Tranfer Masuk :

Mutasi Kurang

- Mutasi Kurang Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap :
- Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertaninian, Alat Kantor dan Rumah

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 26.703.272.407

C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp26.703.272.407 dan Rp20.666.731.013. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	17,821,118,287	(10,000,500,143)	7,820,618,144
Aset Lain-lain	25,273,660,872	(16,702,772,264)	8,570,888,608
-	-	-	-
Total	43,094,779,159	(26,703,272,407)	16,391,506,752

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp34.055.093.300

C.4.5 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.055.093.300 dan Rp106.774.114.605. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	185,383,9	365,669,4
Belanja barang yang masih harus dibayar	1,250,046,3	1,176,563,8

Belanja modal yang masih harus dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	9,657,963,7	31,169,364,3
Dana Pihak Ketiga	7,010,249,9	2,353,118,3
Dana Pihak Ketiga BLU	15,951,449,2	19,371,010,6
T	34,055,093,30	35,064,715,95

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban keuangan yang dimiliki suatu entitas (individu, perusahaan, atau Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban keuangan yang dimiliki suatu entitas (individu, perusahaan, atau dibayar, dan menjadi tanggung jawab pihak yang berutang untuk melunasinya Kepada Pihak Ketiga

Pendapatan Diterima Dimuka Rp5.100.339.842

C.4.6 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.100.339.842 dan Rp4.374.217.738. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	623,374,1	913,869,9
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	47,916,5	145,247,8
Pendapatan Diterima di Muka BLU	4,429,049,2	3,315,100,0
	-	-
T	5,100,339,84	4,374,217,73

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari pelanggan, namun barang atau jasa yang dijanjikan belum sepenuhnya diserahkan. Ini berarti perusahaan menerima pembayaran di awal sebelum pelanggan atau user menerima barang atau jasa yang mereka sewa atau beli

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.4.7 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Uang Persedian	0	0
Tambahan Uang Persediaan		
	-	-
T	0	0

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN, yang juga dikenal sebagai Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP), adalah dana yang diberikan oleh Kuasa

Bendahara Umum Negara (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja (satker) atau pengeluaran yang tidak bisa langsung dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS)

Utang Jangka Pendek Lainnya

C.4.8. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp866.800. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	866,800
	-	-
Total	0	866,800

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya:
Utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor adalah kewajiban bendahara pengeluaran untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, tetapi belum disetorkan ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ekuitas
Rp15.054.129.474.494

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.054.129.474.494.dan Rp14.719.807.504.606. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

C.6 Catatan Penting Lainnya neraca

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp117.460.243.805

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp117,460,243,805 dan Rp113,574,900,221. Realisasi pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3.42. Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya tersebut adalah sebagai berikut

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahunan Audited TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	Naik/Turun	%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	115,208,537,026	113,521,286,480	1,687,250,546	1.49
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	889,519	(889,519)	00.00)
Pendapatan Denda	2,251,706,779	52,724,222.00	2,198,982,557.	4,170.73
Jumlah	117,460,243,805.00	113,574,900,221.00	3,885,343,584.	3.42

Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur Ditjen Pendidikan Islam antara Lian :

- Meningkatnya Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, hal ini disebabkan berubahnya status Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dari IAIN menjadi UIN antara lain UIN Ponorogo, Kediri dan Madura.
- Berkurangnya pendapatan {engelolaan Rekening Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan hal ni disebabkan rekening Pemerintah sudah menggunankan virtual dan semua rekening Pemerintah tidak ada bunga bank;
- Berkurangnya pendapatan Denda keterlambatan Pekerjaan Pemerintah, hal ini disebabkan tahun 2025 sesuai inpres No.1 tsjun 2025 tentang efisiensi anggaran, maka proyek pemerintah juga berimbas sehingga tidak banyak proyek pemerintah

Terdapat perbedaan akun pendapatan pada LRA dan LO sebagaimana pada rincian perbedaan akun pendapatan sebagai berikut :

Akun	Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	537.598.320.031	534.846.027.933	2.752.292.098
4242	Pendapatan Hibah	1.356.050.000	-	1.356.050.000
4243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	24.950.176.556	24.884.605.396	65.571.160
4249	Pendapatan BLU Lainnya	82.939.529.116	85.546.791.225	-2.607.262.109
4251	Pendapatan dari Penjualan		895.309.158	-895.309.158
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya,Riset dan Teknologi	115.085.024.800	115.085.024.800	-
4257	Pendapatan Bunga PengelolaanRekening Perbankandan Pengelolaan Keuangan		13.293.596	-13.293.596
4258	Pendapatan Denda	2.251.706.779	2.251.706.779	-
4259	Pendapatan Lain-lain		4.833.933.562	-4.833.933.562
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	10.777.000		10.777.000
Jumlah		764.191.584.282	768.356.692.449	-4.165.108.167

Penjelasan perbedaan akun pendapatan di LRA dan LO antara lain :

- Adanya Jurnal Manual/Jurnal Penyesuaian Khusus (Akun 51XXXXX)
- Adanya kesalahan pemilihan kode barang pada BAST Ekstrakomptabel/Jasa dan/atau Spby/SPP non BAST Belanja yang belum terbit SP2D/SP2B BLU/SPHL atau BAST Ekstrakomptabel/Jasa namun memilih Aset Intrakomptabel
- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya, Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha akibat pengakuan piutang yang masih harus diterima (PYMHD) tahun 2024 pada Satker UIN Satu Tulungagung, UIN malang dari jurnal penyesuaian
- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah, Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung, Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan akibat pengakuan piutang BLU dari jurnal koreksi pada Satker UIN Malang
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan akibat jurnal pengakuan pndapatan di terima di muka. - Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan Barang / Jasa akibat selisih pendapatan hibah BLU yang mana pengakuannya dari junal penyesuaian Hibah masuk BLU
- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Pendapatan Badan Layanan Umum Rp646.804.531.848

D.2. Pendapatan Badam Layanan (BLU)

Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp646,804,531,848 dan Rp625,402,032,209. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3.42. Hal tersebut disebabkan oleh Kenaikan dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, Pendapatan Hasil Kerjasma Lembaga Badan Usaha dan Pendapatan Lainnya dari Sewa Ruangan pada Satker UIN Malang. . Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	Naik/Turun	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	524,044,615,415	513,752,939,966	10,291,675,449	2.00
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	14,260,000	2,500,000	11,760,000	470.40
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	13,539,444,616	49,609,995,115	(36,070,550,499)	(72.71)
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha – Uang	163,800,000	-	163,800,000	-
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	1,192,250,000	921,600,000	270,650,000	29.37

Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	24,622,176,556	20,605,787,143	4,016,389,413	19.49
Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	328,000,000	-	328,000,000	-
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	39,839,374,686	35,072,565,556	4,766,809,130	13.59
Pendapatan Lain-lain BLU	1,310,849,897	2,615,135,473	(1,304,285,576)	(49.87)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	385,958,718	930,949,469	(544,990,751)	(58.54)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	498,379,967	495,517,585	2,862,382	0.58
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	39,170,515,993	725,071,902	38,445,444,091	5,302.29
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	10,425,000	8,340,000	2,085,000	25.00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	1,655,080,000	597,800,000	1,057,280,000	176.86
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	29,401,000	63,830,000	(34,429,000)	(53.94)
Jumlah	646,804,531,848	625,402,032,209	21,402,499,639	3.42

Beban Pegawai
Rp3,086,101,409,259

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.086.101.409.259 dan Rp2.812.693.567.546

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 10,44 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pegawai karena pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru non ASN dibayarkan TA 2025 dan penambahan pegawan ASN baik CPNS dan PPPK hasil pengadaan tahun 2024 TMT tahun 2025, serta kenaikan pangkat dari PNS.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	167.520.744.064	162.459.231.700	3,12
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.046.765	2.074.525	(1,34)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.627.995.004	13.295.855.636	2,50
Belanja Tunj. Anak PNS	4.188.954.064	4.103.011.255	2,09
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.154.254.950	1.303.474.950	(11,45)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	32.437.070.200	31.888.904.284	1,72
Belanja Tunj. PPh PNS	2.679.545.427	2.607.199.620	2,77
Belanja Tunj. Beras PNS	9.214.358.700	9.075.298.500	1,53
Belanja Uang Makan PNS	22.326.160.000	21.417.200.250	4,24
Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa	18.900.000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	1.078.275.000	786.859.700	37,04
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	98.823.695.225	84.051.857.695	17,57
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	23.857.430.800	22.538.147.688	5,85
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	2.342.409.945.323	2.125.263.189.366	10,22
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Pe	21.396.300.000	13.052.500.000	63,92
Belanja Gaji Pokok PPPK	38.108.341.127	25.253.467.376	50,90
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	555.103	371.134	49,57
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.726.184.721	1.795.379.320	51,84
Belanja Tunjangan Anak PPPK	842.666.929	554.176.614	52,06
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.179.604.328	3.137.518.000	33,21
Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.377.011.485	1.553.712.720	52,99
Belanja Uang Makan PPPK	6.995.582.600	4.149.069.000	68,61
Belanja Tunjangan Umum PPPK	215.030.000	-	-
Belanja Uang Lembur	929.215.000	1.572.914.000	(40,92)
Belanja Uang Lembur PPPK	234.136.000	135.138.000	73,26
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kiner	72.050.382.125	68.251.070.842	5,57
Jumlah	**2.869.394.384.940**	**2.598.247.622.175**	10,44

Beban Persediaan
Rp27,842,606,951

D.4. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27,842,606,951 dan Rp27,822,671,906

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0.07 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Menurunnya beban persediaan dari beban konsumsi yang mana dipengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Persediaan konsumsi	27,828,376,451	27,813,187,694	0.05
Belanja persediaan lainnya	14,105,500	5,509,000	156.04
Belanja Persediaan bahan baku	125,000	3,975,212	(96.86)
Jumlah Beban Persediaan	27,842,606,951.00	27,822,671,906	0.07

Beban Barang dan Jasa Rp Rp610.764.050.777

D.5. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp610.764.050.777 dan Rp608.463.368.624

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2.14 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Menurunnya beban barang dan jasa disebabkan kebijakan pemerintah sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Keperluan Perkantoran	77,184,483,920	83,433,879,552	#REF!
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,661,500	4,052,225	15.04
Belanja Honor Operasional Satuan	17,546,127,650	19,013,874,806	(7.72)

Kerja			
Belanja Barang Operasional Lainnya	6,161,816,231	6,410,330,045	(3.88)
Belanja Honor Output Kegiatan	34,484,215,412	44,093,336,300	(21.79)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	94,968,074,988	110,609,476,899	(14.14)
Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	1,146,884,800	1,656,177,400	(30.75)
Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	1,192,800,000	987,700,000	20.77
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	13,874,393,653	853,476,300	1,525.63
Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	41,958,000	-	-
Belanja Langganan Listrik	30,139,684,251	35,034,619,138	(13.97)
Belanja Langganan Telepon	1,228,755,855	1,127,112,103	9.02
Belanja Langganan Air	1,731,501,972	1,997,625,214	(13.32)
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,976,349,567	5,712,029,302	22.13
Belanja Jasa Konsultan	776,715,679	308,379,000	151.87
Belanja Sewa	9,245,284,030	9,909,603,659	(6.70)
Belanja Jasa Profesi	10,313,963,253	10,489,346,275	(1.67)
Belanja Jasa Lainnya	5,935,175,356	2,513,507,789	136.13
Belanja Barang	44,994,259,051	43,235,204,946	4.07
Belanja Jasa	15,724,075,357	15,642,696,171	0.52
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	112,618,223,944	103,914,192,858	8.38
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	940,722,006	966,875,500	(2.70)
Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	86,415,000	56,280,000	53.54
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	11,204,100	(100.00)
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	-	18,400,000	(100.00)
Jumlah	610,764,050,777	608,463,368,624	0.27

Beban Pemeliharaan Rp107,311,918,340

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp107,311,918,340 dan Rp93,246,863,988.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 15.30 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Menurunnya beban pemeliharaan disebabkan kebijakan pemerintah sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,276,171,537	53,019,048,947	13.69
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	716,033,000	308,802,466	131.87
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,120,944,598	23,343,276,550	(5.24)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185,285,719	182,351,622	1.61
Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,324,190,835	1,130,075,962	282.65
Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	37,948,385	(100.00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	134,630,363	62,183,000	116.51
Belanja Pemeliharaan	19,752,831,788	15,161,307,056	30.28
Belanja Persediaan suku cadang	-	-	-
Jumlah	107,311,918,340	93,246,863,988	15.30

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp53,462,729,301

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp53,462,729,301 dan Rp86,632,792,963

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 38.29 persen disebabkan oleh Penurunan beban perjalanan dinas tahun 2025 disebabkan kebijakan pemerintah sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025... Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,503,173,767	25,374,300,530	(34.96)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,279,106,166	6,641,586,322	(20.51)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,158,785,669	4,695,273,457	(54.02)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,725,224,113	10,257,828,820	(44.19)
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	-	306,738,306	(100.00)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	391,105,506	3,462,527,086	(88.70)
Belanja Perjalanan	23,405,334,080	35,894,538,442	(34.79)
Jumlah	53,462,729,301.00	86,632,792,963	(38.29)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang

Rp987,350,321

berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp987,350,321 dan Rp498,573,080

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 98.04 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan olehKenaikan beban barang untuk diserahkan masyarakat dalam hal ini disebabkan kenaikan beban persediaan lainnya untuk dijual / diserahkan ke masyarakat pada Satker Perguruan Tinngi Keagamaan Negeri untuk operasional dan Kampus.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk diserahkan/dijual kepada Masyarakat	40,340,000	-	-
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	947,010,321	498,573,080.00	89.94
Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	987,350,321.00	498,573,080	98.04

D.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp138,540,600,000

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp138,540,600,000 dan Rp128,016,366,000

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.22 disebabkan oleh Meningkatnya beban bansos untuk meningkatkan beasiswa siswa miskin dan mahasiswa miskin berupa pemberian PIP dalam rangkah perlindungan sosial agar siswa dan mahasiswa tidak putus sekolah.. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	-	2,766,000.00	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	138,540,600,000	128,013,600,000.00	8.22
Jumlah	138,540,600,000	128,016,366,000.00	8.22

D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp305,677,407,317

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp305,677,407,317 dan Rp281,922,714,803.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud..Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	158,066,589,660	138,670,691,503	13.99
Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	142,109,689,724	138,354,759,204	2.71
Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,676,582,971	2,851,494,409	(6.13)
Belanja Penyusutan Irigasi	577,162,069	579,055,363	(0.33)
Belanja Penyusutan Jaringan	252,727,134	253,159,637	(0.17)
Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	296,387,173	239,387,617	23.81
Jumah Penyusutan	303,979,138,731	280,948,547,733	8.20
Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak D	158,383,860	93,518,531.00	69.36
Jumlah Amortisasi	158,383,860	93,518,531.0	69.36
Jumlah	305,677,407,317	281,042,066,264	8.22

D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp-1.757.007

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-1.757.007 dan Rp80,765,949

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(1.757.007)	27,690,133	(127)
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	-	5,387,500	(100.00)
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	-	471,089	(100.00)
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Sewa Tanah BLU	-	44,504,167	(100.00)

Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Sewa Ruangan BLU	-	2,246,167	(100.00)
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(309,018)	466,893	(166.19)
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ? Piutang Sewa Gedung BLU	-	-	-
Jumlah	(1.757.007)	80,765,949	(109)

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp-26,863,559,499

D.12. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-26,863,559,499 dan Rp-4,765,570,858

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Kerugian Pelepasan Aset	(27,652,359,861)	(6,086,711,489.00)	354
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	77,261,000	408,123,450.00	(81)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	412,590,407	775,863,835.00	(47)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	298,948,955 -	137,153,346	-
	-	-	-
Jumlah	(26,863,559,499)	(4,765,570,858)	463,70

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0

D.13. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp2,658,741,453

D.14. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,658,741,453 dan Rp3,645,918,662.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	555,339,578	684,623,814.00	(18.88)

Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	119,614,774	413,503,749.00	(71.07)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1,910,002,205	1,067,354,642.00	78.95
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	10,777,000	839,300,000.00	(99)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2,920,000	1,746,500.00	67
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	585,250.00	(100)
Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	(7,567,000)	(11,840,348.00)	(36)
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	28,110,000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	1,041	-	-
Jumlah	2,658,741,453	3,645,918,662	(173)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNBP	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut:

Tidak ada pos luar biasa sampai dengan tanggal pelaporan

D.8 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp14,719,807,504,606.00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.14,719,807,504,606.00 dan Rp.13,966,773,140,721.00

Defisit LO Rp.3,591,638,591,404.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3,591,638,591,404.00 dan Rp.3,301,520,404,625.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0.00

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-17,517,946,658 dan Rp.-16,575,619,553 yaitu sebagai berikut

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

Koreksi Nilai Persediaan Rp- 11,372,000.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-11,372,000.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	(11,372,000)
	-
Jumlah	(11,372,000.0)

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp8,280,000.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.8,280,000 dan Rp.185,150,373. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya	8,280,000
	-
Jumlah	8,280,000.0

Selisih Revaluasi Aset Rp.0.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp-9,978,557,855

E.4.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-9,983,111,895 dan Rp.-2,404,530,790. .

Koreksi ini Koreksi aset non revaluasi berasal dari hibah berupa barang di Satker BLU (UIN Malang, UIN

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(9,983,111,895)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	(9,983,111,895)

Koreksi Lain-Lain Rp-7,531,742,763

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-7,531,742,763 dan Rp.-14,356,239,136. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Koreksi Penyesuaian dari utang belanja pegawai tahun yang lalu yang belum disesuaikan namun anggaran belanja pegawai atas kebijakan

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Penyesuaian SAL BLU	-
Koreksi Lainnya	(7,531,742,763)
-	-
Jumlah	(7,531,742,763.0)

Transaksi Antar Entitas Rp3,943,478,507,950

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3,943,478,507,950 dan Rp.4,071,130,388,063. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik

internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4,049,809,986,358
Diterima dari Entitas Lain	(123,079,267,895)
Transfer Keluar	(216,020,707,924)
Transfer Masuk	221,691,275,758
Pengesahan Hibah Langsung	6,929,406,653
Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	4,147,815,000
	-
Jumlah	3,943,478,507,950

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 4,049,809,986,358, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 123,079,267,895

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-216,020,707,924 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Peralatan dan Mesin	Satker Madrasah Penerima Manfaat SBSN 2024	32,642,600,272
Gedung dan Bangunan	Satker Madrasah Penerima Manfaat SBSN 2024	198,740,434,290

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Satker Madrasah Penerima Manfaat SBSN 2024	-6145565157
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Satker Madrasah Penerima Manfaat SBSN 2024	-3841975363
Jumlah		221,395,494,042

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp221,691,275,758 yang terdiri dari

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	2,130,000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MADIUN	75,500,000
Peralatan dan Mesin	KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA JAKARTA	26,804,950
Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR (SETJEN)	89,980,000
Peralatan dan Mesin	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	29,800,000
Peralatan dan Mesin	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI	138,708,000
Gedung dan Bangunan	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA	3,340,229,273
Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TIMUR(pendis)	221,395,494,042
Jumlah		225,098,646,265

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 9,157,522,300 dari total Rp0 yang

akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN	Uang	959393653
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KEDIRI	Barang	29600000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGAWI	Barang	135088000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	Barang	564125000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PACITAN	Barang	384000000
KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	Barang	15000000
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONOROGO	Barang	214800000
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 LAMONGAN	Barang	3557400000
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 TULUNGAGUNG	Barang	200000000
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 TULUNGAGUNG	Barang	870000000
Total Pengesahan Hibah Langsung		6,929,406,653

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANYUWANGI	Barang	1,588,850,000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAGETAN	Barang	80000000
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PONOROGO	Barang	207,550,000
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MALANG	Barang	1,350,000,000
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 BLITAR	Barang	196215000
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 12 MADIUN	Barang	200,000,000.00
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 TULUNGAGUNG	Barang	217000000
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 BLITAR	Barang	308200000
Total Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu		4,147,815,000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp15,054,129,474,494

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.15,054,129,474,494.00 dan Rp.14,719,807,504,606.00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada saat laporan ini disusun sampai dengan tanggal pelaporan tidak ada kejadian yang dapat mempengaruhi perubahan Laporan Keuangan.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor: Tentang 286 Tahun 2025 tentang Perubahan pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tentang Penetapan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Bagian Pendidikan Islam Kode Satuan Kerja (417802) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM,dan Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Maret 2025 telah dilakukan pergantian sebagimana susunan dibawah ini.

Semula

Kuasa Pengguna Anggaran	:	DR. Akhmad Sruji Bahtiar,
M.Pd.I Pejabat Pembuat Komitmen	:	Ibnu Kuswandoko, S.Si
		Syahriel Mohi, Sos
Pejabat Penandatangan/PengujiSPM	:	Ahmad Andi Akmal, S.Kom,
MT Bendahara Pengeluaran	:	Masdukin, SE
Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rosyada Dzulfahmi L, S.Psi
	:	Khurinika Cahyaning S, ST

Menjadi

Kuasa Pengguna Anggaran	:	DR. Akhmad Sruji Bahtiar,
M.Pd.I Pejabat Pembuat Komitmen	:	Ibnu Kuswandoko, S.Si
		Syahriel Mohi, Sos
Pejabat Penandatangan/PengujiSPM	:	Ahmad Andi Akmal, S.Kom,
MT Bendahara Pengeluaran	:	Masdukin, SE
Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rosyada Dzulfahmi L, S.Psi
	:	Khurinika Cahyaning S, ST
	:	Ahmad Hanif, SE

F.3 PENGUNGKAPAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM (BLU)

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat (4 Satker) satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ikhtsar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA Tahun 2025 (Audited) sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nama Satker	Aset	Kewajiban	Pendapatan-Total	Pendapatan-BLU	Belanja-Total	Belanja-BLU
1	423812	UIN Maliki Malang	2,659,008,131,119	6,494,833,776	231,260,143,542	231,164,715,809	589,851,888,718	212,176,597,642
2	423770	UIN Suanan Ampel Surabaya	4,096,888,493,134	16,506,202,369.	206,918,760,746	206,897,512,447	404,766,623,084	189,273,022,232
3	423792	UIN Satu Tulungagung	935,950,612,875	3,595,529,926	127,483,211,901	125,880,485,459	211,347,344,521	89,684,700,757
4	423786	UIN Khas Jember	810,809,049,194	7,029,249,937	81,466,403,418	81,334,710,839	180,871,985,237	63,273,463,715
Jumlah			8,502,269,419,682	31,753,922,050	647,128,519,607	645,277,424,554	65,957,957,979	554,407,784,346

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

2. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Kanwil

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
~~SEMESTERAN / TRIWULAN~~ / TAHUNAN TA 2025

Kode BA dan Nama BA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Kode Es1 dan Nama Es1: (025.04) PENDIDIKAN ISLAM
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (0500) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	√		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan	√		Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	√		Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan	√		Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	√		Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	√		Tidak

9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	√		Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	√		Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	√		Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya

	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak

3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	√		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√	√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	√	√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	√		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	√		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk	√		
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak

2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		√	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak

4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	√		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	√		Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan,

Masih ada To Do ListLainnya yaitu KETIDAK SESUAN KODE AKUN VS KODE ASET DAN KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN yang mana disebabkan bast barang dan aset salah memilih kode aset dan persediaan. Sebagian sudah dilakukan koreksi maupun input ulang dengan perolehan lainnya dan sudah dilakukan jurnal manual modul GLP

Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Dilip Darmanto, S.Kom, MM) NIP. 197301272005011003	Sidoarjo.,05 Mei 2026 Penelaah,  (Dilip Darmanto, S.Kom, MM) NIP 197301272005011003

13.931.691.609

(13.931.691.609)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025040500KD

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:32 PM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**769,972,220,000**	**768,356,692,449**	**(1,615,527,551)**	**99.79**	**712,238,918,000**	**738,983,791,980**	**26,744,873,980**	**103.76**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	640,845,839,000	645,277,424,554	4,431,585,554	100.69	589,166,843,000	621,360,537,461	32,193,694,461	105.46
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	129,126,381,000	123,079,267,895	(6,047,113,105)	95.32	123,072,075,000	117,623,254,519	(5,448,820,481)	95.57
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**769,972,220,000**	**768,356,692,449**	**(1,615,527,551)**	**99.79**	**712,238,918,000**	**738,983,791,980**	**26,744,873,980**	**103.76**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,066,238,951,000	4,608,183,208,621	(458,055,742,379)	90.96	5,093,961,352,000	4,755,778,903,016	(338,182,448,984)	93.36
1. Belanja Pegawai	2,936,216,893,000	2,886,862,737,665	(49,354,155,335)	98.32	2,648,659,561,000	2,608,667,369,190	(39,992,191,810)	98.49
2. Belanja Barang	1,195,374,547,000	999,916,798,106	(195,457,748,894)	83.65	1,126,896,788,000	1,024,651,298,710	(102,245,489,290)	90.93
3. Belanja Modal	795,875,911,000	582,863,072,850	(213,012,838,150)	73.24	1,190,233,003,000	994,446,635,116	(195,786,367,884)	83.55
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	138,771,600,000	138,540,600,000	(231,000,000)	99.83	128,172,000,000	128,013,600,000	(158,400,000)	99.88
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025

UAPPAW : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim 025040500KD

Tgl Data : 05/05/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:32 PM

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**5,066,238,951,000**	**4,608,183,208,621**	**(458,055,742,379)**	**90.96**	**5,093,961,352,000**	**4,755,778,903,016**	**(338,182,448,984)**	**93.36**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

UAPPAW : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:32 PM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	27,041,975,422	42,321,929,023	(15,279,953,601)	(36.10)
Kas pada Badan Layanan Umum	742,646,255,405	430,861,059,461	311,785,195,944	72.36
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	13,000,000,000	236,892,000,000	(223,892,000,000)	(94.51)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	37,500,000	9,220,000,000	(9,182,500,000)	(99.59)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	9,143,152,671	7,868,801,594	1,274,351,077	16.19
Piutang Bukan Pajak	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,061,531,000	1,753,346,000	(691,815,000)	(39.46)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(24,302,525)	(35,404,588)	11,102,063	(31.36)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	1,037,228,475	1,717,941,412	(680,712,937)	(39.62)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	499,343,500	851,329,731	(351,986,231)	(41.35)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(48,438,463)	(47,688,316)	(750,147)	1.57
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	450,905,037	803,641,415	(352,736,378)	(43.89)
Persediaan	9,804,937,052	9,995,801,284	(190,864,232)	(1.91)
JUMLAH ASET LANCAR	**803,161,954,062**	**739,683,174,189**	**63,478,779,873**	**8.58**
ASET TETAP				
Tanah	8,177,820,133,319	8,181,715,205,843	(3,895,072,524)	(0.05)
Peralatan dan Mesin	1,776,166,744,556	1,562,160,978,489	214,005,766,067	13.70
Gedung dan Bangunan	5,605,245,488,060	5,492,055,771,009	113,189,717,051	2.06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	65,167,905,816	65,187,905,816	(20,000,000)	(0.03)
Aset Tetap Lainnya	148,472,663,585	160,648,743,258	(12,176,079,673)	(7.58)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	822,573,134,225	666,364,622,373	156,208,511,852	23.44
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,330,185,854,997)	(2,059,078,846,642)	(271,107,008,355)	13.17
JUMLAH ASET TETAP	**14,265,260,214,564**	**14,069,054,380,146**	**196,205,834,418**	**1.39**
Properti Investasi				
Properti Investasi	3,316,020,511	3,316,020,511	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(525,015,567)	(446,492,334)	(78,523,233)	17.59
JUMLAH Properti Investasi	**2,791,004,944**	**2,869,528,177**	**(78,523,233)**	**(2.74)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	20,302,354	33,595,950	(13,293,596)	(39.57)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	20,302,354	33,595,950	(13,293,596)	(39.57)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**20,302,354**	**33,595,950**	**(13,293,596)**	**(39.57)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	17,821,118,287	11,751,804,617	6,069,313,670	51.65

NERACA

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

UAPPAW : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:32 PM

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	5,659,924,960	10,585,490,424	(4,925,565,464)	(46.53)
Aset Lain-lain	25,273,660,872	17,645,461,259	7,628,199,613	43.23
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(26,703,272,407)	(20,666,731,013)	(6,036,541,394)	29.21
JUMLAH ASET LAINNYA	**22,051,431,712**	**19,316,025,287**	**2,735,406,425**	**14.16**
JUMLAH ASET	**15,093,284,907,636**	**14,830,956,703,749**	**262,328,203,887**	**1.77**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	34,055,093,300	106,774,114,605	(72,719,021,305)	(68.11)
Pendapatan Diterima Dimuka	5,100,339,842	4,374,217,738	726,122,104	16.60
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	866,800	(866,800)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**39,155,433,142**	**111,149,199,143**	**(71,993,766,001)**	**(64.77)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**39,155,433,142**	**111,149,199,143**	**(71,993,766,001)**	**(64.77)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	15,054,129,474,494	14,719,807,504,606	334,321,969,888	2.27
JUMLAH EKUITAS	**15,054,129,474,494**	**14,719,807,504,606**	**334,321,969,888**	**2.27**
JUMLAH EKUITAS	**15,054,129,474,494**	**14,719,807,504,606**	**334,321,969,888**	**2.27**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**15,093,284,907,636**	**14,830,956,703,749**	**262,328,203,887**	**1.77**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : **(025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:30 PM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	117,460,243,805	113,574,900,221	3,885,343,584	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	645,795,812,110	625,402,032,209	20,393,779,901	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	763,256,055,915	738,976,932,430	24,279,123,485	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	763,256,055,915	738,976,932,430	24,279,123,485	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	3,086,101,409,259	2,812,693,567,546	273,407,841,713	-
Beban Persediaan	27,842,606,951	27,822,671,906	19,935,045	-
Beban Barang dan Jasa	610,764,050,777	608,463,368,624	2,300,682,153	-
Beban Pemeliharaan	107,311,918,340	93,246,863,988	14,065,054,352	-
Beban Perjalanan Dinas	53,462,729,301	86,632,792,963	(33,170,063,662)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	987,350,321	498,573,080	488,777,241	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(025) KEMENTERIAN AGAMA**

ESELON I : **(04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : **(025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim**

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 05/05/26 1:30 PM

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	138,540,600,000	128,016,366,000	10,524,234,000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	305,677,407,317	281,922,714,803	23,754,692,514	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,757,007	80,765,949	(79,008,942)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	4,330,689,829,273	4,039,377,684,859	291,312,144,414	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,567,433,773,358)	(3,300,400,752,429)	(267,033,020,929)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(26,863,559,499)	(4,765,570,858)	(22,097,988,641)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	788,800,362	1,321,140,631	(532,340,269)	-
Beban Pelepasan Aset	27,652,359,861	6,086,711,489	21,565,648,372	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,658,741,453	3,645,918,662	(987,177,209)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,666,308,453	3,657,759,010	(991,450,557)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,567,000	11,840,348	(4,273,348)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(24,204,818,046)	(1,119,652,196)	(23,085,165,850)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,591,638,591,404)	(3,301,520,404,625)	(290,118,186,779)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,591,638,591,404)	(3,301,520,404,625)	(290,118,186,779)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:31 PM

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,719,807,504,606	13,966,773,140,721	753,034,363,885	5.39
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,591,638,591,404)	(3,301,520,404,625)	(290,118,186,779)	8.79
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(17,517,946,658)	(16,575,619,553)	(942,327,105)	5.69
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(11,372,000)	0	(11,372,000)	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	8,280,000	185,150,373	(176,870,373)	(95.53)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(9,983,111,895)	(2,404,530,790)	(7,578,581,105)	315.18
LAIN-LAIN	(7,531,742,763)	(14,356,239,136)	6,824,496,373	(47.54)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,943,478,507,950	4,071,130,388,063	(127,651,880,113)	(3.14)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	334,321,969,888	753,034,363,885	(418,712,393,997)	(55.6)
EKUITAS AKHIR	15,054,129,474,494	14,719,807,504,606	334,321,969,888	2.27

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:29 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,080,276,198	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	7,010,249,937	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	15,951,449,287	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	574,274,321,905	0
0.0	111921	Surat Berharga - BLU	99,000,000,000	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	69,371,933,500	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan	13,000,000,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	37,500,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9,143,152,671	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1,061,531,000	0
0.0	115811	Piutang Sewa Tanah - BLU	395,000,000	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	10,000,000	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	94,343,500	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan	0	24,302,525
0.0	116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah	0	39,500,000
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan	0	1,000,000
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan	0	7,938,463
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,282,205,234	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,120,192,808	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	402,491,358	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	47,652	0
0.0	131111	Tanah	8,177,820,133,319	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,776,166,744,556	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,605,245,488,060	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	45,667,555,000	0
0.0	134112	Irigasi	10,061,321,954	0
0.0	134113	Jaringan	9,439,028,862	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	1,462,265,330	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	147,010,398,255	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	822,573,134,225	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,286,802,898,777
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,006,021,314,779
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	17,223,170,394
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,680,302,267
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,135,165,752
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	10,323,003,028
0.0	138311	Properti Investasi	3,316,020,511	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	525,015,567

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	20,302,354	0
0.0	162151	Software	15,686,770,562	0
0.0	162161	Lisensi	234,047,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,900,300,225	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	5,659,924,960	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	24,828,872,462	0
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	444,788,410	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	16,702,772,264
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	9,947,547,643
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	52,952,500
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	185,383,901
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,250,046,399
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	9,657,963,776
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	7,010,249,937
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	15,951,449,287
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	623,374,100
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	47,916,500
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	4,429,049,242
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,049,809,986,358
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	123,079,267,895	0
0.0	313211	Transfer Keluar	216,020,707,924	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	221,691,275,758
0.0	391111	Ekuitas	0	14,719,807,504,606
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	11,372,000	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,983,111,895	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	7,531,742,763	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	6,929,406,653
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,147,815,000
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	8,280,000
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	524,044,615,415
3.0	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	0	14,260,000
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	12,497,451,400
3.0	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan	0	163,800,000
3.0	424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan -	0	1,192,250,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	24,654,450,034
3.0	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	328,000,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	39,839,374,686
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran	0	39,543,855

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:29 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,310,849,897
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	385,958,718
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	499,379,967
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	39,170,515,993
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,425,000
3.0	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	1,655,080,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	29,401,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	77,261,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	412,590,407
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	298,948,955
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	115,629,262
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	6,176,796
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	522,176,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	113,709,533,300
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	853,315,500
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,251,706,779
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	555,339,578
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	119,615,815
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,910,002,205
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	28,110,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,706,168
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	10,777,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	2,920,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	167,520,744,064	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2,046,765	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13,627,995,004	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,188,954,064	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,154,254,950	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	32,437,070,200	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,679,545,427	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	9,214,358,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	22,326,160,000	0
3.0	511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT	18,900,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,078,275,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	98,823,695,225	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	23,857,430,800	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	2,342,409,945,323	0
3.0	511529	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh	21,396,300,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	38,108,341,127	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	555,103	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,726,184,721	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	842,666,929	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,179,604,328	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,377,011,485	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	6,995,582,600	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	215,030,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	929,215,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	234,136,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	72,050,382,125	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	17,288,067,148	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	77,184,483,920	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,661,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17,546,127,650	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6,161,816,231	0
3.0	521211	Beban Bahan	110,629,816,240	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	34,484,215,412	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	94,968,074,988	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	1,146,884,800	0
3.0	521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk	1,192,800,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	13,874,393,653	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,986,593,677	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	178,677,150	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	41,958,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	30,795,565,516	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,228,755,855	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,805,542,942	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,976,349,567	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	776,715,679	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,245,284,030	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,313,963,253	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	5,935,175,356	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,276,171,537	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	716,033,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,120,944,598	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185,285,719	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	134,630,363	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:29 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,503,173,767	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,279,106,166	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,158,785,669	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,725,224,113	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	391,105,506	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	199,418,957,171	0
3.0	525112	Beban Barang	44,954,259,051	0
3.0	525113	Beban Jasa	15,724,075,357	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	19,554,662,288	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	23,405,334,080	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	112,580,723,944	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	940,722,006	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	138,540,600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	158,067,873,742	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	142,115,485,859	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,676,582,971	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	577,162,069	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	252,727,134	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	296,387,173	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	78,523,233	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,433,011,276	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	21,270,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	158,383,860	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,828,376,451	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,324,190,835	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	40,340,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	947,010,321	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	125,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	14,105,500	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	7,567,000	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU	0	5,714,563
3.0	594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari	7,471,570	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	86,415,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	27,652,359,861	0
JUMLAH			**22,165,753,464,769**	**22,165,753,464,769**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,608,183,208,621
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	768,356,692,449	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	521,197,118,261
3.0	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	0	14,260,000
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	13,634,649,672
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	24,468,611,196
3.0	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	415,994,200
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	42,372,467,921
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran	0	39,543,855
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,317,459,324
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	423,504,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	560,175,800
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	39,138,734,325
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	10,425,000
3.0	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	1,655,080,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	29,401,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	77,261,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	412,590,407
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	298,948,955
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	100,332,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	6,176,796
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	522,176,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	113,709,533,300
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	853,315,500
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	13,293,596
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,251,706,779
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	555,339,578
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	121,614,774
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	4,127,162,001
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	28,110,000
3.0	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang	0	1,041
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,706,168
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	167,563,231,340	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,069,445	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,631,587,110	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,189,449,542	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,153,710,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	32,563,321,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,677,962,591	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9,215,807,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	22,533,305,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,080,870,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	98,833,885,495	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	23,857,430,800	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	2,342,486,903,573	0
3.0	511529	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh	21,459,000,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	38,123,027,527	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	558,658	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,726,825,441	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	842,666,929	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,182,434,328	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,377,446,005	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	6,972,183,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	215,770,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	929,215,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	234,136,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	72,288,770,342	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	17,299,939,796	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	77,166,055,888	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,661,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	17,550,543,150	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,161,816,231	0
3.0	521211	Belanja Bahan	110,642,629,240	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34,474,205,412	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	95,009,941,488	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	1,146,884,800	0
3.0	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk	1,192,800,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	13,874,393,653	0
3.0	521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk	35,999,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	11,886,448,037	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	178,677,150	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	255,738,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,592,486,004	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	30,870,855,572	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,229,706,403	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,726,657,632	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:34 PM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,976,187,137	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	776,715,679	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,245,284,030	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,312,908,253	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,935,175,356	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,396,303,494	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	236,575,894	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	716,033,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22,122,351,598	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	357,950,000	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185,285,719	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	134,630,363	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,529,808,675	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,277,907,166	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,158,785,669	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,725,224,113	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	452,732,654	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	199,671,757,171	0
3.0	525112	Belanja Barang	44,994,259,051	0
3.0	525113	Belanja Jasa	15,797,793,171	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	19,752,831,788	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	23,405,334,080	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	112,365,423,944	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	6,635,597,496	0
3.0	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	2,387,888,065	0
3.0	525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	369,949,907	0
3.0	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	264,675,726	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	940,722,006	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	40,000,000	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	40,578,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,682,191,610	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	368,933,985,149	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,135,822,667	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	4,681,379,319	0
3.0	537111	Belanja Modal Tanah - BLU	8,841,494,572	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	94,951,531,716	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	20,917,496,837	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	6,087,473,080	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:34 PM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	138,547,200,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	39,859,376
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	19,021
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,398,526
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	452,876
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,445,050
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	109,275,800
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	272,328
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,448,400
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,590,000
3.1	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	10,190,270
3.1	511521	Pengembalian Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	76,958,250
3.1	511529	Pengembalian Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan	0	62,700,000
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	14,686,400
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,555
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	640,720
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,830,000
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	434,520
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	562,400
3.1	511633	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	740,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	238,388,217
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	11,872,648
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	36,849,688
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	4,415,500
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	48,000
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	44,266,500
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	115,017,931
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	1,170,384
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	127,200
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	12,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	26,834,908
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,000
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	61,627,148
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	368,302,100
3.1	574111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan	0	6,600,000
JUMLAH			**5,377,783,941,786**	**5,377,783,941,786**

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (025040500KD) Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl Data : 05/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 05/05/26 1:34 PM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl. Cetak 27/02/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22,531,733,541	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	981,184,809	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	18,809,010,673	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	330,489,125,961	0
0.0	111921	Surat Berharga - BLU	99,000,000,000	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	1,371,933,500	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	236,892,000,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	9,220,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	7,868,801,594	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,000,000	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	675,846,000	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1,077,500,000	0
0.0	115811	Piutang Sewa Tanah - BLU	445,833,333	0
0.0	115812	Piutang Sewa Gedung - BLU	207,900,000	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	9,999,999	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	187,596,399	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	30,017,088
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	5,387,500
0.0	116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU	0	44,504,167
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	2,246,167
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	937,982
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,250,257,809	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,208,292,424	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	537,251,051	0
0.0	131111	Tanah	8,181,715,205,843	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,562,160,978,489	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,492,055,771,009	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	45,667,555,000	0
0.0	134112	Irigasi	10,061,321,954	0
0.0	134113	Jaringan	9,459,028,862	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	15,369,289,107	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	145,279,454,151	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	666,364,622,373	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,160,732,508,576
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	864,380,629,650
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	14,546,587,423

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT WILAYAH

PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim

Tgl. Cetak 27/02/2026

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,103,140,198
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	3,889,938,618
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	10,426,042,177
0.0	138311	Properti Investasi	3,316,020,511	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	446,492,334
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	33,595,950	0
0.0	162151	Software	9,842,441,892	0
0.0	162161	Lisensi	228,047,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,681,315,225	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	10,585,490,424	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	17,645,461,259	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	12,210,144,646
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	8,424,903,867
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	31,682,500
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	365,669,478
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,176,563,842
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	52,338,387,973
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	31,169,364,330
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,353,118,309
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	19,371,010,673
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	913,869,905
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	145,247,833
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	3,315,100,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	866,800
0.0	391111	Ekuitas	0	14,719,807,504,606
JUMLAH			**16,911,231,866,642**	**16,911,231,866,642**